

**ANALISIS PERAN GANDA PADA PEREMPUAN TERDIDIK
DALAM PERSPEKTIF SOSIAL - EKONOMI DAN ETNIS DI
INDONESIA**

TESIS

Untuk Memenuhi Persyaratan
Memperoleh Gelar Magister



Oleh :

FADHILLAH SHANTIKA

176020102111001

**PROGRAM MAGISTER ILMU EKONOMI
PASCASARJANA FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS BRAWIJAYA
MALANG
2019**



TESIS

ANALISIS PERAN GANDA PADA PEREMPUAN TERDIDIK DALAM PERSPEKTIF SOSIAL EKONOMI DAN ETNIS DI INDONESIA

Oleh :

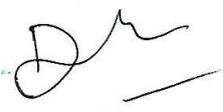
FADHILLAH SHANTIKA
176020102111001

Dipertahankan di depan penguji
Pada tanggal : 18 Maret 2019
Dan dinyatakan memenuhi syarat

Komisi Pembimbing,



Prof. Dr. M. Pudjihardjo, SE., MS
Ketua



Devanto Shasta Pratomo, SE., M.Si., Ph.D
Anggota

Mengetahui,
a/n. Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Brawijaya
Ketua Program Magister Ilmu Ekonomi



Devanto Shasta Pratomo, SE., M.Si., Ph.D.
NIP. 19761003 200112 1 003

LEMBAR IDENTITAS KOMISI PEMBIMBING DAN PENGUJI

Judul : ANALISIS PERAN GANDA PADA PEREMPUAN TERDIDIK DALAM PERSPEKTIF SOSIAL EKONOMI DAN ETNIS DI INDONESIA

Nama Mahasiswa : FADHILLAH SHANTIKA

Program Studi : ILMU EKONOMI

KOMISI PEMBIMBING

Pembimbing 1 : Prof. Dr. M. Pudjihardjo, SE., MS

Pembimbing 2 : Devanto Shasta Pratomo, SE., M.Si., Ph.D.

TIM PENGUJI

Dosen Penguji 1 : Prof. Dr. M. Umar Burhan, SE., MS

Dosen Penguji 2 : Dr. Sasongko, SE., MS

Tanggal Yudisium : 18 Maret 2019

a.n. Dekan

Ketua Program Studi Magister Ilmu Ekonomi



Devanto Shasta Pratomo, SE., M.Si., Ph.D..

NIP. 19761003 200112 1 003

PERNYATAAN ORISINALITAS TESIS

Saya menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa sepanjang pengetahuan saya, didalam naskah TESIS dengan judul:

"ANALISIS PERAN GANDA PADA PEREMPUAN TERDIDIK DALAM PERSPEKTIF SOSIAL EKONOMI DAN ETNIS DI INDONESIA"

Tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar akademik di suatu Perguruan Tinggi, dan tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila ternyata di dalam naskah TESIS ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur PLAGIASI, saya bersedia TESIS ini digugurkan dan gelar akademik yang telah saya peroleh (MAGISTER) dibatalkan, serta diproses sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. (UU NO. 20 Tahun 2003, Pasal 25 ayat 2 dan pasal 70)

Malang, 18 Maret 2019

Mahasiswa,



Nama : FADHILLAH SHANTIKA
NIM : 176020102111001
PS : MAGISTER ILMU EKONOMI
PPS FEB UB

RIWAYAT HIDUP

Fadhillah Shantika, Malang, 30 September 1994. Anak tunggal dari bapak Syahbudin dan ibu Endang Sri Sundari. Mengenyam pendidikan jenjang S1 (Strata Satu) Ilmu Ekonomi pada periode 2012-2016 di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya Malang dengan program studi Keuangan dan Perbankan. Kemudian melanjutkan jenjang S2 (Strata Dua) Ilmu Ekonomi dengan program studi Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah pada tahun 2017-2019 di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya Malang.

Malang, 03 Maret 2019

Penulis



UCAPAN TERIMAKASIH

Penulis menyadari bahwa penyusunan Tesis ini tidak akan terwujud tanpa adanya bantuan dan dorongan dari berbagai pihak. Oleh karena itu pada kesempatan ini penulis menyampaikan ucapan terimakasih kepada :

1. Kedua Orang tua, Mama Endang Sri Sundari dan Papa Syahbudin serta seluruh keluarga yang tidak pernah berhenti memberi doa dan semangat sehingga penulis dapat termotivasi dalam penyusunan Tesis ini.
2. Prof. Dr. Ir. Nuhfil Hanani AR. MS, selaku Rektor Universitas Brawijaya Malang yang telah memberikan kesempatan bagi penulis untuk dapat menempuh dan menyelesaikan pendidikan di Universitas Brawijaya Malang.
3. Bapak Nurkholis, SE., M.Bus.(Acc)., Ak., Ph.D, selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya Malang yang telah memberikan kesempatan bagi penulis untuk dapat menempuh studi Magister Ilmu Ekonomi.
4. Prof. Devanto Shasta Pratomo, SE., M.Si., Ph.D, selaku Ketua Program Studi Program Magister Ilmu Ekonomi Universitas Brawijaya dan Dosen Pembimbing II yang telah banyak membantu serta memberikan ilmu kepada penulis dalam penyelesaian Tesis ini.
5. Prof. Dr. M. Pudjihardjo, SE., MS. selaku Pembimbing I yang telah membimbing serta memberikan arahan yang sangat membantu penulis dalam penyelesaian Tesis ini.
6. Prof. Dr. M. Umar Burhan, SE., MS, dan Dr. Sasongko, SE., MS selaku Penguji I dan Penguji II atas pemberian saran dan masukan sehingga Tesis ini dapat menjadi lebih baik.
7. BANLIT Bank Indonesia yang telah memberikan bantuan dana penelitian sehingga penulis dapat menyelesaikan penelitian ini tepat pada waktunya.
8. Segenap Dosen dan Staff Program Magister Jurusan Ilmu Ekonomi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya Malang atas ilmu, bimbingan dan bantuannya kepada penulis.
9. Lembaga Pengkajian Kemasyarakatan dan Pembangunan Jawa Timur (LPKP Jatim) yang telah banyak memberikan informasi serta motivasi kepada penulis terkait peran dan kontribusi besar perempuan di Indonesia.

10. Meiyantika K, Hasti Parlitasari dan Nadena Restu sebagai sahabat yang selalu memberi bantuan dan dorongan semangat selama proses penyusunan Tesis ini.
11. Brillian Akbar yang telah meluangkan waktu untuk berbagi ilmu *running* data IFLS dan membantu dalam berbagai hal dalam proses penyusunan Tesis ini.
12. Reza Wahyu Hidayat yang selalu memberikan motivasi dan meluangkan waktunya untuk bertukar pikiran dengan penulis.
13. Dhien A.P, Novia Prima dan Eko Prasetyo yang selalu menghibur dan memberikan semangat pada penulis agar segera menyelesaikan Tesis ini.
14. Ryan Samudra Bijaksana yang secara tidak langsung mampu memotivasi penulis untuk segera meraih gelar magister Ilmu Ekonomi.
15. Iqlima Parmana, Tika Silvia, Dikarafna Y.S, Teddy Anggoro, Muchlas Sengaji, Ferry Yulli serta segenap Mahasiswa Program Magister Ilmu Ekonomi yang telah banyak membantu penulis dan selalu memberikan dorongan semangat selama masa perkuliahan hingga selesainya karya tulis ini.
16. Semua pihak yang telah membantu proses penyusunan Tesis ini yang tidak dapat penulis sebutkan satu-persatu.

Penulis menyadari bahwa penyusunan Tesis ini masih memiliki kekurangan.

Oleh sebab itu kritik dan saran sangat diharapkan demi perbaikan karya tulis ini di masa yang akan datang. Semoga Tesis ini dapat memberikan manfaat untuk perkembangan dan kemajuan ilmu pengetahuan, harapan dan doa semoga mendapatkan ridho Allah SWT, Amin.

Malang, 03 Maret 2019

Penulis

ANALISIS PERAN GANDA PADA PEREMPUAN TERDIDIK DALAM PERSPEKTIF SOSIAL - EKONOMI DAN ETNIS DI INDONESIA

Fadhillah Shantika¹, M. Pudjihardjo², Devanto Shasta Pratomo³

Program Magister Ilmu Ekonomi

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya Malang

E-mail: fadhillahshantika@gmail.com

ABSTRAK

Pendidikan bagi perempuan telah menduduki prioritas utama di antara berbagai langkah yang diambil untuk meningkatkan status peran perempuan. Namun, perempuan terdidik di Indonesia seringkali dihadapkan pada keadaan dimana mereka harus memilih antara peran tradisi (*domestik sphere*) dan peran transisi (*public sphere*). Dengan menggunakan data *IFLS waves-5* Tahun 2015 dengan jumlah sample responden mencapai 18.831 individu di Indonesia, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kecenderungan karakteristik sosial (usia, status kawin, tingkat pendidikan), karakteristik ekonomi (tanggung anak dan kondisi ekonomi rumah tangga) dan karakteristik etnis yang didominasi oleh perempuan terdidik di Indonesia (Jawa, Sunda, Minang, Batak, Bali, Betawi, dan Sasak) terhadap keputusan perempuan terdidik di Indonesia sebagai angkatan kerja (*public sphere*) atau yang tergolong bukan angkatan kerja (*domestik sphere*). Data dianalisis menggunakan metode regresi binary logistic. Hasil menunjukkan bahwa perempuan terdidik di Indonesia yang tergolong usia produktif (15-64 tahun), perempuan dengan tingkat pendidikan tinggi khususnya Perguruan Tinggi, perempuan terdidik yang memiliki anak dibawah 15 tahun dan perempuan terdidik yang berada pada kondisi ekonomi rumah tangga yang cukup memiliki kecenderungan untuk masuk ke pasar kerja dan tergolong sebagai angkatan kerja (*Public Sphere*). Sedangkan perempuan terdidik yang telah berstatus menikah cenderung untuk mengurus rumah tangga (*Domestic Sphere*). Dari hasil penelitian ini juga dapat diketahui bahwa perempuan terdidik Etnis Batak dan etnis Bali tergolong sebagai perempuan yang paling besar memiliki kecenderungan untuk berpartisipasi kedalam pasar kerja atau atau tergolong sebagai angkatan kerja di Indonesia (*Public Sphere*).

Keywords : Perempuan Terdidik, Peran Ganda Perempuan, Binary Logistic

JEL Classification : J16, J24

DOUBLE BURDEN ANALYSIS OF HIGHER EDUCATION WOMEN: SOCIO-ECONOMIC AND ETHNIC'S PERSPECTIVES IN INDONESIA

Fadhillah Shantika¹, M. Pudjihardjo², Devanto Shasta Pratomo³

Faculty Of Economic and Business, Brawijaya University

Malang, Indonesia.

E-mail: fadhillahshantika@gmail.com

ABSTRACT

Education for women has been prioritized to improve their status of women's roles. Educated women in Indonesia often have to choose between the traditional role (domestic sphere) and transitional role (public sphere). Using IFLS5 with a sample of 18,831 respondents, the data were analyzed using binary logistic regression method. This study aims to analyse the influence of trends in social characteristics (age, marital status, higher education level), economic characteristics (dependents of children under 15 years old and family's economic conditions) and ethnical characteristics in that Indonesian ethnicities that are dominated by educated women in Indonesia (Javanese, Sundanese, Minang, Batak, Balinese, Betawi, and Sasak) on the role of educated women in Indonesia. The results show that women who are in productive age, women with higher education levels, women with dependents of children under 15 years old and women in families with adequate household conditions tend to to choose public sphere. While educated women who are married have a tendency as housewives (domestic spheres). The tendency of women with university education background tend to be 68% higher for work participation. In addition, the results show that educated women from Batak and Balinese have the greatest tendency to enter the labor market (public sphere) of all other ethnicities in Indonesia.

Keywords: Educated Woman, Double Burden, Ethnicity, Binary Logistic

JEL Classification : J16, J24

KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji syukur kepada Allah SWT, atas limpahan rahmat dan hidayah-Nya penulis dapat menyelesaikan Tesis yang berjudul :
“Analisis Peran Ganda Pada Perempuan Terdidik Dalam Perspektif Sosial -
Ekonomi Dan Etnis Di Indonesia”. Penyusunan Tesis ini ditujukan untuk melengkapi persyaratan dalam mencapai derajat gelar Magister Ekonomi pada Jurusan Ilmu Ekonomi konsentrasi Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya Malang.

Dalam karya tulis ilmiah ini, pokok-pokok bahasan yang disajikan meliputi analisis peran ganda pada perempuan terdidik khususnya yang berpendidikan tinggi yang dilihat dari segi sosial ekonomi dan etnis dalam memutuskan peran nya didalam pasar kerja, dimana perempuan terdidik akan dihadapkan pada keputusan tergolong sebagai angkatan kerja (*Public Sphere*) atau tergolong sebagai bukan angkatan kerja (*Domestic Sphere*).

Penulis menyadari bahwa penyusunan Tesis ini masih memiliki keterbatasan, dengan demikian diharapkan kritik dan saran agar tulisan ini dapat lebih baik dan bermanfaat kedepannya.

Malang, 03 Maret 2019

Penulis



DAFTAR ISI

HALAMAN PENGESAHAN	ii
HALAMAN IDENTITAS KOMISI PEMBIMBING DAN PENGUJI	iii
PERNYATAAN ORISINILITAS TESIS	iv
RIWAYAT HIDUP	v
UCAPAN TERIMAKASIH	vi
ABSTRAK	viii
ABSTRACT	ix
KATA PENGANTAR	x
DAFTAR ISI	xi
DAFTAR GAMBAR	xiii
DAFTAR TABEL	xiv
DAFTAR LAMPIRAN	xv
BAB I	1
PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	15
1.3. Tujuan Penelitian	16
1.4. Manfaat Penelitian	16
BAB II	17
TINJAUAN PUSTAKA	17
2.1 Partisipasi Kerja Perempuan Terdidik dalam Era Bonus Demografi	18
2.2 Pendidikan sebagai <i>Human Investment</i>	22
2.3 Peran Ganda Perempuan Terdidik di Indonesia (<i>Double Burden</i>)	25
2.4 Nilai Budaya dan Etnis pada Partisipasi Kerja Perempuan Terdidik	27
2.5 Hubungan Antar Variabel	32
2.5.1 Karakteristik Sosial	33
2.5.2 Karakteristik Ekonomi	35
2.5.3 Karakteristik Etnis	36
2.6 Penelitian Terdahulu	41
BAB III	48
KERANGKA PIKIR	48
3.1 Kerangka Pikir	48
3.2 Hipotesis	51

BAB IV	52
METODE PENELITIAN	52
4.1 Pendekatan Penelitian	52
4.2 Sumber Data	52
4.3 Populasi dan Sampel	53
4.4 Definisi Operasional Penelitian	54
4.5 Metode Analisis Penelitian	58
4.5.1 Model Regresi Logistik Biner (<i>Binary Logistic Regression</i>)	58
BAB V	66
HASIL DAN PEMBAHASAN	66
5.1 Gambaran Angkatan Kerja Perempuan Terdidik di Indonesia	66
5.2 Gambaran Umum Responden	72
5.2.1 Usia	72
5.2.2 Status Kawin	75
5.2.3 Tingkat Pendidikan	76
5.2.4 Tanggungan anak dibawah 15 tahun	78
5.2.5 Kondisi Ekonomi Rumah Tangga	80
5.2.6 Kelompok Etnis	83
5.3 Hasil Analisis	86
5.3.1 Deteksi Multikolinearitas	86
5.3.2 <i>Hosmer & Lemeshow Goodness of Fit</i>	88
5.3.3 Analisis Regresi Logistik Biner (<i>Binary Logistic Regression</i>)	89
5.4 Implikasi Teoritis Hasil Penelitian	99
5.5 Keterbatasan Ruang Lingkup Penelitian	121
BAB VI	122
PENUTUP	122
6.1 Kesimpulan	122
6.2 Saran	124
DAFTAR PUSTAKA	127

DAFTAR GAMBAR

No.	Judul	Halaman
1.1	Bonus Demografi di Indonesia Tahun 1950 – 2050	1
1.2	Tingkat Pengangguran Usia Produktif di Indonesia Berdasarkan Jenis Kelamin (Dalam %)	3
1.3	Tingkat Pengangguran Terdidik Di Indonesia Menurut Jenis Kelamin Pada Tahun 2016	5
1.4	Kelompok Etnis yang Mendominasi Jumlah Perempuan Terdidik di Indonesia	11
2.1	<i>Backward Bending Supply Curve</i>	21
3.1	Kerangka Pemikiran	50
5.1	Jumlah Penduduk Perempuan Usia Produktif di Indonesia	66
5.2	Status Angkatan Kerja Perempuan Berdasarkan Tingkat Pendidikan Tinggi Di Indonesia	68
5.3	Kontribusi Pendapatan Perempuan di Indonesia Tahun 2011-2017	70
5.4	Konsentrasi Sektor Pekerjaan Perempuan di Indonesia	71
5.5	Angkatan Kerja Perempuan Terdidik Tahun 2015 Berdasarkan Kelompok Usia	72
5.6	Presentase Status Kawin Angkatan Kerja Perempuan di Indonesia Tahun 2015	75
5.7	Angkatan Kerja Perempuan Menurut Pendidikan Tinggi di Indonesia Tahun 2015	76
5.8	Proporsi Perempuan berdasarkan Tanggungan Anak Usia Dibawah 15 Tahun di Indonesia	78
5.9	Proporsi Perempuan berdasarkan Kondisi Ekonomi Keluarga di Indonesia	81
5.10	Kelompok Etnis yang Didominasi dengan Perempuan Terdidik di Indonesia	83

DAFTAR TABEL

No.	Judul	Halaman
1.1	Tingkat Partisipasi Perempuan Terdidik di Indonesia Tahun 2014-2016	7
2.1	Kelompok Etnis Berdasarkan Survey Penduduk 2010 di Indonesia	29
2.2	Rekapitulasi Studi Terdahulu Berdasarkan Berbagai Parameter	43
4.1	Definisi Operasional	57
5.1	Tabulasi Silang Status Angkatan Kerja Perempuan dan Kelompok Usia	74
5.2	Tabulasi Silang Status Angkatan Kerja Perempuan dan Tingkat Pendidikan Tinggi	77
5.3	Tabulasi Silang Status Angkatan Kerja Perempuan dan Tanggungan Anak Dibawah 15 Tahun	79
5.4	Tabulasi Silang Status Angkatan Kerja Perempuan dan Kondisi Ekonomi Keluarga	82
5.5	Tabulasi Perempuan dari Beberapa Etnis Berdasarkan Tingkat Pendidikan Tinggi di Indonesia	83
5.6	Tabulasi Status Angkatan Kerja Perempuan Terdidik pada Beberapa Etnis di Indonesia	84
5.7	Tabulasi Nilai VIF dalam Model	86
5.8	Hasil Hosmer & Lemeshow Goodness of Fit	87
5.9	Hasil Estimasi Rasio <i>Maximum Likelihood</i>	88
5.10	Hasil Estimasi Model Analisis Regresi Logistik Biner	90



DAFTAR LAMPIRAN

No.	Judul	Halaman
Lampiran 1	Tabulasi Angkatan Kerja Perempuan Berdasarkan Usia	135
Lampiran 2	Tabulasi Angkatan Kerja Perempuan Berdasarkan Status Kawin	138
Lampiran 3	Tabulasi Angkatan Kerja Perempuan Berdasarkan Tingkat Pendidikan	139
Lampiran 4	Tabulasi Angkatan Kerja Perempuan dan Tanggungan Anak Dibawah 15 Tahun	141
Lampiran 5	Tabulasi Angkatan Kerja Perempuan dan Kondisi Ekonomi Rumah Tangga	142
Lampiran 6	Tabulasi Etnis yang Di Dominasi oleh Perempuan Terdidik di Indonesia	143
Lampiran 7	Hasil Estimasi Regresi <i>Binary Logistic</i>	145



BAB I PENDAHULUAN

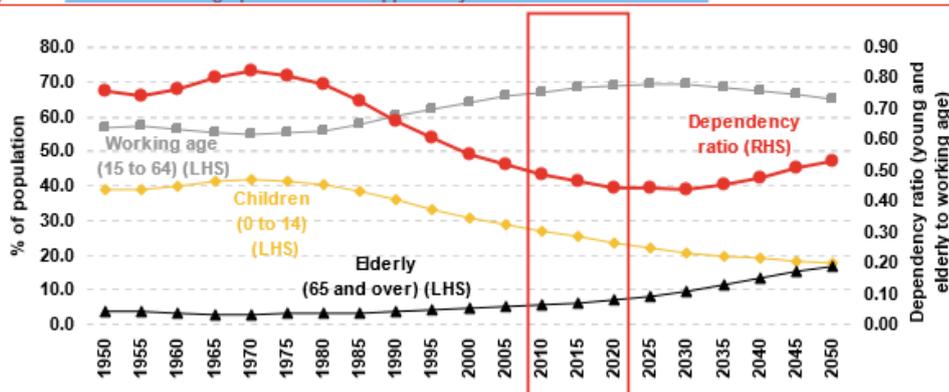
1.1 Latar Belakang

Dalam dekade terakhir ini, Indonesia tengah mengalami fenomena transisi demografi. Menurut *United Nations* (United Nations Development Programme, 2016) transisi demografi akan memberi peluang bagi Indonesia untuk menikmati *demographic dividend* pada periode 2020-2030. Bonus demografi dapat disebut sebagai peluang langka dan bahkan hanya terjadi satu kali dalam era pembangunan suatu negara. Fenomena ini menjadi momentum sebab pertumbuhan penduduk usia produktif (15-64 tahun) lebih tinggi apabila dibandingkan dengan penduduk usia non produktif (Kuncoro, 1997).

Pada era bonus demografi, beban ketergantungan penduduk (*Dependency Ratio*) juga akan semakin rendah. Penjelasan yang lebih mendalam terkait bonus demografi dan jendela peluang di Indonesia dapat dilihat pada gambar 1.1 berikut:

Gambar 1.1
Bonus Demografi di Indonesia Tahun 1950 – 2050

Figure 42: Indonesia's demographic window of opportunity will close in the next decade



Sources: Demographic projections from BPS and UN Statistics.

Sumber : World Bank (2009).

Gambar 1.1 menunjukkan bonus demografi yang terjadi di Indonesia tahun 1950 - 2050. Pada gambar diatas garis abu-abu menunjukkan pertumbuhan penduduk usia produktif (usia 15-64 tahun) yang lebih tinggi daripada

pertumbuhan penduduk usia non produktif yang ditunjukkan dengan garis kuning dan hitam. Berdasarkan hasil Sensus Penduduk 2010 memperlihatkan bahwa penduduk usia 15 – 64 selama 30 tahun terakhir telah berkembang menjadi lebih dari 150 juta jiwa, atau mengalami kenaikan dua kali lipat hingga mencapai proporsi 66% dari populasi. Sedangkan jumlah penduduk usia muda (15-24 tahun) mencapai 26,8 persen atau 64 juta jiwa. Selanjutnya jika dilihat beban ketergantungan penduduk (*Dependency Ratio*) yang digambarkan dengan garis merah, maka tampak bahwa tingkat ketergantungan penduduk Indonesia menunjukkan trend yang menurun cukup tajam, di mana pada tahun 1970-an nilainya sekitar 75% dan pada tahun 2000 menurun hingga ke level 50%.

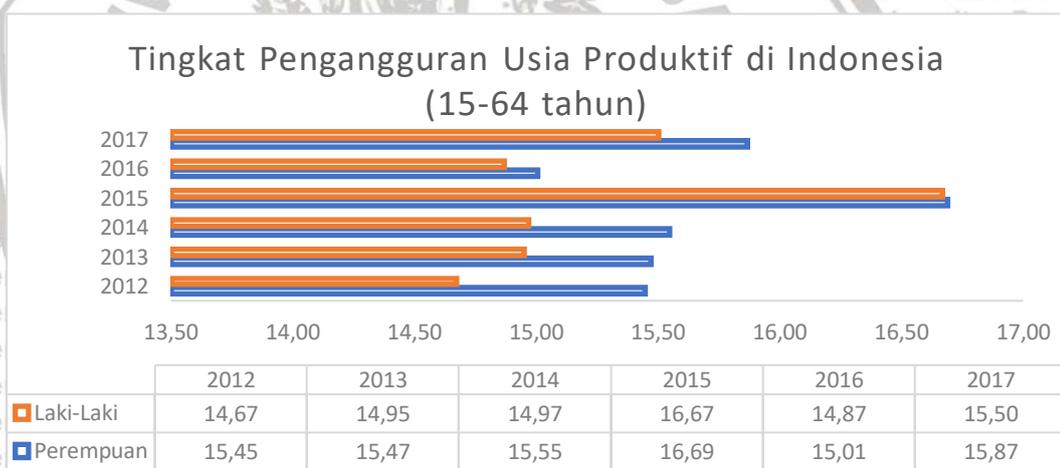
Dalam konsep ekonomi kependudukan, bonus demografi dianggap sebagai jendela kesempatan (*windows of opportunity*) untuk melakukan akselerasi ekonomi (Maryati, 2015). Beberapa negara dianggap telah berhasil memanfaatkan *windows of opportunity* untuk memacu pertumbuhan ekonomi negaranya. Di Singapura peluang bonus demografi mampu memacu pertumbuhan ekonominya hingga mencapai 13,6% dibandingkan sebelumnya hanya sekitar 8%. Begitu pula Thailand yang dapat mendorong pertumbuhannya dari 6,6% meningkat tajam menjadi 15,5%. Namun sebaliknya, apabila suatu negara belum siap dengan fenomena bonus demografi maka justru akan menimbulkan dampak negatif yang dikenal dengan *Demographic Burden*. Peluang Bonus demografi akan dapat terbuang atau bahkan menjadi liabilitas bagi negara-negara yang dihadapkan dengan peningkatan pengangguran sebagai konsekuensi dari ketidakmampuan untuk menyediakan lapangan kerja bagi angkatan kerja produktif yang meningkat (Hakkert, 2007).

Melimpahnya jumlah penduduk produktif akibat dari bonus demografi secara tidak langsung menunjukkan peningkatan angkatan kerja perempuan di Indonesia.

Bonus Demografi dapat memberikan keuntungan ekonomi khususnya bagi

perempuan, sebab jumlah anak yang semakin sedikit memungkinkan perempuan memasuki pasar kerja dan membantu memberi kontribusi terhadap pendapatan keluarga (Maryati, 2015). Tingkat ekspansi ekonomi maksimum atau berkelanjutan sangat ditentukan oleh peningkatan angkatan kerja, dimana salah satunya adalah keterlibatan kelompok perempuan (Zainal & Elpanso, 2017). Namun dalam kenyataannya tenaga kerja produktif khususnya perempuan di Indonesia tersebut belum mampu terserap secara maksimal dalam pasar tenaga kerja. Hal ini menimbulkan tingginya tingkat pengangguran perempuan pada usia produktif di Indonesia. Penjelasan tersebut dapat dilihat pada gambar dibawah ini:

Gambar 1.2
Tingkat Pengangguran Usia Produktif di Indonesia Berdasarkan Jenis Kelamin (Dalam %)



Sumber : The World Bank (2018) , Data diolah.

Pada Gambar 1.2 menunjukkan tingkat pengangguran usia produktif (15-64 tahun) di Indonesia berdasarkan jenis kelamin. Pada data tersebut terlihat bahwa beberapa tahun terakhir, tingkat pengangguran di Indonesia mengalami fluktuasi yang cukup signifikan, di mana pada tahun 2015 lonjakan tingkat pengangguran usia produktif di Indonesia terjadi cukup tinggi dibanding beberapa tahun lainnya. Selain itu, dari segi gender masih terjadi ketimpangan yang cukup jelas. Hal ini

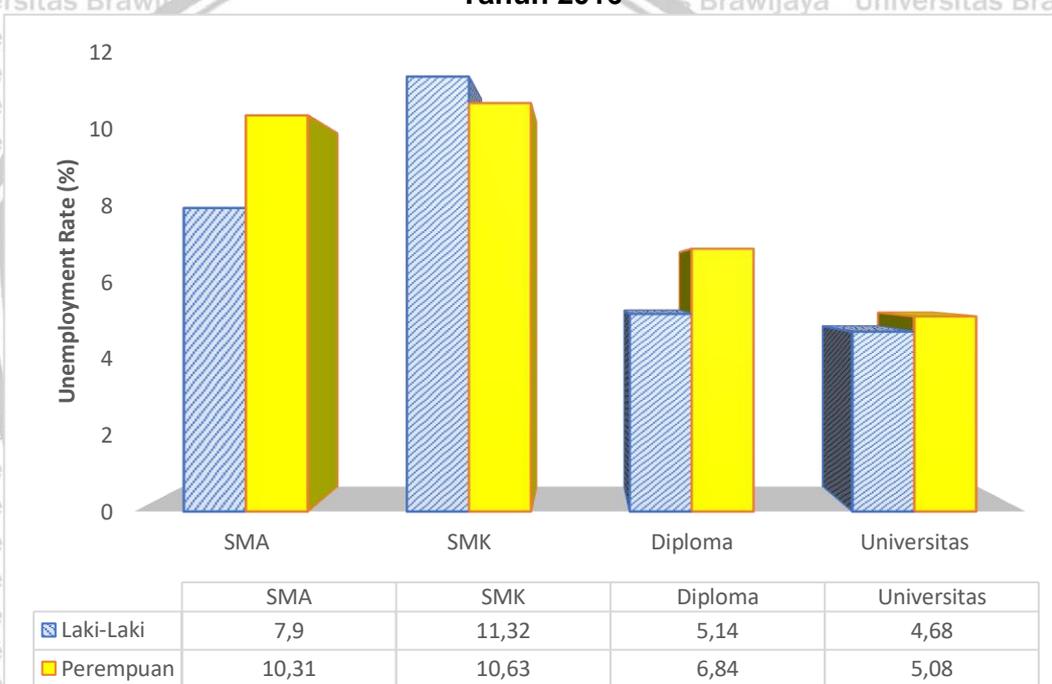
terlihat bahwa tingkat pengangguran di Indonesia masih di dominasi oleh kaum perempuan. Tingkat partisipasi kerja perempuan selalu lebih rendah apabila dibandingkan dengan partisipasi kerja laki-laki, hal ini dipandang karena masih melekatnya persepsi tradisional di masyarakat yang menyatakan bahwa laki-laki dianggap pencari nafkah yang utama bagi keluarga (Simanjuntak, 2001). Munculnya persepsi dan tradisi secara tidak langsung akan mengatur hubungan antara laki-laki dan perempuan di mana hal ini akan menimbulkan ketimpangan kedudukan dan status perempuan terhadap laki-laki yang lebih dikenal dengan fenomena *gender gap* di Indonesia.

Bank Dunia menyatakan bahwa kesetaraan gender mampu memacu produktifitas, dan mendorong pembangunan suatu negara bagi generasi mendatang, serta membuat kelembagaan menjadi semakin representatif (The World Bank, 2011). Hal tersebut sejalan dengan Deklarasi Millennium yang dirumuskan delapan tujuan Pembangunan Millennium yang dikenal dengan *Sustainable Development Goals* (SDGs), di mana salah satu tujuan dari SDGs adalah mendorong kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan dalam hal pendidikan. Simanjuntak (1998) menyatakan bahwa semakin tinggi pendidikan seseorang maka kualitas kerja yang dihasilkan juga semakin baik, diharapkan kesempatan untuk mendapatkan pekerjaan semakin besar. Dengan demikian pendidikan dipandang sebagai "*human investment*" dengan harapan dapat memperoleh pekerjaan yang layak dimasa depan.

Berbagai upaya telah dilakukan oleh Indonesia untuk mendukung program pembangunan dari PBB dalam hal mendorong kesetaraan gender di bidang pendidikan dan tenaga kerja. Namun berdasarkan data BPS 2017 justru menunjukkan fakta menarik yang mengungkapkan bahwa semakin mudahnya akses pendidikan bagi perempuan di Indonesia saat ini belum berdampak

signifikan terhadap pengurangan jumlah pengangguran di Indonesia. Bahkan data menunjukkan jumlah pengangguran di Indonesia justru di dominasi oleh pengangguran terdidik terutama pada lulusan SMK, dimana tingkat pendidikan tersebut sebenarnya disiapkan oleh pemerintah untuk mencetak generasi yang siap memasuki dunia kerja. Penjelasan lebih ringkas dapat dilihat pada table dibawah ini :

Gambar 1.3
Tingkat Pengangguran Terdidik Di Indonesia Menurut Jenis Kelamin Pada Tahun 2016



Sumber : Badan Pusat Statistik (2016), Data diolah.

Gambar 1.3 menunjukkan tingkat pengangguran terdidik di Indonesia berdasarkan jenis kelamin pada tahun 2016. Menurut BPS (2012), bahwa pengangguran terdidik merupakan jumlah pencari kerja yang berpendidikan SMA ke atas (sebagai kelompok terdidik). Setiap tahun jumlah pengangguran terdidik di Indonesia juga mengalami peningkatan yang cukup signifikan. Di mana

pengangguran terdidik tersebut masih didominasi oleh tingkat SMA dan SMK.

Berdasarkan data tersebut dapat diketahui tingkat pengangguran terdidik di Indonesia terbilang tinggi. Pada tahun 2016, rata-rata sebesar 21% tingkat pengangguran terdidik di Indonesia didominasi oleh lulusan SMK. Hal ini menunjukkan bahwa program pemerintah untuk menciptakan sekolah yang dibekali dengan keahlian tertentu dianggap belum tepat sasaran untuk mengurangi tingkat pengangguran di Indonesia. Selain itu, data juga menunjukkan fakta menarik bahwa pada tingkat Pendidikan SMA, Diploma, dan Universitas tingkat pengangguran terdidik di Indonesia lebih didominasi oleh kaum perempuan.

Kendala yang dihadapi saat ini dalam hal mendapatkan pendidikan tinggi menjadi masalah bagi beberapa kalangan masyarakat terutama bagi para perempuan. Bahkan beberapa perempuan menyatakan diminta oleh orang tua mereka untuk menikah setelah lulus dari Sekolah Menengah Atas (SMA). (Putranto, 2018). Pada realitasnya, perempuan dihadapkan pada kenyataan bahwa mereka harus berperan sebagai pekerja (publik-produktif) dan berperan sebagai ibu rumah tangga (domestik-reproduktif) (Hidayati, 2015). Perempuan terdidik seringkali harus memilih antara peran tradisi (*domestik sphere*) dan peran transisi (*public sphere*). Perempuan terdidik berada pada pilihan sukses berkarier sebagai upaya pengembalian atas modal pendidikan tinggi yang telah dikeluarkan, atau menikah dan menjadi ibu rumah tangga yang baik sebagai bentuk peran tradisi.

Perempuan terdidik biasanya telah mengalami perubahan sudut pandang terhadap peran perempuan. Perubahan ini terjadi sebagai hasil dari upaya perempuan untuk menegaskan diri melalui pendidikan dan berkontribusi untuk membebaskan keluarga mereka dari dogma budaya dan sosial di mana perempuan diperlakukan untuk penaklukan dan marginalisasi. (Andoh & Ampofo,

2018). Mudahnya akses pendidikan bagi perempuan di Indonesia telah merubah paradigma tradisional yang mendorong partisipasi perempuan kedalam pasar kerja. Untuk melihat lebih jelas terkait tingkat partisipasi perempuan terdidik di Indonesia dapat dilihat dari tabel dibawah ini:

Tabel 1.1

Tingkat Partisipasi Perempuan Terdidik di Indonesia tahun 2014-2016

Pendidikan Tinggi yang Ditamatkan	Angkatan Kerja				Bukan Angkatan Kerja	
	Bekerja		Pengangguran Terbuka		Mengurus Rumah Tangga	
	2014	2016	2014	2016	2014	2016
SMA	5.881.938	6.830.872	6.727.540	7.615.798	5.483.632	6.166.787
SMK	3.253.894	3.817.861	3.731.086	4.271.914	2.167.296	2.471.167
Diploma	1.540.442	1.803.637	1.648.835	1.935.974	575.013	676.424
Universitas	3.670.310	5.147.839	3.916.823	5.423.238	651.393	951.875
TOTAL	14.346.584	17.600.209	16.024.284	19.246.924	8.877.334	10.266.253

Sumber: Badan Pusat Statistik (2016), Data Diolah.

Tabel 1.1 menunjukkan perbandingan tingkat partisipasi perempuan terdidik di Indonesia pada tahun 2014 hingga 2016. Melihat table diatas ditemukan bahwa proporsi partisipasi perempuan terdidik di Indonesia paling besar adalah pada tingkat pengangguran terbuka. Pada tahun 2014 jumlah pengangguran terdidik perempuan di Indonesia adalah sekitar 16 ribu penduduk dan meningkat tajam

hingga mencapai 19.264.924 penduduk pada tahun 2016. Jumlah pengangguran perempuan terdidik di Indonesia didominasi oleh lulusan SMA. Begitu juga pada jumlah perempuan terdidik yang memilih untuk mengurus rumah tangga setelah menempuh pendidikan tinggi, jumlahnya juga mengalami peningkatan dari tahun 2014 mencapai 8.877.334 jiwa dan mengalami peningkatan hingga mencapai 10.266.253 jiwa.

Berdasarkan data tersebut dapat diketahui sebuah hal yang menarik bahwa ternyata tingkat pendidikan tinggi belum dapat dianggap sebagai sebuah investasi untuk lebih mudah mendapatkan pekerjaan. Selain itu, data juga menunjukkan bahwa perempuan dengan pendidikan tinggi juga ada yang memilih untuk tidak memasuki persaingan di dunia kerja karena mereka lebih memilih untuk mengurus rumah tangga. Padahal menurut teori *Human Investment* menganggap pendidikan sebagai investasi untuk meningkatkan produktivitas seseorang sehingga berdampak pada peningkatan penghasilan dimasa yang akan datang (Subroto, 2014). Tingginya kesadaran perempuan untuk bekerja, tidak sebanding dengan kendala yang akan dihadapi. Pandangan tradisional yang ada dalam masyarakat masih menginginkan perempuan bekerja untuk berperan ganda, yaitu: berperan sebagai pekerja (publik produktif) dan berperan sebagai ibu rumah tangga (domestik-reproduktif). (Hidayati, 2015)

Di Indonesia jumlah penduduk usia kerja saat ini didominasi oleh kaum perempuan. Hal ini menunjukkan bahwa perempuan memiliki peluang yang besar dalam pembangunan perekonomian di Indonesia. Partisipasi perempuan di pasar kerja akan mendorong produktivitas dan efisiensi ekonomi akibat dari pemanfaatan sumber daya yang optimal (Adioetomo, 2017). Pada Tahun 2016, tingkat upah yang didapatkan oleh perempuan yaitu sebesar 41,9%. Angka tersebut lebih kecil dibandingkan persentase pendapatan yang didapatkan laki-laki yaitu sekitar 53,2%. Padahal menurut penelitian yang dilakukan oleh Manning,

Effendi, & Tukiran (1987) menemukan sekitar 40% perempuan memberikan sumbangan tambahan pada penghasilan keluarga. Bahkan pada keluarga yang berpenghasilan rendah, sumbangan dari penghasilan perempuan mencapai 50%.

Data Badan Pusat Statistik (2016) juga menunjukkan bahwa sumbangan pendapatan perempuan di Indonesia terhadap keluarga mengalami peningkatan setiap tahunnya, tercatat dari tahun 2012 perempuan menyumbang 34,70% dan meningkat hingga 36,42% pada 2016. Mendukung penelitian tersebut, data *World*

Bank tercatat bahwa perempuan lebih memiliki kontribusi besar menunjang perekonomian keluarga yaitu sebesar 26% jika dibandingkan dengan kontribusi laki-laki hanya sekitar 6,1% (The World Bank, 2018). Selain itu penelitian Hastuti (2011) juga mengungkapkan bahwa tenaga kerja terdidik perempuan dianggap lebih memiliki keunggulan kompetitif dibandingkan dengan laki-laki, sebab tenaga kerja terdidik perempuan cenderung lebih teliti, rajin, dan taat pada peraturan atasan sehingga tidak banyak menimbulkan kesulitan dalam penerapan kebijakan perusahaan. Melihat fakta yang menarik tersebut, keterlibatan perempuan di Indonesia dipandang perlu menjadi salah satu fokus pemerintah dalam langkah pembangunan suatu negara.

Tuntutan sosial dan ekonomi rumah tangga yang cukup berat mendorong perempuan mencari nafkah untuk menambah penghasilan keluarga (Dewi, 2012).

Menurut Haryanto (2008) peningkatan partisipasi perempuan dalam kegiatan ekonomi disebabkan oleh beberapa hal yaitu adanya perubahan pandangan dan sikap masyarakat tentang pentingnya pendidikan dan kesadaran untuk

berpartisipasi dalam pembangunan bagi kaum perempuan. Selain tuntutan ekonomi, keputusan perempuan untuk berpartisipasi kedalam pasar kerja dipengaruhi oleh faktor sosial demografis antara lain usia, status kawin, pendidikan dan daerah tempat tinggal (Maulida, 2012). Latar belakang karakteristik sosial demografi yang rendah pada perempuan akan berpengaruh terhadap keputusan

partisipasi kerja perempuan. Selain itu potensi perempuan dalam menggerakkan roda perekonomian di Indonesia tidak terlepas dari keragaman budaya dan etnis.

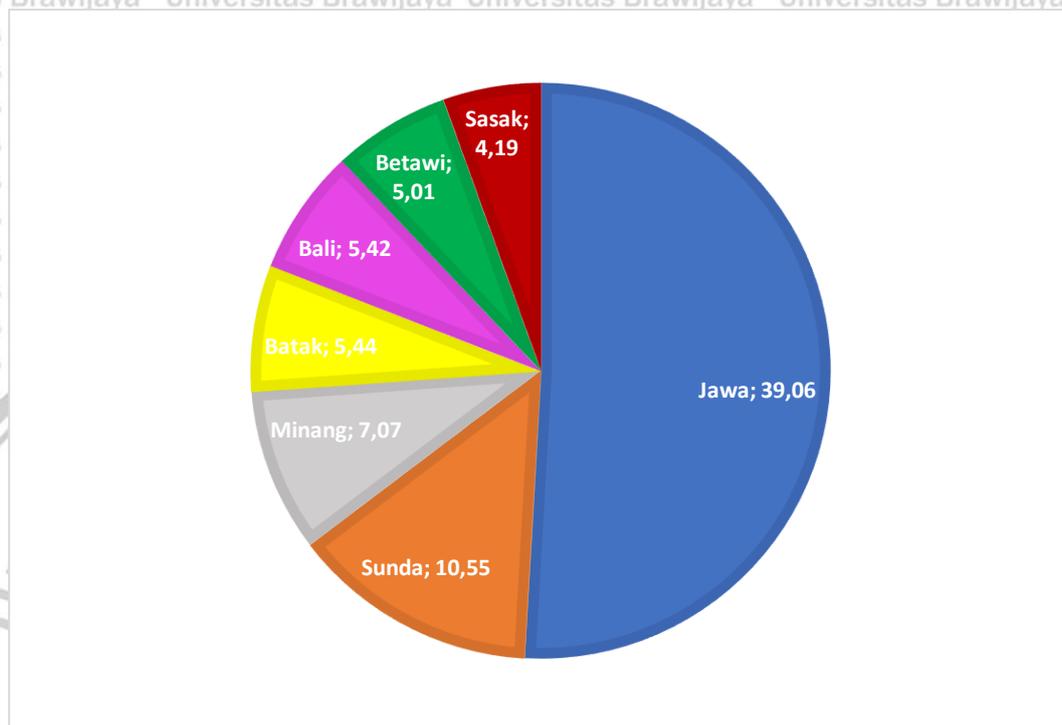
Nilai budaya dari masing-masing etnis mempengaruhi partisipasi kerja perempuan terdidik di Indonesia sebab Indonesia merupakan negara multietnik dimana tiap-tiap etnis memiliki sudut pandang yang berbeda terkait peran perempuan yang bekerja dalam keluarga.

Kelompok etnis dapat diartikan sama seperti suku bangsa, yaitu kumpulan individu atau masyarakat yang memiliki karakter fisik dan non fisik yang sama terutama dalam kebudayaan, bahasa, dan adat istiadat (Arfah, 2011). Nilai budaya pada setiap kelompok etnis sering dikaitkan sebagai identitas budaya, karena latar belakang kehidupan sosial seseorang dapat mewarnai kebebasan cara, gaya, perilaku berusaha. Identitas budaya seseorang juga berpengaruh terhadap kemampuan kerja (Sangen, 2005). Nilai budaya sendiri merupakan elemen yang sangat penting dalam pemahaman mengenai masyarakat, dalam analisis tentang perbedaan diantara mereka dalam menjelaskan perkembangan ekonomi mereka (Huntington, 2000). Sistem nilai budaya yang berkembang dalam masyarakat telah menjadi pedoman ideal dalam menyikapi obyek tertentu, tidak kecuali terhadap keterlibatan perempuan kedalam pasar kerja.

Berdasarkan buku ensiklopedia suku bangsa di Indonesia dan merujuk pada buku pedoman pengolahan SP2010, jumlah etnis yang ada di Indonesia secara keseluruhan mencapai lebih dari 1.300 suku bangsa (Badan Pusat Statistik, 2011).

Berdasarkan data IFLS Wave-5 Tahun 2015 dapat diketahui beberapa kelompok etnis yang memiliki jumlah perempuan terdidik yang paling dominan di Indonesia diantaranya yaitu Jawa, Sunda, Minang, Batak, Bali, Betawi, dan Sasak. Berikut adalah proporsi beberapa Kelompok Suku Bangsa atau etnis yang dominan di Indonesia dilihat dari segi jumlah perempuan terdidiknya berdasarkan IFLS (2015):

Gambar 1.4
Kelompok Etnis yang Mendominasi Jumlah Perempuan Terdidik di
Indonesia



Sumber: IFLS,2015 (Data Diolah).

Dari tabel tersebut nampak bahwa menurut jumlah perempuan terdidik di Indonesia, Etnis yang paling mendominasi di Indonesia ialah Etnis Jawa dengan populasi sekitar 95,2 juta jiwa (39,06%) dari populasi penduduk Indonesia. Etnis Jawa ini terdiri dari perpaduan dari Etnis Jawa, Osing, Tengger, Samin, Bawean/Boyan, Naga, Nagaring dan suku-suku lainnya di Pulau Jawa. Etnis bangsa terbesar kedua berikutnya adalah Etnis Sunda dengan proporsi mencapai sekitar 10,55% yang tersebar diwilayah Provinsi Jawa Barat, Banten, Jakarta, dan Lampung. Kemudian Etnis yang didominasi oleh perempuan terdidik ketiga adalah Etnis Minang yang mencapai 7,07% dimana wilayah etnis Minang ini meliputi Sumatera Barat, Riau, bagian utara Bengkulu, bagian barat Jambi, pantai barat

Sumatera Utara, dan Barat Daya Aceh. Kemudian Etnis Batak sebanyak 8,5 juta (5,44 %) yang mencakup Etnis Batak Angkola, Batak Karo, Batak Mandailing, Batak Pakpak Dairi, Batak Simalungun, Batak Tapanuli, Batak Toba dan Dairi. Selanjutnya yang terkenal dengan kegigihan perempuannya yaitu Etnis Bali yang mencapai 5,42% dilanjutkan oleh etnis Betawi 5,01% dan Etnis Sasak mencapai 4.19% yang meliputi wilayah Lombok.

Beberapa etnis yang mendominasi di Indonesia tersebut memiliki pandangan nilai etnis dan budaya yang beragam terkait partisipasi perempuan ke dalam pasar kerja. Keterlibatan perempuan dalam mewujudkan keserasian sosial pada masyarakat multietnik di Indonesia menunjukkan bahwa kaum perempuan tidak lagi dianggap sebagai *konco wingking* yang hanya memiliki peran domestik sebagai istri dan ibu rumah tangga untuk mengurus anak dan suami (Shonhaji, 2017). Penelitian Siregar (2007) mengungkapkan bahwa mayoritas perempuan yang bekerja di Indonesia berasal dari etnis Batak dan Jawa. Kedua etnis ini yang paling terkenal dengan kegigihan, serta kemampuan mengaktualisasi diri dalam masyarakat modern.

Namun berbeda halnya pada budaya etnis Sunda dimana dikenal ungkapan yang mengharuskan wanita turut atau tunduk kepada suami seperti "*Najan kaliang cocopet ge kudu milu*" (ke dalam lubang kutu lantai pun harus ikut), yaitu dibawa ketempat yang penuh kesulitan sekalipun wanita itu wajib patuh mengikuti suaminya (Marlina, 2006). Bahkan menurut pandangan tradisional pada Etnis Betawi juga menunjukkan pandangan yang sama terkait partisipasi kerja perempuan yang bergantung pada sikap laki-laki Betawi. Perempuan Betawi menganggap suami sebagai pengambil keputusan dalam keluarga, dimana para lelaki Betawi yang ternyata tidak suka apabila para istri mereka bekerja di luar rumah (Ahyat, 2015). Nilai keragaman budaya dalam masing-masing etnis pada

akhirnya akan menentukan peran perempuan yang berbeda dalam kegiatan ekonomi di Indonesia sehingga hal ini sangat menarik untuk diteliti.

Penelitian tentang partisipasi perempuan sebelumnya telah dilakukan diantaranya oleh Setyowati (2009) yang meneliti faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat partisipasi perempuan dalam angkatan kerja di Jawa tengah menunjukkan bahwa dalam jumlah penduduk perempuan yang mengurus rumah tangga dan jumlah penduduk perempuan yang masih bersekolah mempunyai pengaruh yang negatif terhadap tingkat partisipasi perempuan dalam angkatan kerja.

Adapun penelitian lain yang dilakukan oleh Harahap (2014) yang meneliti tentang analisis makro tenaga kerja perempuan dalam pembangunan di Indonesia menjelaskan bahwa keterlibatan perempuan dalam kegiatan ekonomi tidak terlepas dari adanya peluang bagi perempuan untuk mendapatkan pendidikan dan kesempatan berkarir yang semakin terbuka. Investasi dalam pendidikan perempuan akan mempercepat pembangunan ekonomi dan sosial dengan meningkatkan modal manusia, memperlambat pertumbuhan penduduk, dan mengurangi kemiskinan. (Okorie, 2013).

Pendidikan dipandang sebagai suatu investasi sesuai dengan *Human Capital Theory* yang menganggap pendidikan sebagai upaya untuk mencapai kemajuan dan kesejahteraan dimasa mendatang, sedangkan kegagalan pendidikan akan melahirkan masalah yang cukup krusial seperti pengangguran (Subroto, 2014). Namun menurut penelitian yang dilakukan oleh Sarkar (2008) justru menyatakan dalam beberapa tahun terakhir, ada indikasi bahwa peningkatan lebih cepat dalam bidang pendidikan dalam pasokan tenaga kerja perempuan usia muda telah menyebabkan tingkat pengangguran kaum muda perempuan yang lebih tinggi dan yang pada gilirannya telah meningkatkan tingkat pengangguran perempuan jangka panjang.

Berdasarkan pemaparan fenomena dan perbedaan beberapa hasil penelitian, maka menarik bagi penulis untuk meneliti fenomena terkait partisipasi perempuan terdidik jika dikaitkan dengan latar belakang Indonesia yang multi-etnik. Nilai budaya dari masing-masing etnis mempengaruhi sudut pandang yang berbeda terkait peran perempuan yang bekerja dalam keluarga. Perempuan terdidik di Indonesia juga dihadapkan dengan peran ganda (*double burden*) yaitu peran tradisi (*domestik sphere*) merupakan peran perempuan sebagai istri, ibu dan pengelola rumah tangga dan di sisi lain juga peran transisi (*public sphere*) yang mencakup peran perempuan dalam angkatan kerja, anggota masyarakat dan manusia pembangunan.

Penelitian terkait partisipasi perempuan khususnya pada perempuan terdidik dari latar belakang etnis belum banyak diteliti di Indonesia. Penelitian ini diharapkan mampu berkontribusi bagi masyarakat dan khususnya pemerintah untuk menentukan langkah-langkah yang perlu dilakukan untuk mendorong partisipasi perempuan terdidik dalam rangka menghadapi bonus demografi agar era ini dapat dimanfaatkan sebagai peluang untuk meningkatkan perekonomian nasional dari berbagai macam etnis dan budaya sehingga tidak menjadi gelombang pengangguran massal. Oleh karena itu, penelitian ini berjudul **Analisis**

Peran Ganda Pada Perempuan Terdidik Dalam Perspektif Sosial - Ekonomi Dan Etnis Di Indonesia.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, secara konsep dapat dijelaskan bahwa bonus demografi menjadi keuntungan ekonomi tersendiri bagi kaum perempuan yang ditandai dengan peningkatan partisipasi kaum perempuan di pasar tenaga kerja akibat dari penurunan jumlah anak. Selain itu, peningkatan partisipasi kerja perempuan di Indonesia juga didukung dengan semakin mudahnya akses pendidikan yang sejalan dengan program *Sustainable Development Goals* (SDGs). Hal ini secara tidak langsung mendorong peningkatan jumlah perempuan produktif dan terdidik di Indonesia.

Namun kenyataannya perempuan terdidik seringkali harus dihadapkan dengan peran ganda (*double burden*) bahwa mereka harus berperan sebagai pekerja (*public sphere*) atau mengurus rumah tangga (*domestik sphere*). Latar belakang karakteristik sosial demografi dan ekonomi pada perempuan akan berpengaruh terhadap keputusan partisipasi kerja perempuan. Selain itu potensi perempuan dalam menggerakkan roda perekonomian di Indonesia tidak terlepas dari keragaman budaya dan etnis, dimana tiap-tiap etnis memiliki sudut pandang yang berbeda terkait peran perempuan yang bekerja dalam keluarga. Beranjak dari permasalahan yang telah dipaparkan diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah :

Bagaimana kecenderungan karakteristik sosial (usia, status kawin, tingkat pendidikan), karakteristik ekonomi (tanggung jawab anak dibawah 15 tahun dan kondisi ekonomi rumah tangga) serta beberapa Etnis yang didominasi oleh perempuan terdidik di Indonesia (Jawa, Sunda, Minang, Batak, Bali, Betawi, dan Sasak) terhadap peran perempuan terdidik di Indonesia dalam memutuskan untuk masuk kepasar kerja (*Peran Publik*) atau memutuskan untuk mengurus rumah tangga (*Peran Domestik*) ?

1.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dijelaskan, maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

Untuk menganalisis kecenderungan karakteristik sosial (usia, status kawin, tingkat pendidikan), karakteristik ekonomi (tanggungan anak dibawah 15 tahun dan kondisi ekonomi rumah tangga) serta beberapa Etnis yang didominasi oleh perempuan terdidik di Indonesia (Jawa, Sunda, Minang, Batak, Bali, Betawi, dan Sasak) terhadap peran perempuan terdidik di Indonesia dalam memutuskan untuk masuk kepasar kerja (*Peran Publik*) atau memutuskan untuk mengurus rumah tangga (*Peran Domestik*).

1.4. Manfaat Penelitian

Berdasarkan penjelasan diatas, adapun manfaat dari penelitian ini meliputi :

1.4.1 Manfaat Praktis :

Sebagai bahan pertimbangan bagi para pengambil kebijakan di jajaran Pemerintah maupun instansi terkait dalam menetapkan kebijakan khususnya bagi perempuan dalam memperoleh akses dibidang pendidikan dan ketenaga kerjaan di mana tujuan utamanya yaitu untuk mendorong partisipasi kerja perempuan khususnya perempuan terdidik dari beragam etnis dan budaya dalam menggerakkan roda perekonomian di Indonesia serta memanfaatkan peluang bonus demografi.

1.4.2 Manfaat Akademis:

Sebagai bahan informasi yang mendalam dan memperluas wawasan bagi pihak-pihak yang melakukan studi terkait partisipasi perempuan terdidik khususnya dilihat dari segi etnis dan budaya dalam memanfaatkan fenomena bonus demografi di Indonesia.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

Dalam bagian ini selain membahas teori yang menjadi landasan dalam penelitian terkait partisipasi kerja perempuan terdidik yaitu *Labor Supply Theory* yang dilihat dari segi etnis dan budaya di Indonesia, maka akan dijelaskan secara singkat pula beberapa teori pendukung yang berkaitan dengan tujuan penelitian. Partisipasi kerja perempuan terdidik berkaitan dengan teori *Human Investment* dimana pendidikan dianggap sebagai investasi untuk seseorang dapat meningkatkan penghasilannya melalui peningkatan pendidikan. Setiap satu jenjang pendidikan yang telah dituntaskan, berarti bahwa disatu pihak diharapkan mampu meningkatkan kemampuan kerja untuk dapat memperoleh pendapatan yang lebih baik, dan dipihak lain menunda penerimaan penghasilan selama beberapa tahun dalam mengikuti pendidikan tersebut.

Munculnya kesadaran perempuan terhadap pendidikan didukung dengan mudahnya berbagai akses perempuan untuk mendapat pendidikan secara tidak langsung mendorong peningkatan angka partisipasi kerja perempuan terdidik di Indonesia. Dalam keadaan seperti ini, perempuan sering dihadapkan dengan peran ganda yang dijelaskan dalam konsep *dualisme cultural*, yang menyebutkan bahwa peran ganda meliputi partisipasi perempuan menyangkut peran tradisi (*domestik sphere*) dan transisi (*public sphere*). Kondisi ini semakin kompleks jika dikaitkan dengan latar belakang Indonesia yang multi etnik. Beragam nilai budaya yang terbentuk dari bermacam etnis di Indonesia tentu mempengaruhi keputusan perempuan di Indonesia untuk terlibat ke dalam pasar kerja.

2.1 Partisipasi Kerja Perempuan Terdidik dalam Era Bonus Demografi

Bonus Demografi (*demographic dividend*) yang terjadi di Indonesia merupakan sebuah keberhasilan kebijakan kependudukan menurunkan tingkat fertilitas, meningkatkan kualitas kesehatan dan tercapainya program Keluarga Berencana (KB). Keberhasilan program keluarga berencana di Indonesia mewujudkan sebuah kondisi di mana pertumbuhan penduduk usia produktif lebih besar dibanding penduduk usia non produktif. Peningkatan jumlah penduduk usia produktif tersebut berpotensi menjadi *engine of growth* bagi perekonomian di Indonesia. Kondisi tersebut dikenal sebagai *windows of opportunity* bagi suatu negara untuk melakukan akselerasi ekonomi akibat peningkatan angkatan kerja produktif (Jati, 2015).

Teori bonus demografi menjelaskan semakin rendah rasio ketergantungan jumlah penduduk usia non produktif terhadap penduduk usia produktif akan berdampak pada pertumbuhan ekonomi yang lebih baik. Idealnya pertumbuhan ekonomi secara maksimal akan terjadi ketika rasio ketergantungan berada di bawah angka 50% (Maryati, 2015).

Bonus demografi hanya dapat direalisasikan apabila investasi modal manusia (*Human Investment*) telah dilakukan dalam kesehatan dan pendidikan khususnya bagi para angkatan kerja produktif, serta tersedianya lapangan pekerjaan akibat adanya peningkatan jumlah penduduk usia produktif tersebut. Dengan demikian para tenaga kerja usia produktif dapat menyadari potensi yang dimiliki sehingga meningkatkan status ekonomi dan pembangunan suatu negara.

Investasi modal manusia (*Human Investment*) pada penduduk usia produktif di masa transisi demografi harus mampu dimanfaatkan dengan baik agar peluang ini tidak berbalik menjadi ancaman yang akan mampu menambah beban negara. Ancaman bonus demografi yang dimaksud yaitu seperti lonjakan jumlah tenaga kerja yang besar, tidak berpendidikan, tidak sehat, kurang terampil. Hal ini yang

menciptakan tingginya tingkat pengangguran yang akan menjadi beban bagi negara dan mengancam stabilitasnya (Hakkert, 2007).

Bonus Demografi mampu memberikan keuntungan ekonomi jika telah memenuhi persyaratan sebagai berikut (Maryati, 2015):

- 1) Penawaran tenaga kerja (*labor supply*) yang besar dengan kualitas yang memenuhi kebutuhan pasar tenaga kerja
- 2) Meningkatkan pendapatan per kapita karena mendapat kesempatan kerja yang produktif;
- 3) Peningkatan peranan kaum perempuan di pasar tenaga kerja karena jumlah anak yang semakin sedikit memungkinkan perempuan memasuki pasar kerja dan membantu peningkatan pendapatan keluarga
- 4) Terjadi peningkatan tabungan (*savings*) masyarakat yang diinvestasikan secara produktif
- 5) Adanya peningkatan investasi sumber daya manusia (*human capital*)

Di Indonesia jumlah penduduk usia kerja saat ini didominasi oleh kaum perempuan. Hal ini menunjukkan bahwa perempuan memiliki peluang yang besar untuk menggerakkan roda perekonomian di Indonesia. "Partisipasi perempuan di pasar kerja akan mendorong produktivitas dan efisiensi ekonomi akibat dari pemanfaatan sumber daya yang optimal" (Adioetomo, 2017). Akan tetapi, angka partisipasi perempuan di pasar kerja hingga saat ini masih lebih rendah daripada laki-laki.

Melalui akses pendidikan yang lebih tinggi dan lebih mudah tentunya perempuan saat ini lebih memiliki harapan untuk mengaktualisasikan diri dengan berpartisipasi dan berkontribusi bagi kesejahteraan negara. Peningkatan partisipasi perempuan di pasar kerja juga akan membantu meningkatkan

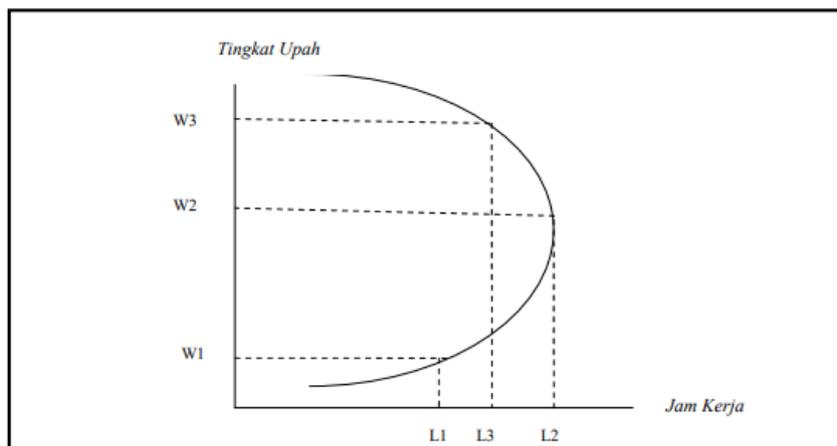
produktivitas yang akan memacu pertumbuhan ekonomi. (Adioetomo, 2017)

Melihat potensi yang besar tersebut, peningkatan peran kaum perempuan dalam era bonus demografi harus dapat dioptimalkan.

Partisipasi kerja perempuan erat hubungannya dengan kurva penawaran tenaga kerja. Kurva penawaran tenaga kerja menggambarkan keterkaitan keputusan pekerja mengenai *tradeoff* antara bekerja dan waktu luang (Maulida, 2012). Menurut Becker (1976), kepuasan seseorang diperoleh melalui konsumsi atau menikmati waktu luang (*leisure*), sedangkan kendala yang dihadapi seseorang adalah tingkat pendapatan dan waktu. Bekerja mengurangi waktu seseorang untuk menikmati waktu luang yang lebih sedikit, sehingga seseorang hanya akan memilih bekerja jika memperoleh kompensasi dalam bentuk pendapatan, sehingga solusi dari permasalahan individu ini adalah jumlah jam kerja yang ingin ditawarkan pada tingkat upah dan harga tertentu.

Pergerakan pada kurva penawaran dipengaruhi oleh tingkat upah yang mempengaruhi para pekerja dalam menentukan jumlah jam kerja mereka. Dengan asumsi waktu yang terbatas, jumlah jam kerja yang lebih banyak mengakibatkan seorang pekerja akan menikmati waktu luang yang lebih sedikit. Namun slope kurva penawaran tidak selalu positif. Ketika upah meningkat, biaya kesempatan dari waktu luang menjadi lebih besar, namun disisi lain tingkat kesejahteraan pekerja lebih tinggi dibanding sebelumnya. Dengan adanya kesejahteraan tambahan, beberapa pekerja mungkin berpendapat bahwa mereka mampu menikmati waktu luang yang lebih banyak. Dengan kata lain, upah yang lebih tinggi mampu mendorong pekerja untuk memilih bekerja dengan jam kerja yang lebih sedikit sehingga menyebabkan kurva penawaran tenaga kerja akan menurun (Mankiw, 2006).

Gambar 2.1 : *Backward Bending Supply Curve*



Sumber : Saleh (2008)

Pada gambar 2.1 diatas, kurva penawaran tenaga kerja mempunyai bagian yang melengkung ke belakang. Pada tingkat upah tertentu penyediaan waktu kerja individu akan bertambah apabila upah bertambah (dari W ke W_1). Setelah mencapai upah tertentu (W_1), pertambahan upah justru mengurangi waktu yang disediakan oleh individu untuk keperluan bekerja (dari W_1 ke W_N). Hal ini disebut *Backward Bending Supply Curve*. Ketika kebutuhan hidup seseorang yang bekerja belum terpenuhi, maka orang tersebut akan bersedia untuk menambah jumlah jam kerja dari L_1 ke L_2 agar pendapatan yang diterima meningkat dari W_1 menjadi W_2 sehingga kebutuhan hidupnya dapat terpenuhi. Namun ketika tingkat pendapatannya naik dari W_2 menjadi W_3 maka jumlah jam kerja akan dikurangi dari L_2 - L_3 karena pendapatan orang tersebut dianggap telah melebihi dari kebutuhan yang diperlukan. Upah yang lebih tinggi mengakibatkan seseorang dapat bekerja dengan jam yang lebih sedikit untuk mempertahankan pola konsumsi barang dan jasa yang sama. Karena upah yang lebih tinggi berarti individu dapat membeli lebih banyak barang. Akibatnya, pekerja tersebut akan menggantikan jam bekerjanya untuk bersantai dan menikmati hasil pendapatannya (Maryam, 2018).

Dalam hal kenaikan tingkat upah, terdapat dua kondisi berbeda diantara status ekonomi rumah tangga (Simanjuntak, 2001). Pada rumah tangga dengan status ekonomi lebih tinggi, seseorang cenderung meningkatkan konsumsi dan menikmati waktu luang (*leisure*) yang berarti mengurangi jam kerja (*Income Effect*). Berbeda halnya pada rumah tangga dengan status ekonomi yang lebih rendah mendorong seseorang untuk mensubstitusikan waktu luangnya untuk bekerja demi mendapatkan tambahan pendapatan (*Substitution Effect*).

Pada negara sedang berkembang seperti Indonesia, dimana pendapatan masyarakat yang relatif rendah, efek substitusi tentu lebih besar dari efek pendapatan. Dengan kata lain, ketika terjadi kenaikan upah, orang akan menambah jam kerja dengan tujuan pemenuhan kebutuhan hidup (Simanjuntak, 2001). Sama halnya dalam keluarga, ketika kondisi keuangan keluarga berada dalam kondisi yang relatif rendah maka perempuan akan mengambil peran untuk memutuskan terlibat kedalam dunia kerja.

2.2 Pendidikan sebagai *Human Investment*

Pendidikan adalah instrumen yang paling penting dalam proses pengembangan kualitas sumber daya manusia, tak terkecuali perempuan. Pendidikan perempuan telah menduduki prioritas utama di antara berbagai langkah yang diambil untuk meningkatkan status perempuan (Naik & Gandhe, 2002). Pendidikan perempuan dianggap sebagai salah satu langkah untuk penerapan perubahan sosial. Dalam beberapa dekade, telah terjadi pergeseran paradigma tentang perempuan atas peran tradisionalnya sebagai ibu rumah tangga menjadi seseorang yang memiliki kontribusi besar bagi keluarga dan pendapatan nasional.

Teori *Human Capital* beranggapan bahwa seseorang dapat meningkatkan penghasilannya melalui peningkatan pendidikan. Setiap satu jenjang pendidikan

yang telah dituntaskan, berarti bahwa disatu pihak diharapkan mampu meningkatkan kemampuan kerja untuk dapat memperoleh pendapatan yang lebih baik, dan dipihak lain menunda penerimaan penghasilan selama beberapa tahun dalam mengikuti pendidikan tersebut. Menurut Simanjuntak (1998), semakin tinggi tingkat pendidikan seseorang semakin baik pula kualitas kerja yang dihasilkan sehingga kesempatan untuk mendapatkan pekerjaan semakin besar. Hal ini berkaitan dengan konsep *opportunity cost* dimana ketika seseorang memilih untuk mengenyam pendidikan tinggi, mereka akan mengorbankan pendapatan yang akan didapatkan jika seandainya mereka memilih untuk bekerja. Pada satu sisi, mereka akan kehilangan empat tahun gaji kerja ketika mereka memilih untuk mengenyam pendidikan, namun di sisi yang lain, Seseorang tersebut berharap untuk mendapatkan gaji yang lebih besar nantinya dari pendidikan tinggi untuk mengganti kerugian mereka yang tidak bekerja selama 4 tahun tersebut.

Berdasarkan *Human capital theory* menyatakan bahwa pendidikan formal dan informal merupakan faktor penting yang dibutuhkan untuk dapat meningkatkan kapasitas produksi (Schultz, 2004). Secara umum dapat dinyatakan bahwa sumber daya manusia tersebut dihasilkan dari proses pendidikan. Dengan kata lain, populasi yang berpendidikan merupakan populasi yang produktif (Okemakinde & Olaniyan, 2008). Manfaat utama pendidikan adalah mengurangi risiko untuk menjadi pengangguran. (Mincer, 1991). Dengan demikian pendidikan dipandang sebagai "*human investment*" dengan harapan dapat memperoleh pekerjaan yang layak dimasa depan. Pada masyarakat yang tengah berkembang, pendidikan dianggap sebagai sarana untuk peningkatan kesejahteraan melalui pemanfaatan kesempatan kerja yang ada. Dengan kata lain, tujuan akhir dari pendidikan bagi masyarakat adalah teraihnya lapangan kerja sesuai yang diharapkan.

Dalam kenyataannya, pendidikan tidak lagi menjadi sebuah investasi yang memudahkan seseorang untuk mendapatkan pekerjaan. Peralihan pada beberapa tahun terakhir ini, Indonesia memacu investasi dalam bidang sumber daya manusia khususnya pendidikan sebagai tujuan pembangunan ekonomi yang berkelanjutan. Rata-rata sebesar 20% anggaran pemerintah digunakan untuk sektor pendidikan, namun faktanya dana tersebut belum berdampak secara signifikan terhadap kualitas pendidikan di Indonesia. Data menunjukkan tingkat pengangguran tertinggi justru didominasi oleh pengangguran terdidik khususnya perempuan.

Peningkatan terus-menerus dalam jumlah lulusan kategori pendidikan tertentu pada tingkat pengangguran menunjukkan bahwa sistem pendidikan membutuhkan reformasi (Galal, 2002). Kesalah pahaman tentang komitmen pemerintah untuk pendidikan gratis justru tidak berdampak pada peningkatan kualitas pendidikan setiap individu. Paradoks pendidikan dan pengangguran jika terus berlanjut tentu akan berdampak buruk pada prospek pembangunan. Bahkan menurut penelitian dari Sarkar (2008) menunjukkan dalam beberapa tahun terakhir, ada indikasi bahwa peningkatan lebih cepat dalam bidang pendidikan dalam pasokan tenaga kerja perempuan usia muda telah menyebabkan tingkat pengangguran kaum muda perempuan yang lebih tinggi, yang pada gilirannya telah meningkatkan tingkat pengangguran perempuan jangka panjang.

2.3 Peran Ganda Perempuan Terdidik di Indonesia (*Double Burden*)

Perempuan memiliki peran yang sangat penting dalam pembangunan suatu negara. Pada realitasnya, perempuan dihadapkan pada kenyataan bahwa mereka harus berperan sebagai pekerja (publik-produktif) dan berperan sebagai ibu rumah tangga (domestik-reproduktif) (Hidayati, 2015). Akibatnya mereka mengalami beban yang berlipat ganda.

The Developmental Theory of Gender Realignment berasumsi bahwa masyarakat tradisional dicirikan oleh peran gender yang berbeda secara jelas yang tidak mendorong perempuan untuk pekerjaan di luar rumah. Hampir semua masyarakat pra-industri menekankan melahirkan anak dan membesarkan anak sebagai tujuan utama bagi perempuan, dan fungsi terpenting mereka dalam kehidupan; karier sebagai tenaga kerja yang dibayar didominasi oleh laki-laki (Inglehart, & Norris, 2000).

Pada dasarnya pekerjaan laki-laki dan perempuan sangat berbeda, baik lintas sektor, industri, pekerjaan, jenis pekerjaan, atau jenis perusahaan. Sementara perbedaan-perbedaan ini berevolusi dengan perkembangan ekonomi, perubahan yang dihasilkan dalam struktur ketenagakerjaan tidak cukup untuk menghilangkan pemilahan kerja berdasarkan gender. Dengan demikian perempuan di seluruh dunia tampaknya terkonsentrasi di pekerjaan dengan produktivitas rendah dan jarang mendapat tempat di naik posisi kekuasaan yang biasa diduduki oleh laki-laki di pasar tenaga kerja.

Dalam masyarakat pasca-industri, peran gender semakin konvergen karena revolusi struktural dalam tenaga kerja yang dibayar, dalam kesempatan pendidikan bagi perempuan, dan dalam karakteristik keluarga modern (Inglehart & Norris, 2000). Pada saat itu, peraturan-peraturan yang melarang perempuan yang sudah menikah untuk bekerja berdampak pada menurunnya partisipasi kerja bagi kebanyakan perempuan (Goldin, Katz, & Kuzie, 2006). Pendidikan dan

pengalaman kerja merupakan input berharga dalam produksi, perbedaan gender di sepanjang dimensi ini berkontribusi pada perbedaan dalam produktivitas dan penghasilan. Demikian pula, pendidikan yang lebih sedikit dan akses yang lebih rendah ke pelatihan bisnis di kalangan wirausaha perempuan dapat menurunkan produktivitas mereka. di negara-negara maju dan berkembang, perbedaan dalam modal manusia secara tradisional telah menjadi penyumbang utama bagi kesenjangan upah gender.

Perbedaan gender dalam akses peluang ekonomi sering diperdebatkan terkait dengan perbedaan gender dalam partisipasi pasar tenaga kerja. Tingkat partisipasi angkatan kerja dipengaruhi oleh perubahan dalam pekerjaan dan pengangguran. Ini mencerminkan perubahan demografi dan perilaku yang menunjukkan peningkatan atau penurunan partisipasi kelompok usia dan jenis kelamin yang berbeda di pasar tenaga kerja (International Labour Office – ILO, 2012).

Bank Dunia menyatakan bahwa kesetaraan gender mampu memacu produktifitas, dan mendorong pembangunan suatu negara bagi generasi mendatang, serta membuat kelembagaan menjadi semakin representatif (The World Bank, 2011). Hal tersebut sejalan dengan Deklarasi Millennium yang dirumuskan delapan tujuan Pembangunan Millennium yang dikenal dengan *Sustainable Development Goals* (SDGs), di mana salah satu tujuan dari SDGs adalah mendorong kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan dalam hal pendidikan. Sejalan dengan itu, Yao & You (2018) juga menyatakan bahwa peningkatan angka partisipasi perempuan memiliki efek jangka panjang dalam merubah perspektif sosial tentang peran perempuan pada suatu negara.

Partisipasi perempuan dalam bekerja mencerminkan kemauan perempuan untuk mandiri dari sisi ekonomi serta adanya kebutuhan untuk menambah pendapatan keluarga (Zainal & Elpanso, 2017).

Dikutip dari Hidayati (2015) menyatakan bahwa peran ganda dijelaskan dalam konsep *dualisme cultural*, dimana peran ganda merupakan partisipasi perempuan menyangkut peran tradisi (*domestik sphere*) dan transisi (*public sphere*). Peran tradisi merupakan peran perempuan sebagai istri, ibu dan pengelola rumah tangga. Sementara peran transisi mencakup peran perempuan dalam angkatan kerja, anggota masyarakat dan manusia pembangunan. Peran ganda kaum perempuan terimplikasi pada (Hidayati, 2015):

- a) peran kerja sebagai ibu rumah tangga (mencerminkan feminine role), meski tidak langsung menghasilkan pendapatan, secara produktif bekerja mendukung kaum pria (kepala keluarga) untuk mencari penghasilan (uang); dan
- b) berperan sebagai pencari nafkah (tambahan ataupun utama).

Peran ganda perempuan ialah peran perempuan di satu pihak keluarga sebagai pribadi yang mandiri, ibu rumah tangga, mengasuh anak-anak dan sebagai istri, serta dipihak lain sebagai anggota masyarakat, sebagai pekerja dan sebagai warga negara yang dilaksanakan secara seimbang. Peran ganda perempuan merupakan masalah yang sering dihadapi perempuan terdidik. Perempuan terdidik seringkali harus memilih antara tidak menikah dan sukses berkarier sebagai upaya pengembalian atas modal pendidikan tinggi yang telah dikeluarkan, atau menikah dan menjadi ibu rumah tangga yang baik sebagai bentuk peran tradisi (*domestik sphere*).

2.4 Nilai Budaya dan Etnis pada Partisipasi Kerja Perempuan Terdidik

Berdasarkan Survei Penduduk (2010) istilah suku bangsa didefinisikan sebagai kelompok etnis dan budaya masyarakat yang terbentuk secara turun temurun. Sebagai bagian dari sistem budaya masyarakat, identitas dan atribut kesukuan dari suatu kelompok masyarakat akan diwariskan pada generasi

berikutnya. Secara kultural, identitas dan atribut suku bangsa langsung melekat pada setiap orang, sesuai dengan suku bangsa dari kedua orang tuanya.

Pandangan patriarki dianggap sebagai kendala utama dalam partisipasi angkatan kerja perempuan, dimana hal tersebut membangun kendala fisik berdasarkan tuntutan waktu produksi rumah tangga, membatasi kemampuan perempuan untuk berperan sebagai pencari nafkah keluarga, berkontribusi terhadap segregasi pekerjaan profesional di sepanjang garis “pekerjaan yang sesuai untuk perempuan” dan berperan sebagai penyebab diskriminasi upah (Maryam, 2018).

Kelompok etnis disebut juga suku bangsa, yaitu kumpulan individu atau masyarakat yang mempunyai karakter fisik dan non fisik yang sama terutama dalam kebudayaan, bahasa, dan adat istiadat (Arfah, 2011). Pada umumnya suatu kelompok etnis dikenal sebagai populasi sebagai berikut :

- 1) Secara biologis mampu berkembang baik dan bertahan,
- 2) Mempunyai nilai budaya yang sama dan sadar akan rasa kebersamaan dalam suatu bentuk budaya
- 3) Membentuk jaringan komunikasi dan interaksi sendiri,
- 4) Menentukan ciri kelompok sendiri yang diterima oleh kelompok lain dan dapat dibedakan dari kelompok populasi yang lain.

Berdasarkan buku ensiklopedia suku bangsa di Indonesia dan merujuk pada buku pedoman pengolahan SP2010, jumlah suku bangsa yang ada di Indonesia secara keseluruhan lebih dari 1.300 suku bangsa (Badan Pusat Statistik, 2011).

Berdasarkan data Sensus Penduduk 2010 yang dipublikasi oleh Badan Pusat Statistik (2011) Indonesia merupakan negara multi-etnik yang terdiri dari beberapa etnis antara lain :

Tabel 2.1

Kelompok Etnis Berdasarkan Survey Penduduk 2010 di Indonesia

No.	Kelompok Suku Bangsa	Jumlah Populasi	Persentase
1.	Jawa	95 217 022	40,22
2.	Sunda	36 701 670	15,5
3.	Batak	8 466 969	3,58
4.	Suku asal Sulawesi lainnya	7 634 262	3,22
5.	Madura	7 179 356	3,03
6.	Betawi	6 807 968	2,88
7.	Minangkabau	6 462 713	2,73
8.	Bugis	6 359 700	2,69
9.	Melayu	5 365 399	2,27
10.	Suku asal Banten	4 657 784	1,97
11.	Suku asal Nusa Tenggara Timur	4 184 923	1,77
12.	Banjar	4 127 124	1,74
13.	Suku asal Aceh	4 091 451	1,73
14.	Bali	3 946 416	1,67
15.	Sasak	3 173 127	1,34
16.	Dayak	3 009 494	1,27
17.	Cina	2 832 510	1,2
18.	Suku asal Papua	2 693 630	1,14
19.	Makassar	2 672 590	1,13
20.	Suku asal Sumatera Lainnya	2 204 472	0,93
21.	Suku asal Maluku	2 203 415	0,93
22.	Suku asal Kalimantan lainnya	1 968 620	0,83
23.	Cirebon	1 877 514	0,79
24.	Suku asal Jambi	1 415 547	0,6
25.	Suku asal Lampung	1 381 660	0,58
26.	Suku Nusa Tenggara Barat lainnya	1 280 094	0,54
27.	Gorontalo	1 251 494	0,53
28.	Minahasa	1 237 177	0,52
29.	Nias	1 041 925	0,44
30.	Asing/Luar Negeri	162 772	0,07

Sumber : (Badan Pusat Statistik, 2011).

Dari tabel tersebut nampak bahwa Suku yang paling mendominasi di Indonesia ialah suku Jawa dengan populasi sekitar 95,2 juta jiwa atau rata-rata sebesar 40,2 persen dari populasi penduduk Indonesia. Suku Jawa ini merupakan gabungan dari Suku Jawa, Osing, Tengger, Samin, Bawean/Boyan, Naga, Nagaring dan suku-suku lainnya di Pulau Jawa. Suku bangsa terbesar berikutnya secara berturut-turut adalah Suku Sunda dengan jumlah sebanyak 36,7 juta jiwa (15,5 persen), Suku Batak sebanyak 8,5 juta (3,6 persen) yang mencakup Suku Batak Angkola, Batak Karo, Batak Mandailing, Batak Pakpak Dairi, Batak Simalungun, Batak Tapanuli, Batak Toba dan Dairi. Suku terbanyak keempat yaitu Suku asal Sulawesi lainnya sebanyak 7,6 juta jiwa (3,2 persen). Kelompok suku bangsa asal Sulawesi lainnya merupakan gabungan dari sebanyak 208 jenis suku bangsa asal Sulawesi yang dimaksud tidak termasuk Suku Makassar, Bugis, Minahasa dan Gorontalo (Badan Pusat Statistik, 2011).

Nilai budaya pada setiap kelompok suku sering dikaitkan sebagai identitas budaya, karena latar belakang kehidupan sosial seseorang dapat mewarnai kebebasan cara, gaya, perilaku berusaha. Identitas budaya seseorang juga berpengaruh terhadap kemampuan kerja (Sangen, 2005). Nilai budaya dan Etnis turut menentukan sikap individu dalam pengambilan keputusan. Nilai budaya sendiri merupakan elemen yang sangat penting dalam pemahaman mengenai masyarakat, dalam analisis tentang perbedaan diantara mereka dalam menjelaskan perkembangan ekonomi mereka (Huntington, 2000). Didalam masyarakat terdapat nilai budaya, dan setiap nilai budaya satu dengan lainnya saling berkaitan, maka membentuk suatu sistem nilai budaya yang menjadi satu kesatuan yang utuh (Saleh, 2008). Sistem nilai budaya yang berkembang dalam masyarakat telah menjadi pedoman ideal dalam menyikapi obyek tertentu, tidak kecuali terhadap keterlibatan perempuan kedalam dunia kerja.

Seperti halnya pada Etnis Jawa, istilah wanita itu sendiri berasal dari bahasa Jawa yang berarti *wani ditata* (berani ditata). Istilah tersebut secara tidak langsung telah menunjukkan adanya tuntutan kepasifan peran pada perempuan etnis Jawa. Selain itu pandangan tradisional terhadap perempuan Jawa yang disebut *kanca wingking*, yakni bahwa perempuan adalah teman di dapur akan mewarnai kehidupan rumah tangga yang menunjukkan bahwa perempuan dari etnis Jawa harus tunduk kepada pihak laki-laki.

Sejalan dengan hal ini, dalam budaya etnis Sunda ikatan keluarga yang sangat kuat dan peranan agama islam sangat mempengaruhi adat istiadat yang mewarnai kehidupan etnis Sunda (Mukhlas, 2015). Dalam etnis Sunda laki-laki dianggap sebagai kepala keluarga yang harus menanggung perekonomian keluarga, sedangkan perempuan memiliki peran untuk mengatur kehidupan keluarga. Pada budaya etnis Sunda dikenal ungkapan yang mengharuskan wanita turut atau tunduk kepada suami seperti "*taraje nanggeuh, dulang tinande*" (tangga bersandar, dulang siap menadah) yang bermakna perempuan selalu bersedia untuk menjalankan kewajiban. Selain itu juga terdapat ungkapan "*Najan kaliang cocopet ge kudu milu*" (ke dalam lubang kutu lantai pun harus ikut), yaitu dibawa ketempat yang penuh kesulitan sekalipun wanita itu wajib patuh mengikuti suaminya (Marlina, 2006)

Berbeda halnya dengan perempuan Etnis Batak yang terkenal sebagai seorang yang pekerja keras, tangguh dan perkasa. Dikampung halamannya, perempuan etnis Batak dikenal memiliki mata pencaharian sebagai petani dan peladang yang sangat giat bekerja mengolah sawah maupun ladang milik keluarga dari pihak suaminya. Sebagai penduduk migran, perempuan etnis Batak juga dikenal sebagai *Parlangsam* yaitu para perempuan Batak yang bekerja mengumpulkan pakaian dan barang-barang bekas untuk dijual kembali. Sama hal

nya bagi perempuan pedagang Batak Toba (*inang-inang*) yang menganggap bahwa bekerja bukan hanya sekadar untuk memenuhi kebutuhan ekonomi dan pendidikan anak-anak mereka. Namun demikian yang terpenting dengan bekerja keras *inang-inang* mampu menunjukkan eksistensi dan martabat dirinya dalam kehidupan rumah tangga dan keluarganya. (Baiduri, 2015).

Sebaliknya pada perempuan Betawi masih memiliki anggapan dalam stereotype yang mengatakan bahwa wilayah kekuasaannya hanya seputar sumur, dapur dan kasur (*3 ur*) yang pada akhirnya akan membawa perempuan Betawi kedalam pemahaman yang sederhana tentang perempuan, yakni “berkutat di seputaran rumah saja”, (Halimatusa'diah, 2017). Tingkatan partisipasi kerja perempuan Betawi dapat dikatakan rendah dan ini hampir tidak berubah sepanjang waktu. Hal ini salah satunya disebabkan oleh pandangan tradisional terkait sikap laki-laki Betawi yang dianggap oleh perempuan sebagai pengambil keputusan dalam keluarga, dimana para lelaki Betawi yang ternyata tidak suka bila para istri mereka bekerja di luar rumah (Ahyat, 2015)

2.5 Hubungan Antar Variabel

Tingginya tingkat partisipasi perempuan terdidik di Indonesia dalam kegiatan ekonomi disebabkan oleh beberapa karakteristik seperti sosial ekonomi dan etnis. Karakteristik sosial dalam penelitian ini digambarkan melalui dua karakteristik yaitu karakteristik demografi dan karakteristik pendidikan meliputi usia, status kawin dan tingkat pendidikan. Sedangkan karakteristik ekonomi digambarkan melalui tanggungan anak dibawah 15 tahun dan kondisi ekonomi rumah tangga.

Selanjutnya karakteristik etnis berdasarkan lima besar etnis yang didominasi oleh perempuan terdidik di Indonesia. Secara lebih mendalam keterkaitan beberapa karakteristik sosial ekonomi dan etnis dengan partisipasi kerja perempuan terdidik di Indonesia dapat dijelaskan sebagai berikut.

2.5.1 Karakteristik Sosial

a) Usia

Teori *age earning profile* (profil pendapatan umur) secara tidak langsung telah menyatakan bahwa harga rehat dianggap relative rendah bagi seseorang yang berusia muda, sebaliknya dianggap begitu tinggi oleh pekerja yang termasuk dalam kategori *prime age working years* (usia prima bagi pekerja) (Tarmizi, 2012).

Oleh sebab itu, seseorang yang berada pada usia prima akan menghabiskan waktunya untuk bekerja. Ketika seseorang sudah bertambah usia, maka mereka akan cenderung memandang pasar kerja sebagai sebuah keharusan. Seseorang dengan usia yang semakin bertambah mulai menyadari adanya tanggung Jawab yang juga semakin besar untuk memberi nafkah keluarga (Pratomo, 2017).

Keterkaitan antara usia dengan tingkat partisipasi angkatan kerja perempuan terdidik yaitu usia tenaga kerja berkaitan langsung dengan kondisi fisik seorang tenaga kerja dalam melakukan kegiatannya. Semakin tua umur tenaga kerja maka kondisi fisiknya lebih rendah sehingga akan berpengaruh pada produktifitas tenaga kerja. Tingkat partisipasi angkatan kerja akan meningkat seiring dengan bertambahnya usia, namun ketika usia tertentu tingkat partisipasi kerja akan mencapai titik optimal yang pada akhirnya menurun hingga titik terendah, terutama pada kelompok usia 60 tahun keatas (Hidayat & Hadi, 2017).

b) Status Perkawinan

Status perkawinan seseorang dapat dikatakan memiliki pengaruh terhadap keputusan perempuan untuk memasuki dunia kerja. Mengacu pada teori *differential overqualification*, yang dikemukakan oleh Robert Frank (1978) menyatakan bahwa perempuan yang telah menikah memiliki risiko yang lebih tinggi untuk masuk ke pasar kerja.

Dengan kata lain, perempuan yang telah berstatus menikah dan menjadi Istri telah bergantung pada suami yang berstatus sebagai kepala keluarga yang berkewajiban mencari nafkah. Perempuan yang sudah menikah hanya akan menjadi 'stayer' dengan syarat bahwa pencarian pekerjaan untuk suami mereka dioptimalkan (Büchel & Battu, 2003). Pada umumnya perempuan bukan dianggap sebagai pihak yang pencari nafkah utama untuk keluarga sebab kebutuhan sehari-hari perempuan yang sudah menikah biasanya ditanggung oleh suami (Sitohang, 2017). Pengambil alihan tanggung Jawab oleh perempuan sebagai tulang punggung keluarga terjadi ketika keadaan ekonomi belum tercukupi (Drago & Black, 2004). Oleh karenanya kecenderungan perempuan yang sudah menikah untuk menjadi pengangguran lebih besar apabila dibandingkan dengan perempuan yang berstatus belum menikah.

c) Tingkat Pendidikan

Pendidikan dianggap sebagai salah satu upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia yang lebih dikenal dengan sebutan *human capital* (teori modal manusia). Investasi pendidikan merupakan kegiatan yang dapat dianggap sebagai nilai *stock* manusia, di mana nilai *stock* manusia setelah mengikuti pendidikan dengan berbagai jenis dan bentuk pendidikan diharapkan dapat meningkatkan berbagai bentuk nilai berupa peningkatan penghasilan individu, peningkatan produktivitas kerja, dan peningkatan nilai rasional (*social benefit*) dibandingkan dengan sebelum mengenyam pendidikan (Idris, 2007).

Mudahnya akses memperoleh pendidikan saat ini tentu akan mendorong permintaan akan tenaga kerja yang berpendidikan lebih tinggi. Dengan bertambahnya jumlah tenaga kerja yang berpendidikan tertentu di pasar tenaga kerja, pengusaha akan cenderung meningkatkan syarat tingkat pendidikan tenaga kerja, terutama pada kualifikasi tertentu yang membutuhkan keahlian khusus (Setyowati, 2009).

2.5.2 Karakteristik Ekonomi

a) Tanggungan Anak dibawah 15 tahun

Pada saat ini seiring dengan kemajuan teknologi baik dalam bidang kesehatan maupun dalam bidang pendidikan tingkat fertilitas di Indonesia semakin menurun, serta pola pikir masyarakat yang mulai berubah seiring berjalannya waktu. Orangtua akan lebih mempertimbangkan sisi kualitas seperti kesehatan dan pendidikan seorang anak, dengan beban tanggungan ekonomi yang semakin besar para orang tua akan berfikir kembali untuk memiliki anak yang banyak.

Semakin meningkatnya angka partisipasi kerja perempuan maka pemikiran untuk mempunyai banyak anak semakin berkurang. Meningkatnya jumlah anak yang dimiliki dalam sebuah keluarga, maka tentu meningkat pula beban tanggungan dalam keluarga tersebut (Dewi, 2012). Jumlah tanggungan yang semakin banyak pada sebuah keluarga tanpa diimbangi dengan peningkatan dari segi ekonomi akan mengharuskan anggota keluarga selain kepala keluarga untuk mencari nafkah (Simanjuntak, 2001).

b) Kondisi Rumah Tangga

Pada kondisi keluarga dimana semakin dihimpit kemiskinan, semakin berat tekanan yang mengharuskan anggota keluarga mencari pekerjaan produktif sekalipun dengan imbalan yang rendah (Tjaja, 2000). Menurut Handayani (2009) pada umumnya faktor utama yang memotivasi perempuan untuk bekerja adalah adanya tuntutan ekonomi keluarga. Dengan adanya partisipasi perempuan yang bekerja maka diharapkan mampu berkontribusi untuk menunjang perekonomian keluarga. Perempuan pekerja umumnya dianggap bukan sebagai pencari nafkah utama, walaupun penghasilan yang diperoleh sering sangat membantu bahkan merupakan penunjang utama ekonomi rumah tangga (Hidayat & Hadi, 2017).

2.5.3 Karakteristik Etnis

Nilai budaya sendiri merupakan elemen yang sangat penting dalam pemahaman mengenai masyarakat, dalam analisis tentang perbedaan diantara mereka dalam menjelaskan perkembangan ekonomi mereka (Huntington, 2000).

1. Etnis Jawa

Istilah wanita itu sendiri berasal dari bahasa Jawa yang berarti *wani ditata* (berani ditata). Istilah tersebut secara tidak langsung telah menunjukkan adanya tuntutan kepasifan peran pada perempuan etnis Jawa. Menurut (Putri & Lestari, 2015) berdasarkan pandangan budaya Jawa tradisional peran seorang istri hanyalah sebatas dalam sektor domestik yang dikenal dengan istilah *kanca wingking*, dimana memiliki arti teman belakang. Dalam hal ini perempuan Jawa dianggap sebagai teman dalam mengelola urusan rumah tangga, khususnya urusan anak, memasak, mencuci dan lain-lain atau lebih sering dikenal dengan *masak, macak, manak* (3M). Pandangan yang demikian akan mewarnai kehidupan rumah tangga yang menunjukkan bahwa perempuan dari etnis Jawa harus tunduk kepada pihak laki-laki.

Namun Penelitian Siregar (2007) mengungkapkan fakta bahwa mayoritas perempuan yang bekerja di Indonesia berasal dari etnis Batak dan Jawa. Sekitar 40% perempuan di Indonesia yang bekerja berasal dari etnis Jawa. Hal ini dapat dijelaskan sebab etnis Jawa dianggap memiliki sikap yang gigih, serta kemampuan mengaktualisasi diri dalam masyarakat modern. Pada etnis Jawa istri didukung untuk bekerja bahkan disarankan untuk bekerja namun pekerjaan domestik dalam keluarga tetap menjadi tanggung Jawab istri (Rakhmawati, 2013).

2. Etnis Sunda

Dalam budaya etnis Sunda ikatan keluarga yang sangat kuat dan peranan agama Islam sangat mempengaruhi adat istiadat yang mewarnai kehidupan etnis Sunda (Mukhlas, 2015). Dalam etnis Sunda laki-laki dianggap sebagai kepala keluarga yang harus menanggung perekonomian keluarga, sedangkan perempuan memiliki peran untuk mengatur kehidupan keluarga. Pada budaya etnis Sunda dikenal ungkapan yang mengharuskan wanita turut atau tunduk kepada suami seperti "*taraje nanggeuh, dulang tinande*" (tangga bersandar, dulang siap menadah) yang bermakna perempuan selalu bersedia untuk menjalankan kewajiban. Selain itu juga terdapat ungkapan "*Najan kaliang cocopet ge kudu milu*" (ke dalam lubang kutu lantai pun harus ikut), yaitu dibawa ketempat yang penuh kesulitan sekalipun wanita itu wajib patuh mengikuti suaminya (Marlina, 2006).

3. Etnis Minang

Kehidupan sosial di Minangkabau diatur oleh hukum adat sistem budaya matrilineal. Perempuan Etnis Minang memiliki kedudukan yang tinggi (*the ultimate source of wisdom*) sebagaimana dikenal dalam ungkapan adatnya *amban puro*; pemegang kunci harta pusaka dan "*ka-pai tampek batanyo, ka-pulang tampek babarito*" artinya semua keputusan yang akan diambil harus di musyawarahkan dulu dengan perempuan etnis Minang. Dalam kata lain, kontrol Budaya Etnis Minang berada di tangan perempuan yang bertindak sebagai pengontrol kekuasaan (Nofialdi, 2009).

Mudahnya akses perempuan etnis Minang terhadap ekonomi mengakibatkan laki-laki di Minangkabau tidak memiliki hak atas harta, yang menyebabkan laki-laki yang pergi dari kampung halamannya untuk merantau dengan dalih ekonomi (Fatimah, 2012). Budaya merantau telah mengakibatkan banyak laki-laki Etnis Minang yang pergi ke luar Sumatera Barat untuk memperbaiki taraf ekonominya. Kondisi ini mengakibatkan urusan mencari nafkah keluarga didalam wilayah mulai banyak diambil alih oleh perempuan Etnis Minang dan ditambah lagi adanya kecenderungan laki-laki Minangkabau di Sumatera Barat kurang melakukan kegiatan yang produktif (Latif, 2002). Kondisi inilah yang mendorong peningkatan kontribusi perempuan Etnis Minang dalam sektor ekonomi formal maupun informal.

4. Etnis Batak

Perempuan Batak terkenal sebagai seorang yang pekerja keras, tangguh dan perkasa. Di kampung halamannya, perempuan etnis Batak dikenal memiliki mata pencaharian sebagai petani dan peladang yang sangat giat bekerja mengolah sawah maupun ladang milik keluarga dari pihak suaminya. Sebagai penduduk migran, perempuan etnis Batak juga dikenal sebagai *Parlangsam* yaitu para perempuan Batak yang bekerja mengumpulkan pakaian dan barang-barang bekas untuk dijual kembali. Sama halnya bagi perempuan pedagang Batak Toba (*inang-inang*) yang menganggap bahwa bekerja bukan hanya sekadar untuk memenuhi kebutuhan ekonomi dan pendidikan anak-anak mereka. Namun demikian yang terpenting dengan bekerja keras *inang-inang* mampu menunjukkan eksistensi dan martabat dirinya dalam kehidupan rumah tangga dan keluarganya. (Baiduri, 2015).

5. Etnis Bali

Budaya Patrilineal sangat berpengaruh terhadap Hukum Adat di Bali.

Budaya tersebut yang mendorong terjadinya diskriminasi terhadap kaum perempuan di Bali. Perempuan Etnis Bali (*predana*) memiliki kedudukan yang dianggap lebih rendah daripada laki-laki (*purusa*) sehingga perempuan Etnis Bali seringkali disebut sebagai “Pewaris tanpa warisan”. Pada Etnis Bali anak laki-laki yang berhak mewarisi, sedangkan perempuan hanya penikmat tanpa punya hak atas warisan (Rahmawati, 2016).

Perempuan Etnis Bali menganggap bekerja sebagai persembahan (*yadnya*) yang wajib dilakukan dengan ikhlas tanpa memandang adanya ketidakadilan gender antara laki-laki dan perempuan (Rahmawati, 2016). Perempuan Etnis Bali memiliki persepsi yang berbeda terkait gender dengan adanya perbedaan pengalaman dan adanya penyesuaian diri serta dukungan sosial yang membentuk konsep diri para perempuan Etnis Bali dalam keputusannya untuk berkontribusi terhadap ekonomi keluarga (Widayani & Hartati, 2014).

6. Etnis Betawi

Perempuan Betawi masih memiliki anggapan dalam stereotype yang mengatakan bahwa wilayah kekuasaannya hanya seputar sumur, dapur dan kasur (*3 ur*) yang mendorong perempuan Betawi kedalam pemahaman sederhana, yakni “berkutut di seputaran rumah saja”, (Halimatusa'diah, 2017). Tingkatan partisipasi kerja perempuan Betawi dapat dikatakan rendah dan ini hampir tidak berubah sepanjang waktu. Hal ini salah satunya disebabkan oleh pandangan tradisional terkait sikap laki-laki Betawi yang dianggap oleh perempuan sebagai pengambil keputusan dalam keluarga, dimana para lelaki Betawi yang ternyata tidak suka bila para istri mereka bekerja di luar rumah (Ahyat, 2015).

7. Etnis Sasak

Etnis Sasak merupakan etnis mayoritas di pulau Lombok yang mencapai hampir 95% penduduk. Kehidupan etnis Sasak ditopang dari hasil pertanian. Dalam masa tunggu panen, biasanya etnis Sasak memanfaatkan waktu untuk membuat anyaman dan menenun. Tanggung Jawab ekonomi pada etnis Sasak merupakan kewajiban laki-laki. Sebaliknya, untuk pengelolaan kebutuhan keluarga di serahkan pada sub kepala rumah tangga, yaitu perempuan (Maryam, 2018). Seperti halnya perempuan pada etnis Sasak di Nusa Tenggara Barat lebih diposisikan pada peran mengurus rumah tangga saja yang dalam budaya Sasak dikenal *begawean leq bale doang* yang berarti bahwa perempuan Etnis Sasak berperan untuk mengurus rumah tangga.

Namun sejalan dengan mudahnya akses pendidikan, maka bergeser pula peran perempuan Etnis Sasak (Maryati, 2015). Perempuan mulai keluar dari sektor domestik ke sektor publik. Dominasi laki-laki mulai berkurang sejalan dengan meningkatnya peran perempuan disektor publik. Dengan kata lain, perempuan mulai berkontribusi kedalam berbagai aktivitas publik seiring adanya peningkatan akses pendidikan yang dimiliki oleh perempuan (Haris, 2002).

2.6 Penelitian Terdahulu

Penelitian terkait partisipasi kerja perempuan di Indonesia menjadi fenomena yang menarik untuk dikaji sebab keterlibatan perempuan dalam kegiatan ekonomi tidak terlepas dari keberhasilan pembangunan semua bidang yang memberikan peluang bagi perempuan untuk mendapatkan pendidikan dan kesempatan berkarir yang semakin terbuka. Adapun motivasi utama perempuan untuk bekerja pada umumnya disebabkan karena tuntutan ekonomi keluarga/menambah pendapatan keluarga (Harahap, 2014).

Di satu sisi, perempuan memiliki peran yang sangat penting dengan kemudahan akses untuk memperoleh pendidikan namun disisi lain perempuan justru menjadi faktor utama yang menciptakan pengangguran. Seperti penelitian yang dilakukan oleh Pratomo (2017) yang menunjukkan bahwa 20% pengangguran di Indonesia justru didominasi oleh pengangguran usia muda dan terdidik (dengan pendidikan minimal SMA) dan berjenis kelamin perempuan. Penelitian tersebut juga menyebutkan bahwa pengangguran terdidik di Indonesia dipengaruhi oleh beberapa faktor antara lain penduduk usia muda, penduduk yang belum menikah, dan tidak memiliki pengalaman kerja.

Sejalan dengan penelitian tersebut Mincer (1991) yang meneliti hubungan pendidikan dan partisipasi kerja pada perempuan. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa kesenjangan pendidikan pada angkatan kerja merupakan sumber utama perbedaan penghasilan di kalangan perempuan. Hasil lainnya juga menunjukkan bahwa peningkatan dalam partisipasi kerja perempuan telah mengurangi kesenjangan atau menghilangkan perbedaan jenis kelamin dalam pasar tenaga kerja. Sejalan dengan penelitian sebelumnya, Bashir, Ahmad, & Hidayat (2013) yang menyatakan bahwa usia, pendidikan, pendidikan suami, pendidikan ayah, pendidikan ibu, total orang yang dipekerjakan di rumah, status pekerjaan ibu dan

pendidikan teknis mengurangi jumlah pengangguran perempuan di Pakistan.

Sementara sistem keluarga bersama, jumlah anak dan ukuran rumah tangga adalah penyebab pengangguran yang lebih tinggi di kalangan perempuan terdidik di Bahawalnagar.

Potensi perempuan dalam menggerakkan roda perekonomian di Indonesia terbilang cukup besar. Hal ini akan menjadi lebih menarik jika ditinjau dari segi etnis sebab Indonesia merupakan negara multietnik dimana mereka memiliki sudut pandang yang berbeda terkait peran perempuan yang bekerja dalam keluarga.

Penelitian terkait partisipasi kerja perempuan ditinjau dari segi etnis di Indonesia sebelumnya telah dilakukan oleh Siregar (2007) yang menunjukkan bahwa mayoritas perempuan yang bekerja di Indonesia berasal dari etnis Batak dan Jawa. Kedua etnis ini yang paling terkenal dengan kegigihan, serta kemampuan mengaktualisasi diri dengan kaum pria dalam masyarakat modern. Ditinjau dari segi mentalitas dan budaya, umumnya kedua etnis ini yang paling banyak menguasai dunia pekerjaan, karena mereka memiliki etos kerja yang tinggi. Selain itu, emansipasi perempuan Batak khususnya terhadap pendidikan juga cukup tinggi.

Penelitian lain dilakukan oleh Shonhaji (2017) yang meneliti keterlibatan perempuan dalam mewujudkan keserasian sosial pada masyarakat multietnik di Lampung menunjukkan bahwa kaum perempuan di desa Sukaraja Lampung, tidak lagi dianggap sebagai *konco wingking* yang hanya memiliki peran domestik sebagai istri dan ibu rumah tangga yang hanya mengurus anak dan suami.

Dalam penelitian ini digunakan beberapa penelitian pendukung sebagai literatur review. Secara lengkap rekapitulasi studi terdahulu dari berbagai parameter dapat dilihat pada table dibawah ini:

Tabel 2.2 : Rekapitulasi Studi Terdahulu Berdasarkan Berbagai Parameter

NO	NAMA/JUDUL/TAHUN	METODE	HASIL	KETERANGAN
1.	(Wasito, 2004) Aktivitas Harian Petani Berdimensi Jender Dan Etnis (Kasus Beberapa Desa di Sumatera Utara)	PPSP atau PRA teknik pemetaan sumberdaya, diagram aktivitas rutin harian, dan analisis mata pencaharian.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kegiatan produktif perempuan pada etnis Tapanuli, Karo atau Mandailing di daerah asalnya cukup besar (tulang punggung ekonomi keluarga). 2. Hal ini berbeda dengan yang ada di Langkat atau Deli Serdang, heterogenitas etnis cenderung merubah pola aktivitas harian mereka. <ul style="list-style-type: none"> • Faktor sosial budaya, nilai religi yang cenderung patriarkhi, atau struktur dan ideologi gender yang melekat, cenderung menciptakan ketidaksetaraan gender dalam hal pekerjaan. 	
2.	(Sarkar, 2008) <i>Trends and patterns of labour supply and unemployment in India</i>	Analisis Faktor	<ul style="list-style-type: none"> • Dinamika pasokan tenaga kerja dan pengangguran di India sangat dipengaruhi oleh perubahan dalam partisipasi perempuan. <ol style="list-style-type: none"> 3. Percepatan masa studi kaum perempuan menyebabkan tingkat pengangguran kaum muda perempuan yang lebih tinggi dalam jangka panjang. 	

NO	NAMA/JUDUL/TAHUN	METODE	HASIL	KETERANGAN
3.	(Mangunsong, 2009) Faktor Intrapersonal, Interpersonal, Dan Kultural Pendukung Efektivitas Kepemimpinan Perempuan Pengusaha Dari Empat Kelompok Etnis Di Indonesia	ANOVA	4. Pemimpin perempuan pengusaha dari keempat kelompok etnis (Bali, Jawa, Minang dan Batak) dipersepsi oleh bawahannya memiliki efektivitas kepemimpinan yang tinggi • Model teoritis yang terdiri dari faktor Intrapersonal (kecerdasan kepemimpinan, peran jenis kelamin dan faktor edukasi), faktor Interpersonal (asertivitas, gaya kepemimpinan dan perilaku kepemimpinan), faktor kultural (lingkungan keluarga, lingkungan perusahaan dan lingkungan kultural), mempengaruhi efektivitas kepemimpinan perempuan pengusaha.	
4.	(Dewi, 2012) Partisipasi Tenaga Kerja Perempuan dalam Meningkatkan Pendapatan Keluarga	Regresi Data Panel	5. Umur berpengaruh negative terhadap partisipasi kerja perempuan dalam meningkatkan pendapatan keluarga 6. Jam kerja, tingkat pendidikan dan jumlah anak berpengaruh positif terhadap partisipasi kerja perempuan dalam meningkatkan pendapatan keluarga	
5.	(Okorie, 2013) <i>Women Education In Nigeria: Problems And Implications For Family Role And Stability</i>	Literature Review	• Hubungan antara pendidikan perempuan, stabilitas keluarga dan pembangunan nasional berkelanjutan merupakan faktor yang dapat menghambat pendidikan perempuan, stabilitas keluarga dan pembangunan berkelanjutan di Nigeria	

NO	NAMA/JUDUL/TAHUN	METODE	HASIL	KETERANGAN
6.	(Vuluku, Wambugu, & Moyi, 2013) <i>Unemployment and underemployment in Kenya: a gender gap analysis</i>	Probit Biner	<ul style="list-style-type: none"> Sebagian besar (88,8%) dari total kesenjangan probabilitas pengangguran perempuan dan laki-laki diakibatkan oleh kesenjangan gender dalam karakteristik individu dan rumah tangga Karakteristik utama yang menghasilkan kesenjangan gender pengangguran di Kenya adalah wilayah tempat tinggal, usia, tingkat pendidikan, status perkawinan. 	Makalah ini menggunakan data dari Survei Anggaran Rumah Tangga Terpadu Kenya 2005/2006
7.	(Ahyat, 2015) Dinamika Perempuan Betawi pada Abad ke-20	Literature Review dan Kuesioner	<p>7. Perempuan Betawi telah banyak yang sudah mengenyam pendidikan tinggi</p> <p>8. Tingkatan partisipasi kerja perempuan Betawi dapat dikatakan rendah, hal ini disebabkan oleh sikap laki-laki Betawi yang dianggap oleh perempuan sebagai pengambil keputusan dalam keluarga, dimana para lelaki Betawi yang ternyata tidak suka bila para istri mereka bekerja di luar rumah.</p>	
8.	(Dessie, 2015) <i>Women and Unemployment in Bahir Dar City, Ethiopia: Determinants and Consequences</i>	Regresi Logistik Biner	<ul style="list-style-type: none"> Keterampilan pelatihan yang diperoleh, ukuran keluarga dan kepemimpinan rumah tangga merupakan faktor penentu dari status pekerjaan perempuan <p>9. Selain itu, standar hidup yang buruk, kekerasan dalam rumah tangga, pernikahan dan kehamilan yang tidak diinginkan, tingkat partisipasi sosial yang rendah, keputusan dan kecemasan, kecanduan alkohol, perceraian, prostitusi, penyebab pengangguran pada perempuan di wilayah Amhara</p>	

NO	NAMA/JUDUL/TAHUN	METODE	HASIL	KETERANGAN
9.	(Hasanah & Wardan, 2016) Peran Perempuan Suku Duanu Dalam Perekonomian Keluarga	Kuesioner & Observasi lapang	<ul style="list-style-type: none"> Peran Ibu (Perempuan) suku Duanu dalam perekonomian keluarga sangat besar, karena perempuan turut membantu penghasilan keluarga. Peran perempuan perekonomian keluarga tidak tunggal, karena pencari nafkah utama adalah Ayah (Laki-laki) 	
10.	(Hidayat & Hadi, 2017) Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Perempuan Antar Kabupaten di Provinsi Riau	Regresi Data Panel	<ul style="list-style-type: none"> Populasi yang merawat rumah tangga dan usia sekolah secara signifikan mempengaruhi Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja perempuan, sementara pendidikan tidak mempengaruhi Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja perempuan di kabupaten-kabupaten di Provinsi Riau. 	
11.	(Shonhaji, 2017) Keterlibatan Perempuan Dalam Mewujudkan keserasian Sosial Pada Masyarakat Multietnik Di Lampung		<p>10. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kaum perempuan memiliki peran yang signifikan dalam mewarnai dinamika interaksi sosial antar kelompok etnik;</p> <ul style="list-style-type: none"> Kaum perempuan di desa Sukaraja, tidak lagi dianggap sebagai <i>konco wingking</i> yang hanya memiliki peran domestik sebagai istri dan ibu rumah tangga yang hanya mengurus anak dan suami. Aktifitas mereka pada sektor publik dalam berbagai bidang, baik secara langsung maupun tidak langsung, berdampak pada terwujudnya keserasian sosial pada masyarakat multietnik. 	

NO	NAMA/JUDUL/TAHUN	METODE	HASIL	KETERANGAN
12.	(Sitohang, 2017) Identifikasi Pengangguran Sukarela (Voluntary Unemployment) Perempuan di Kabupaten Kepahiang Tahun 2015	Analisis tabel kontingensi 3 arah, Metode CochranMantel-Haenzel dan pengujian kehomogenan Odds Ratio	<ul style="list-style-type: none"> Perempuan dengan pendidikan tinggi cenderung 4,40 kali lebih banyak berstatus pengangguran dibandingkan perempuan dengan pendidikan rendah. 11. Perempuan yang berpendidikan tinggi cenderung lebih banyak berstatus pengangguran pada saat berstatus kawin, dibandingkan perempuan yang berstatus tidak kawin.	Pengangguran perempuan di Kabupaten Kepahiang merupakan pengangguran sukarela (<i>voluntary unemployment</i>).
13.	(Andoh & Ampofo, 2018) <i>The Educated Indigenous African Woman and the Issue of being Assertive as Showcased Adeche's Purple Hibiscus?</i>	traditional library research approach	<ul style="list-style-type: none"> Temuan utama dari penelitian ini menunjukkan terjadi perubahan positif dalam peran perempuan. Perubahan ini terjadi sebagai hasil kontribusi perempuan melalui pendidikan dan berkontribusi untuk membebaskan keluarga mereka dari budaya dan pandangan masyarakat di mana perempuan diperlakukan. 	
14.	(Stiera & Epsteina, 2018) <i>Institutional change and women's work patterns along the family life course</i>	ISSP module	12. Kebijakan keluarga dan peluang terbuka bagi perempuan mempengaruhi keputusan untuk bekerja ketika anak-anak masih muda. Kebijakan keluarga juga memiliki efek untuk mengurangi perbedaan pendidikan dalam pola kerja perempuan	
15.	(Tyrowicza, 2018) <i>How (not) to make women work?</i>	Korelasi	13. Semakin rendah kesenjangan pekerjaan gender, maka semakin besar kekuatan hubungan antara kesetaraan gender pengangguran dan biaya peluang kerja.	

Sumber: Olahan Peneliti (2018).



BAB III

KERANGKA PIKIR

3.1 Kerangka Pikir

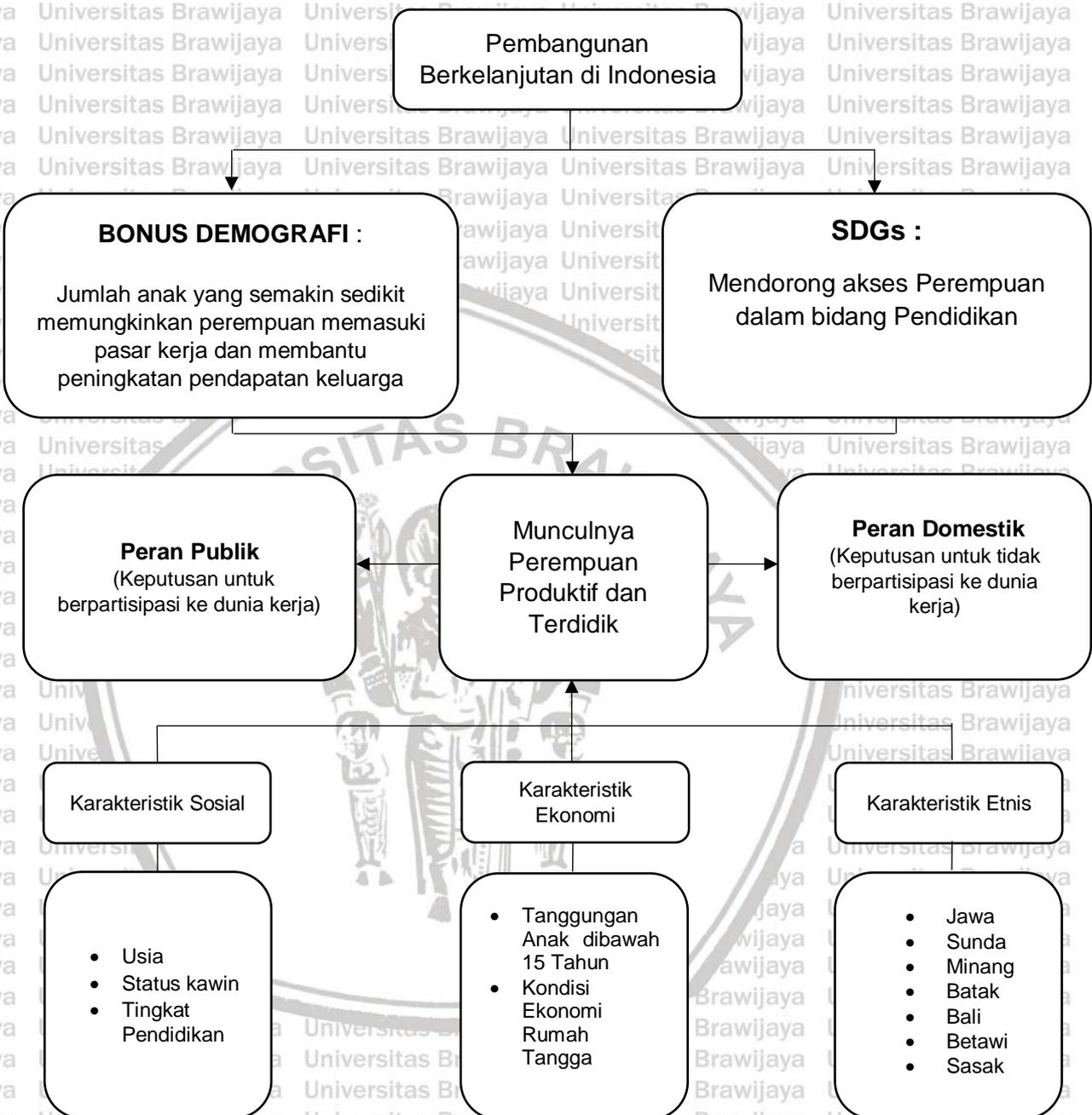
Menurut *United Nations* (United Nations Development Programme, 2016) transisi demografi yang terjadi pada beberapa tahun terakhir di Indonesia akan membuka peluang bagi Indonesia untuk menikmati bonus demografi (*demographic dividend*) pada periode 2020-2030. Bonus demografi dapat dikatakan sebagai sebuah momentum emas di mana pertumbuhan penduduk usia produktif (15-64 tahun) lebih tinggi dibandingkan dengan penduduk usia non produktif (Kuncoro, 1997). Secara konsep dapat dijelaskan bahwa bonus demografi menjadi keuntungan ekonomi tersendiri bagi kaum perempuan yang ditandai dengan peningkatan partisipasi kaum perempuan di pasar tenaga kerja akibat dari penurunan jumlah anak. Selain itu, peningkatan partisipasi kerja perempuan di Indonesia juga didukung dengan semakin mudahnya akses pendidikan yang sejalan dengan program *Sustainable Development Goals* (SDGs). Hal ini secara tidak langsung mendorong peningkatan jumlah partisipasi kerja perempuan produktif dan terdidik di Indonesia.

Peningkatan jumlah penduduk produktif di Indonesia akibat dari bonus demografi secara tidak langsung menunjukkan peningkatan angkatan kerja di Indonesia. Dalam kenyataannya angkatan kerja produktif tersebut belum mampu terserap secara maksimal dalam pasar tenaga kerja karena kurangnya kualitas yang dimiliki oleh seseorang. Sejalan dengan teori *Human capital*, seseorang dapat meningkatkan penghasilannya melalui peningkatan pendidikan. Dengan kata lain, Manfaat utama pendidikan adalah mengurangi risiko untuk menjadi pengangguran (Mincer, 1991).

Dalam penelitian ini objek yang diteliti difokuskan pada perempuan terdidik di Indonesia. Hal ini didasarkan karena besarnya potensi yang dimiliki oleh perempuan di Indonesia dengan semakin mudahnya akses pendidikan sejalan dengan program SDGs, namun data BPS justru menunjukkan bahwa tingkat pengangguran terdidik khususnya perempuan juga masih terbilang tinggi. Selain itu perempuan terdidik di Indonesia seringkali harus dihadapkan dengan peran ganda (*double burden*) bahwa mereka harus berperan sebagai pekerja (*public sphere*) atau berperan untuk mengurus rumah tangga (*domestik sphere*).

Kondisi tersebut semakin kompleks jika dikaitkan dengan latar belakang Indonesia yang terdiri dari beragam etnis. Nilai budaya dari masing-masing etnis mempengaruhi partisipasi kerja perempuan terdidik di Indonesia sebab Indonesia merupakan negara multietnik dimana tiap-tiap etnis memiliki sudut pandang yang berbeda terkait peran perempuan yang bekerja dalam keluarga. Berdasarkan penelitian terdahulu, beberapa karakteristik yang dapat mempengaruhi partisipasi kerja perempuan terdidik yaitu karakteristik sosial meliputi (usia, status kawin, tingkat pendidikan), kemudian karakteristik ekonomi (tanggung jawab anak dibawah 15 tahun dan kondisi rumah tangga) serta karakteristik etnis yang mencakup beberapa etnis yang dominan di Indonesia dilihat dari potensi jumlah perempuan terdidik dalam etnis tersebut berdasarkan data IFLS5. Secara lebih rinci kerangka pikir dalam penelitian ini dapat dilihat pada gambar dibawah ini:

Gambar 3.1
Kerangka Pemikiran



Sumber : Peneliti (2018)

3.2 Hipotesis

Berdasarkan teori dan penelitian terdahulu yang telah dijelaskan sebelumnya, adapun hipotesis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. H₁: Diduga perempuan terdidik yang berusia produktif memiliki kecenderungan ke peran publik
2. H₂: Diduga perempuan terdidik yang berstatus kawin memiliki kecenderungan ke peran domestik
3. H₃: Diduga perempuan terdidik yang berpendidikan setara SMA/SMK/MA/Paket C memiliki kecenderungan ke peran publik
4. H₄: Diduga perempuan terdidik yang berpendidikan setara Diploma (D1/D2/D3) memiliki kecenderungan ke peran publik
5. H₅: Diduga perempuan terdidik yang berpendidikan setara Perguruan Tinggi (Universitas Terbuka/S1/S2/S3) memiliki kecenderungan ke peran publik
6. H₆: Diduga perempuan terdidik yang punya tanggungan anak usia dibawah 15 tahun memiliki kecenderungan ke peran publik
7. H₇: Diduga perempuan terdidik yang memiliki kondisi rumah tangga yang terbilang cukup memiliki kecenderungan ke peran domestik
8. H₈: Diduga perempuan terdidik yang berasal dari Etnis Jawa, Etnis Minang, Etnis Batak, Etnis Bali dan Etnis Sasak memiliki kecenderungan ke peran publik
9. H₉: Diduga perempuan terdidik yang berasal dari Etnis Sunda dan Etnis Betawi memiliki kecenderungan ke peran domestik

BAB IV

METODE PENELITIAN

4.1 Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan harus tepat agar peneliti dapat memperoleh gambaran yang jelas terkait masalah penelitian dan langkah-langkah yang harus diambil. Berdasarkan tujuan penelitian yang telah dijelaskan yaitu untuk mengetahui pengaruh dari karakteristik sosial, karakteristik ekonomi dan karakteristik etnis terhadap peran ganda perempuan terdidik di Indonesia dengan menganalisis data numerik menggunakan pengolahan statistik maka dalam penelitian ini digunakan pendekatan penelitian kuantitatif. Menurut Hamdi (2014) penelitian kuantitatif menekankan fenomena objektif dan dikaji secara kuantitatif dengan menggunakan angka-angka, pengolahan statistik, struktur dan percobaan terkontrol. Hartas (2015) juga menyebutkan bahwa penelitian kuantitatif biasanya disajikan dalam bentuk numerik yang dianalisis menggunakan metode berbasis matematis (khususnya statistik). Dengan demikian pendekatan kuantitatif dirasa sesuai dengan tujuan penelitian ini.

4.2 Sumber Data

Pada penelitian ini menggunakan data sekunder yang bersumber dari *Indonesia Family Life Survey (IFLS) 5* atau dikenal dengan SAKERTI (Survei Aspek Kehidupan Rumah Tangga Indonesia). IFLS 5 merupakan survei rumah tangga panel yang dilakukan sebagai upaya kolaborasi *RAND* dan *Survey Meter* yang digelar antara akhir Oktober 2014 hingga Agustus 2015 di 13 provinsi. Dalam penelitian ini juga digunakan beberapa data pendukung lainnya yang bersumber dari Badan Pusat Statistik dan *World Bank*, serta sumber-sumber lain seperti jurnal, artikel dan literatur terkait lainnya.

4.3 Populasi dan Sampel

Populasi adalah keseluruhan atau sekelompok objek yang menjadi sasaran penelitian (Bungin, 2005). Sedangkan sample merupakan sebagian dari populasi yang akan diteliti. Dalam penelitian ini populasi yang digunakan yaitu seluruh angkatan kerja perempuan di Indonesia. Sedangkan sample yang digunakan dalam penelitian ini mengacu pada prosedur sampling yang digunakan pada IFLS-5 mewakili sekitar 83% penduduk Indonesia yang tinggal di 13 provinsi di Indonesia: empat provinsi di Sumatra (Sumatera Utara, Sumatera Barat, Sumatera Selatan, dan Lampung), kelima provinsi Jawa (DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, DI Yogyakarta, dan Jawa Timur), dan empat provinsi mencakup kelompok pulau besar yang tersisa (Bali, Nusa Tenggara Barat, Kalimantan Selatan, dan Sulawesi Selatan). Daerah pencacahan dipilih dari kerangka sampel yang representatif secara nasional yang digunakan dalam SUSENAS 1993, survei sosial ekonomi sekitar 60.000 rumah tangga (RAND Corporation, 2016).

Pemilihan sample pada penelitian ini menggunakan metode *purposive sampling*, sebab teknik penentuan sampelnya dilakukan dengan pertimbangan khusus sesuai kebutuhan penelitian. Sample pada penelitian ini meliputi angkatan kerja perempuan terdidik di Indonesia khususnya dengan pendidikan terakhir adalah SMA/SMK ke atas sesuai definisi dari Badan Pusat Statistik. Dari segi karakteristik Etnis dipilih beberapa Etnis yang lebih didominasi oleh perempuan terdidik di Indonesia meliputi etnis yaitu Jawa, Sunda, Minang, Batak, Bali, Betawi, dan Sasak. Dalam penelitian ini sample yang digunakan mencakup 18.831 individu dalam rumah tangga. Kriteria sample yang dipilih tersebut telah disesuaikan berdasarkan dengan kebutuhan penelitian.

4.4 Definisi Operasional Penelitian

Dalam penelitian ini definisi operasional akan menjelaskan tentang bagaimana pengukuran variabel yang akan digunakan, dimana variabel yang digunakan terdiri dari dua jenis yaitu variabel terikat dan variabel bebas, meliputi :

a. Variabel Terikat

Variabel terikat di dalam penelitian ini adalah partisipasi kerja perempuan terdidik di Indonesia. Partisipasi perempuan terdidik dalam hal ini didasarkan pada konsep *dualisme cultural*, yang menyebutkan bahwa perempuan mempunyai peran ganda meliputi partisipasi perempuan menyangkut peran transisi (*public sphere*) dan peran tradisi (*domestik sphere*.) Peran transisi (*public sphere*) perempuan terdidik dalam penelitian ini diukur menggunakan data perempuan terdidik yang memutuskan untuk masuk ke dunia kerja, termasuk dari golongan yang bekerja dan golongan yang sedang mencari pekerjaan dengan pendidikan tinggi minimal SMA/SMK keatas. Sedangkan peran tradisi (*domestik sphere*) diukur dengan menggunakan data perempuan terdidik yang memutuskan untuk tidak masuk ke dunia kerja karena memilih mengurus rumah tangga dengan pendidikan minimal SMA/SMK keatas. Dalam penelitian ini variabel terikat terdiri dari dua kategori yaitu :

1 = **Peran Publik** (Perempuan terdidik yang memutuskan untuk masuk ke pasar kerja, yaitu perempuan terdidik yang memilih untuk bekerja maupun sedang mencari pekerjaan yang termasuk dalam golongan angkatan kerja).

0 = **Peran Domestik** (Perempuan terdidik yang memutuskan untuk tidak masuk ke pasar kerja karena memilih mengurus rumah tangga atau tergolong bukan angkatan kerja).

b. Variabel Bebas

Dalam penelitian ini variabel bebas dilihat berdasarkan karakteristik sosial ekonomi dan aspek etnis. Dilihat dari karakteristik sosial meliputi usia, status kawin, tingkat pendidikan. Sedangkan berdasarkan karakteristik ekonomi mencakup tanggungan anak dibawah usia 15 tahun dan kondisi kehidupan rumah tangga. Selanjutnya dari kelompok etnis yang digunakan terdiri dari tujuh etnis yang didominasi oleh perempuan terdidik di Indonesia berdasarkan IFLS 5 meliputi (Jawa, Sunda, Minang, Batak, Bali, Betawi, dan Sasak). Dengan demikian definisi operasional variabel bebas dalam penelitian ini yaitu :

1) Usia

Variabel ini berupa kategori numerik yang menunjukkan tingkat umur dari subjek yang akan diteliti dengan menggunakan satuan tahun. Variabel ini diukur menggunakan skala notasi nilai 1 untuk kategori usia produktif (15-64 tahun) dan nilai 0 untuk kategori usia non produktif.

2) Status Kawin

Variabel ini merupakan variabel kategorik yang menunjukkan status kawin dari subjek yang akan diteliti. Variabel ini diukur menggunakan skala notasi nilai 1 untuk kategori kawin dan nilai 0 untuk kategori belum kawin.

3) Tingkat Pendidikan

Variabel ini merupakan variabel numerik yang diukur melalui pendidikan tertinggi yang telah ditamatkan oleh subjek yang diteliti. Namun dikarenakan dalam penelitian kali ini hanya meneliti angkatan kerja perempuan terdidik sehingga variabel tingkat pendidikan pada penelitian ini menggunakan pendidikan minimal SMA (baik umum maupun kejuruan) keatas, meliputi :

1. Memiliki ijazah Sekolah Menengah Atas (SMA) / Madrasah Aliyah (MA)
2. Memiliki ijazah Sekolah Menengah Kejuruan (SMK)
3. Memiliki ijazah Paket C
4. Memiliki ijazah Akademi D1/D2 dan D3
5. Memiliki ijazah D4/Universitas Terbuka/S1
6. Memiliki ijazah S2
7. Memiliki ijazah S3

4) Tanggungan Anak

Variabel ini menunjukkan tanggungan anak usia dibawah 15 tahun yang dimiliki oleh subjek yang akan diteliti. Variabel ini merupakan variabel kategorik yang diukur menggunakan skala notasi nilai 1 untuk kategori subjek yang memiliki tanggungan anak usia dibawah 15 tahun dan nilai 0 untuk kategori subjek yang tidak memiliki tanggungan anak usia dibawah 15 tahun.

5) Kondisi Kehidupan Rumah Tangga

Variabel ini menunjukkan kondisi kehidupan rumah oleh subjek yang akan diteliti. Mengacu pada data IFLS 5 kondisi kehidupan rumah tangga digambarkan dengan kondisi subjek yang lebih dari cukup, kurang mencukupi & hanya mencukupi untuk kebutuhan sendiri. Variabel dalam penelitian ini merupakan variabel kategorik yang diukur menggunakan skala notasi nilai 1 untuk kategori subjek dengan kondisi kehidupan rumah tangga yang lebih dari cukup, sedangkan nilai 0 untuk kategori subjek dengan kondisi kehidupan rumah tangga yang belum cukup.

6) Etnis

Variabel ini diukur melalui jenis etnis/suku oleh subjek yang diteliti. Namun dalam penelitian kali ini hanya menggunakan beberapa etnis yang termasuk kelompok etnis yang memiliki jumlah perempuan terdidik, yang paling dominan di Indonesia berdasarkan IFLS 5 atau SAKERTI (Survei Aspek Kehidupan Rumah Tangga Indonesia) meliputi : Jawa, Sunda, Minang, Batak, Bali, Betawi, dan Sasak.

Tabel 4.1
Definisi Operasional

No.	Jenis Variabel	Nama Variabel	Sifat Variabel	Skala Pengukuran
1.	Variabel Dependen (Terikat)	Status Ketenagakerjaan Angkatan Kerja Perempuan Terdidik	Variabel Kategorik	1 = <i>Peran Publik</i> 0 = <i>Peran Domestik</i>
2.	Variabel Independen (Bebas)	Usia	Variabel Kategorik	1 = Usia produktif 0 = Usia tidak produktif
		Status Kawin	Variabel Kategorik	1 = Kawin 0 = Belum Kawin
		SMA/SMK/MA/Paket C	Variabel Numerik	Berdasarkan tingkat Pendidikan tinggi yang telah dituntaskan setara dengan SMA/SMK/MA dan Paket C
		Diploma	Variabel Numerik	Berdasarkan tingkat Pendidikan tinggi yang telah dituntaskan setara dengan Diploma (D1/D2/D3)
		Universitas	Variabel Numerik	Berdasarkan tingkat Pendidikan tinggi yang telah dituntaskan setara Perguruan Tinggi (S1/S2/S3)
		Memiliki Tanggungan Anak dibawah 15 tahun	Variabel Kategorik	1 = Memiliki tanggungan anak dibawah 15 tahun 0 = Tidak memiliki tanggungan anak dibawah 15 tahun
		Kondisi Ekonomi Keluarga	Variabel Kategorik	1= Cukup 0 = Belum Cukup
		Etnis Jawa	Variabel Kategorik	1 = Jawa 0 = Bukan Jawa
		Etnis Sunda	Variabel Kategorik	1 = Sunda 0 = Bukan Sunda
		Etnis Minang	Variabel Kategorik	1 = Minang 0 = Bukan Minang
		Etnis Batak	Variabel Kategorik	1 = Batak 0 = Bukan Batak
		Etnis Bali	Variabel Kategorik	1 = Bali 0 = Bukan Bali
		Etnis Betawi	Variabel Kategorik	1 = Betawi 0 = Bukan Betawi
		Etnis Sasak	Variabel Kategorik	1 = Sasak 0 = Bukan Sasak

Sumber: Data diolah berdasarkan IFLS 5, 2018.

4.5 Metode Analisis Penelitian

Sesuai pemaparan yang telah dijelaskan sebelumnya, untuk mencapai tujuan dalam penelitian ini maka metode analisis yang tepat digunakan dalam penelitian ini yaitu model analisis regresi logistik. Model ini digunakan untuk menjelaskan hubungan antara variabel respon yang berupa data dikotomik atau polikotomik dengan variabel bebas berupa data berskala interval dan atau kategorik (Hosmer & Lemeshow, 1989). Prosedur model regresi logistik hampir sama seperti regresi linier berganda, dengan pengecualian bahwa variabel respon adalah binomial (Sperandei, 2014). Variabel yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari dua kategori. Dengan demikian, analisis regresi logistik yang digunakan dalam penelitian ini adalah model *Binary Logistic Regression*.

4.5.1 Model Regresi Logistik Biner (*Binary Logistic Regression*)

Analisis regresi logistik biner digunakan untuk menjelaskan hubungan antara variabel dependen yang berupa data dikotomik/biner dengan variabel independen yang berupa data berskala interval dan atau kategorik. Pada regresi logistik biner (*Binary logistic regression*) variabel respon bertipe kategorikal dua pilihan yaitu berupa variabel dummy (0 dan 1) (Aulia, 2017). Dalam penggunaannya model regresi logistik ini tidak mengharuskan adanya *multivariate normal distribution* sebab tidak perlu asumsi normalitas pada variabel bebasnya. (Ghozali, 2011).

Menurut Hosmer & Lemeshow (1989) fungsi regresi logistik dapat dituliskan sebagai berikut:

$$\pi(x) = \frac{\exp(\beta_0 - \beta_1 x_1 + \dots + \beta_n x_n)}{1 + \exp(\beta_0 + \beta_1 x_1 + \dots + \beta_n x_n)} \quad (4.1)$$

Fungsi regresi logistik membutuhkan transformasi logit agar mampu merubah model tersebut menjadi fungsi linier. Menurut Hosmer and Lemeshow (1989) transformasi logit sebagai fungsi dari $\pi(x)$ dapat dinyatakan dalam model sebagai berikut :

$$\text{logit}[\pi(x)] = \log \left[\frac{\pi(x)}{1-\pi(x)} \right] = g(x) \dots \dots \dots (4.2)$$

Dimana : $g(x) = \beta_0 + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \dots + \beta_n X_n + \sum_{i=1}^{kj=1} \beta_n X_n$

Transformasi logit bertujuan untuk membuat fungsi linear dari parameter-parameternya. Fungsi $g(x)$ linear terhadap parameter dan memiliki range $(-\infty, \infty)$, tergantung dari range variabel prediktor X.

Dalam penelitian ini model binary logit digambarkan dengan variabel dependen angkatan kerja perempuan terdidik di Indonesia, dimana angka 1 dalam model bermakna angkatan kerja perempuan dengan lulusan SMA atau SMK ke atas yang memilih untuk berpartisipasi kedalam pasar kerja (Peran Publik). Angka 0 dalam variabel dependen ini bermakna perempuan terdidik dengan lulusan SMA atau SMK ke atas yang memutuskan untuk tidak berpartisipasi kedalam pasar kerja (Peran Domestik). Sedangkan variabel independen meliputi aspek sosial (usia, status kawin, tingkat pendidikan), aspek ekonomi (tanggungan anak dibawah 15 tahun dan kondisi ekonomi rumah tangga) serta karakteristik etnis (Jawa, Sunda, Minang, Batak, Bali, Betawi, dan Sasak).

Dengan demikian, model regresi logistik pada penelitian ini adalah sebagai berikut :

$$Y_i = \text{Log} \left[\frac{\pi(x)}{1-\pi(x)} \right] = \beta_0 + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_n X_i + u_i \dots \dots \dots (4.3)$$

Dimana :

Y_i = Variabel dependen dummy, angka 1 dalam model bermakna perempuan terdidik yang memutuskan untuk bekerja maupun sedang mencari pekerjaan yang termasuk dalam golongan angkatan kerja (*Peran Publik*). Sedangkan Angka 0 dalam variabel dependen ini bermakna perempuan terdidik yang memutuskan untuk tidak masuk ke pasar kerja karena memilih mengurus rumah tangga atau tergolong bukan angkatan kerja (*Peran Domestik*).

X_i = Variabel independent

β = Koefisien variabel independen

ϵ_j : Error term

Dengan demikian, berdasarkan pada persamaan 4.3 tersebut, maka Model regresi logistik biner dalam penelitian ini adalah sebagai berikut

Y_1 : Probabilitas memilih kejadian 1 (*Peran Publik*)

Y_0 : Probabilitas memilih kejadian 0 (*Peran Domestik*)

❖ Peluang perempuan terdidik untuk tergolong angkatan kerja

(*Peran Publik*):

$$Y_1 = \beta_1 + \beta_{11}X_{1i} + \beta_{21}X_{2i} + \beta_{31}X_{3i} + \beta_{41}X_{4i} + \beta_{51}X_{5i} + \beta_{61}X_{6i} + \beta_{71}X_{7i} + \beta_{81}X_{8i} + \beta_{91}X_{9i} + \beta_{101}X_{10i} +$$

$$\beta_{111}X_{11i} + \beta_{121}X_{12i} + \beta_{131}X_{13i} + \beta_{141}X_{14i} \epsilon_i \dots (4.4)$$

❖ Peluang perempuan terdidik yang tergolong bukan angkatan kerja

(*Peran Domestik*):

$$Y_0 = \beta_2 + \beta_{12}X_{1i} + \beta_{22}X_{2i} + \beta_{32}X_{3i} + \beta_{42}X_{4i} + \beta_{52}X_{5i} + \beta_{62}X_{6i} + \beta_{72}X_{7i} + \beta_{82}X_{8i} + \beta_{92}X_{9i} + \beta_{102}X_{10i} +$$

$$\beta_{112}X_{11i} + \beta_{122}X_{12i} + \beta_{132}X_{13i} + \beta_{142}X_{14i} \epsilon_i \dots (4.5)$$

Keterangan :

Y_{1i} : Perempuan terdidik berpartisipasi kedalam pasar kerja (**Peran Publik**)

Y_{2i} : Perempuan terdidik tidak berpartisipasi kedalam pasar kerja (**Peran Domestik**)

X_1 : Usia

X_2 : Status Perkawinan

X_3 : SMA/SMK/MA/Paket C

X_4 : Diploma

X_5 : Universitas

X_6 : Tanggungan Anak 15 tahun

X_7 : Kondisi Rumah Tangga

X_8 : Etnis Jawa

X_9 : Etnis Sunda

X_{10} : Etnis Minang

X_{11} : Etnis Batak

X_{12} : Etnis Bali

X_{13} : Etnis Betawi

X_{14} : Etnis Sasak

β_0 : Konstanta / Intersep

ϵ_j : *Error term*

Dalam model ini tidak dilakukan uji normalitas, sebab pada model regresi logistik variabel bebas merupakan campuran antara metrik dan non metrik sehingga tidak dapat memenuhi asumsi multivariate normal distribution (Ghozali, 2011).

Dalam melakukan analisis binary logistic diperlukan melalui beberapa tahapan pengujian terlebih dahulu. Adapun dalam model regresi logistik beberapa pengujian yang akan dilakukan meliputi :

1) Deteksi Multikolinearitas

Langkah awal yang dilakukan dalam model regresi logistik adalah mendeteksi multikolinearitas untuk mengetahui ada tidaknya hubungan linear antar variabel prediktor. Apabila antar variabel prediktor terindikasi multikolinearitas maka akan sulit mengetahui pengaruh masing-masing peubah penjelas terhadap peubah respon. Menurut Gujarati (2013) untuk mendeteksi

multikolinieritas pada model dapat diketahui melalui nilai VIF (*Variance Inflation Factors*) dengan persamaan sebagai berikut :

$$VIF_k = \frac{1}{1 - R_k^2}$$

Dalam model tersebut dapat dijelaskan bahwa k adalah variabel prediktor dan merupakan koefisien determinasi untuk prediktor ke- k . Dengan demikian akan didapatkan nilai VIF sebanyak variabel predictor tersebut. Apabila nilai $VIF > 10$ mengindikasikan bahwa terdapat multikolinieritas antar variabel prediktor.

2) Pengujian Kesesuaian Model (*Goodness Of Fit*)

Uji kesesuaian model sangat diperlukan sebab ketika membuat model harus dinilai seberapa baik data itu atau seberapa cocok model dengan data (Rodríguez, 2007). Ditinjau dari beberapa literatur, pada model regresi logistik kecocokan model dapat diketahui melalui uji *Hosmer & Lemeshow Goodness of Fit* atau uji *Pearson*. Hipotesis pada *Hosmer & Lemeshow Goodness of Fit* dapat ditulis sebagai berikut:

H_0 : Tidak ada perbedaan yang nyata antara klasifikasi yang diprediksi dengan klasifikasi yang diamati

H_1 : Terdapat perbedaan yang nyata antara klasifikasi yang diprediksi dengan klasifikasi yang diamati.

Uji *Hosmer* dan *Lemeshow* yang ditulis dengan uji \hat{C} , dihitung berdasarkan taksiran probabilitas (Hosmer & Lemeshow, 1989). Dimana model Hosmer dan Lemeshow dapat dirumuskan sebagai berikut:

$$\hat{C} = \sum_{r=1}^g \frac{(O_r - n' r P_{1r})^2}{n' r P_{1r} (O_r - P_{1r})'}$$

Di mana P_{1r} menyatakan rata-rata taksiran probabilitas sukses kelompok ke- r , O_r merupakan jumlah sampel kejadian sukses dalam kelompok ke- r ,

Sedangkan n_r adalah total sampel kelompok ke- r , dan π_r dengan $r = 1, 2, \dots, g$.

Statistik uji C mendekati distribusi Chi-Square dengan derajat bebas $g-2$ (Utomo, 2009).

Apabila nilai *Hosmer and Lemeshow Test* kurang dari 5% maka hipotesis nol ditolak. Hal ini berarti terdapat perbedaan yang signifikan antara klasifikasi yang diprediksi dengan klasifikasi yang diamati, sehingga dapat dikatakan model tidak baik karena model tidak dapat memprediksi nilai observasinya. Namun, jika nilai statistik *Hosmer and Lemeshow Test* lebih besar dari 5% maka H_0 diterima, yang berarti model mampu memprediksi nilai observasinya (Ghozali, 2011).

3) Pengujian Estimasi Parameter

Penaksiran parameter dari variabel prediktor dilakukan untuk mengetahui pengaruh signifikansi taksiran parameter yang diperoleh terhadap model, dan seberapa besar pengaruh masing-masing parameter tersebut terhadap model. Uji signifikansi terdiri dari dua tahap yaitu uji signifikansi parameter model secara simultan dan parsial. Uji signifikansi parameter model secara simultan dilakukan dengan uji rasio *Maximum likelihood*. Sedangkan untuk menguji signifikansi parameter model secara parsial dapat digunakan metode *Uji Wald Chi-square*.

Menurut Hosmer dan Lemeshow (1989), rasio *Maximum Likelihood G* adalah fungsi dari L_0 dan L_1 yang berdistribusi (*Chi-square*) dengan derajat bebas p (jumlah variabel prediktor yang ada dalam model). Penaksiran parameter dalam model regresi logistic dilakukan melalui metode *Maximum Likelihood* yang diperoleh dari menurunkan fungsi kepekatan peluang bersama (Hosmer & Lemeshow, 1989).

Bentuk umum dari *Maximum Likelihood* adalah sebagai berikut (Cook, Dixon, & et.all, 2001) :

$$G = -2(L_0 - L_1)$$

Di mana L_0 merupakan *log-likelihood* pada model tanpa variabel prediktor.

Dan L_1 adalah *log-likelihood* dari model dengan p variabel prediktor. Hipotesis nolnya adalah $k \beta = 0$, untuk semua $k = 1, 2, \dots, p$, dengan kata lain bahwa semua variabel prediktor tidak signifikan terhadap model. Dengan kata lain, Hipotesis nol ditolak jika $G > X^2_{(\alpha; p)}$. Apabila nilai prediksi ketika variabel prediktor di dalam model lebih baik daripada ketika variabel tersebut tidak disertakan dalam model, maka dapat dikatakan variabel signifikan di dalam model (Utomo, 2009).

Sedangkan untuk menguji signifikansi parameter model secara parsial dapat digunakan metode *Uji Wald Chi-square* dengan hipotesis sebagai berikut:

$$H_0 : \beta_1 = 0 \text{ (peubah penjelas ke-} i \text{ tidak mempengaruhi peubah respon)}$$

$$H_1 : \beta_1 \neq 0 \text{ (peubah penjelas ke-} i \text{ mempengaruhi peubah respon)}$$

Menurut Agresti (1990) uji wald dapat dirumuskan sebagai berikut :

$$W_k = \left[\frac{\beta_k}{SE(\beta_k)} \right]^2, \text{ dengan } k = 1, 2, \dots, p$$

Uji Wald dikatakan mendekati distribusi *Chi-square* dengan derajat bebas 1.

Dalam model ini, hipotesis nol adalah $\beta_k=0$, untuk setiap $k= 1, 2, \dots, p$. Dengan kata lain, bahwa variabel prediktor k tidak signifikan terhadap model. Hipotesis nol ditolak apabila $W_k > X^2_{(\alpha; 1)}$.

4) Interpretasi Parameter Regresi Logistik

Pada regresi logistik, interpretasi parameter digunakan untuk mengetahui makna dari nilai taksiran parameter pada variabel prediktor. Pada regresi logistik interpretasi parameter dapat diketahui melalui rasio *odds*, (Hosmer & Lemeshow, 1989). Rasio *Odds* adalah parameter yang digunakan untuk melihat kecenderungan pengaruh peubah-peubah penjelas terhadap peubah respon (Hosmer & Lemeshow, 1989). Dengan demikian rasio *Odds* untuk $x = 1$ dan $x = 0$ adalah :

$$\frac{p(1)}{1-p(1)} \text{ dan } \frac{p(0)}{1-p(0)} \dots \dots \dots (4.6)$$

Rasio *Odds* merupakan perbandingan nilai *odds* untuk kategori $X = 1$ terhadap *odds* untuk kategori $X = 0$, dalam variabel prediktor yang sama dengan menganggap variabel prediktor lainnya konstan. Pada model rasio *Odds* dinyatakan dengan ψ dan dituliskan sebagai berikut :

$$\psi = \frac{\left(\frac{p(1)}{1-p(1)} \right)}{\left(\frac{p(0)}{1-p(0)} \right)} \dots \dots \dots (4.7)$$

Menurut Utomo (2009) pada rasio *Odds* kehadiran variabel x dengan nilai 1 akan memberikan nilai ψ kali dibanding x dengan nilai 0 untuk menghasilkan kejadian sukses $Y = 1$. Interpretasi parameter regresi logistik dari variabel kontinu dapat dilakukan dengan mengasumsikan fungsi logit linear terhadap variabel prediktor. (Utomo, 2009).

BAB V

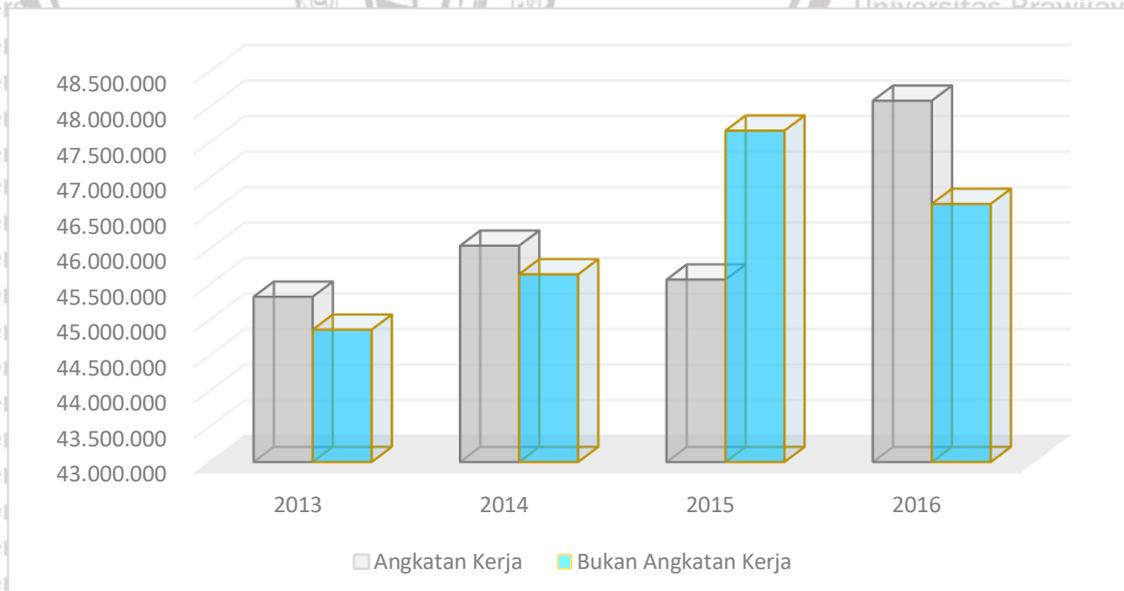
HASIL DAN PEMBAHASAN

5.1 Gambaran Angkatan Kerja Perempuan Terdidik di Indonesia

Bonus Demografi yang terjadi saat ini menunjukkan bahwa Indonesia tengah berada pada kondisi dimana jumlah penduduk usia produktif lebih besar dibandingkan dengan penduduk usia non produktif. Peningkatan jumlah penduduk usia produktif tersebut secara tidak langsung mendorong peningkatan jumlah angkatan kerja perempuan di Indonesia. Bonus Demografi dapat memberikan keuntungan ekonomi khususnya bagi perempuan, sebab pada era ini jumlah tingkat kelahiran anak yang semakin sedikit memungkinkan perempuan untuk memasuki pasar kerja dan memberi kontribusi terhadap pendapatan keluarga (Maryati, 2015). Berikut adalah gambar yang menunjukkan proporsi penduduk perempuan di Indonesia yang telah mencapai usia produktif yaitu 15-64 tahun :

Gambar 5.1

Jumlah Penduduk Perempuan Usia Produktif di Indonesia



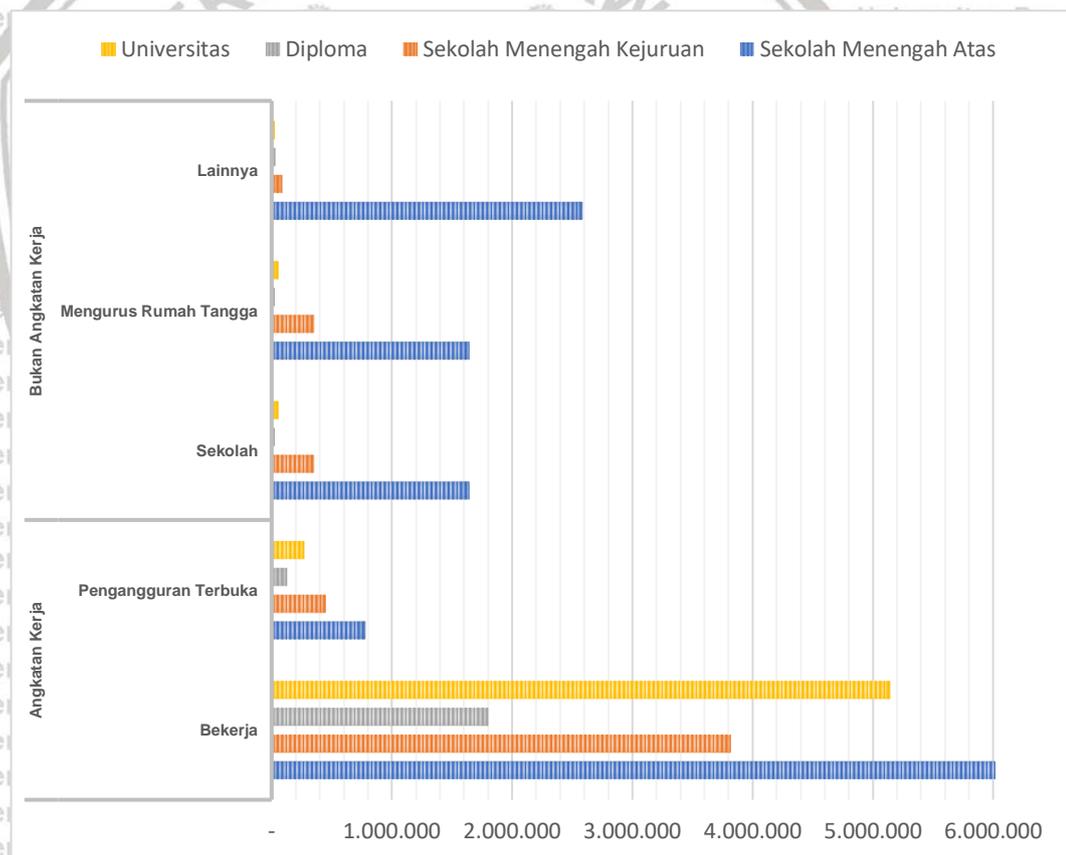
Sumber: Keadaan Angkatan Kerja di Indonesia, BPS (2018). Data diolah.

Menurut BPS (2018) yang disebut dengan angkatan kerja (*economically active*) adalah penduduk usia kerja yang sedang bekerja (punya pekerjaan namun sementara tidak bekerja) dan pengangguran. Sedangkan definisi dari bukan angkatan kerja (*not economically active*) ialah penduduk usia kerja yang kegiatan utamanya sekolah, mengurus rumah tangga, atau melaksanakan kegiatan lainnya selain kegiatan pribadi. Gambar 5.1 menunjukkan bahwa pada tahun 2013 hingga tahun 2016 penduduk usia produktif di Indonesia cenderung untuk memutuskan menjadi angkatan kerja (*economically active*). Namun pada tahun 2015, proporsi perempuan yang memutuskan untuk tidak masuk ke pasar kerja terbilang cukup tinggi jika dibandingkan beberapa tahun lainnya. Hal ini dikarenakan pada tahun 2015 jumlah perempuan yang bekerja mengalami tingkat penurunan hingga mencapai kurang lebih dua juta jiwa jika dibanding tahun 2014. Sebaliknya, perempuan yang memutuskan untuk mengurus rumah tangga mengalami lonjakan yang cukup signifikan yaitu mencapai sekitar 36.173.547 jiwa, dibandingkan dengan tahun sebelumnya hanya mencapai 34 juta jiwa. Pada tahun 2016 jumlah angkatan kerja perempuan juga cukup mengalami peningkatan yang signifikan, hal ini sebagai bentuk perwujudan dari tercapainya salah satu program PBB dalam *Millenium Development Goals* 2015 yang mempromosikan kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan sehingga mampu mendorong peran aktif perempuan dalam sektor publik. Perubahan keputusan perempuan tersebut menunjukkan bahwa perempuan seringkali dihadapkan pada pilihan antara peran tradisi (*domestik sphere*) dan peran transisi (*public sphere*).

Tingkat partisipasi angkatan kerja perempuan selalu lebih rendah apabila dibandingkan dengan partisipasi kerja laki-laki, hal ini dipandang karena masih melekatnya persepsi tradisional di masyarakat yang menyatakan bahwa laki-laki dianggap pencari nafkah yang utama bagi keluarga (Simanjuntak, 2001). Sejalan

dengan *Sustainable Development Goals* (SDGs), di mana salah satu tujuan dari SDGs adalah mendorong kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan dalam hal pendidikan. Faktor pendidikan dan keputusan perempuan untuk memasuki pasar kerja mempunyai keterkaitan yang cukup erat. Pendidikan dianggap mampu meningkatkan aspirasi dan harapan perempuan terkait status ekonomi dan kehidupan yang lebih baik, hal ini lebih mendorongnya untuk masuk angkatan kerja (Hakim, 2011). Hal tersebut juga didukung dengan data dari BPS (2018) yang ditunjukkan pada gambar berikut:

Gambar 5.2
Status Angkatan Kerja Perempuan Berdasarkan Tingkat Pendidikan Tinggi Di Indonesia



Sumber: (Badan Pusat Statistik, 2016).

Pada gambar 5.2 dapat diketahui bahwa perempuan yang berpendidikan tinggi lebih cenderung memutuskan untuk masuk ke pasar kerja atau berstatus sebagai angkatan kerja. Data BPS menunjukkan perbandingan jumlah perempuan yang bersatus angkatan kerja rata-rata sebesar 19.246.924 jiwa, sedangkan yang berstatus bukan angkatan kerja mencapai sekitar 6.909.585 jiwa (Badan Pusat Statistik, 2016). Jika dilihat secara umum, perempuan dengan pendidikan SMA lebih mendominasi. Sebaliknya, perempuan dengan pendidikan tinggi Diploma terbilang cukup rendah. Pada status angkatan kerja yang tergolong bekerja masih didominasi oleh perempuan dengan pendidikan SMA dan Universitas. Tingginya tingkat kelulusan SMA nyatanya juga mendorong jumlah pengangguran perempuan terdidik di Indonesia, dimana pengangguran perempuan lulusan SMA mencapai 784.926 jiwa. Hasil tersebut sesuai pendapat Sarkar (2008) yang menyatakan dalam beberapa tahun terakhir, ada indikasi bahwa peningkatan lebih cepat dalam bidang pendidikan justru telah menyebabkan tingkat pengangguran perempuan yang lebih tinggi.

Kendala yang dihadapi saat ini dalam hal mendapatkan pendidikan tinggi menjadi masalah bagi beberapa kalangan masyarakat terutama bagi para perempuan. Beberapa perempuan menyatakan diminta oleh orang tua mereka untuk menikah setelah lulus dari Sekolah Menengah Atas (SMA), karena menganggap pendidikan bagi kaum perempuan bukan menjadi hal yang utama (Putranto, 2018). Dengan demikian, perempuan terdidik berada pada pilihan sukses berkarier sebagai upaya pengembalian atas modal pendidikan tinggi yang telah dikeluarkan, atau menikah dan menjadi ibu rumah tangga yang baik sebagai bentuk peran tradisi. Padahal disisi lain, data BPS (2018) justru menunjukkan bahwa kontribusi perempuan terhadap pendapatan keluarga selalu meningkat setiap tahunnya. Gambaran lebih lengkap dapat dilihat pada gambar berikut:

Gambar 5.3
Kontribusi Pendapatan Perempuan di Indonesia pada Tahun 2011-2017
(dalam Persen)



Sumber: (BPS, 2018)

Gambar 5.3 menunjukkan kontribusi perempuan dalam menunjang perekonomian keluarga selalu meningkat signifikan setiap tahunnya. Pada tahun 2011, perempuan di Indonesia menyumbang rata-rata sebesar 34,16 % terhadap pemenuhan kebutuhan ekonomi keluarganya. Angka tersebut terus mengalami peningkatan yang cukup signifikan pada tahun 2017 mencapai angka 36,62%.

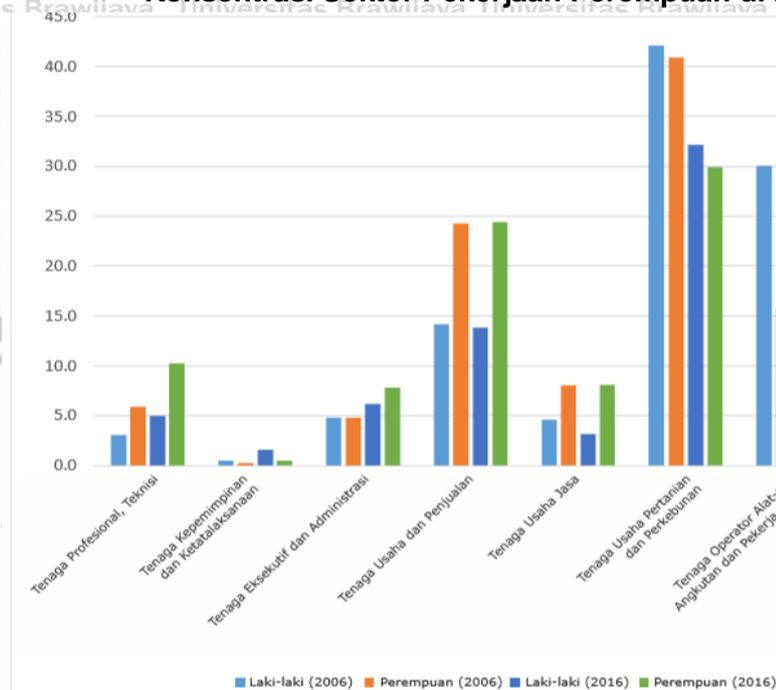
Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa partisipasi perempuan dalam angkatan kerja di Indonesia tidak dapat dikesampingkan dan sudah selayaknya mendapat perhatian dari pemerintah. Hal ini mengingat walaupun kontribusi perempuan terhadap pendapatan keluarga cukup besar namun dalam kenyataannya angka partisipasi kerja perempuan masih terbilang jauh lebih rendah dibandingkan dengan laki-laki.

Dilihat dari berbagai sektor bidang kerja perempuan juga dianggap belum mampu bersaing dengan laki-laki, sebab ada beberapa bidang pekerjaan yang memang menuntut keahlian dan dikhususkan bagi kaum laki-laki. Hal yang demikian lah yang menyebabkan pekerja perempuan hanya terkonsentrasi

dibeberapa bidang tertentu. Namun *International Labour Organization* (2017) menunjukkan jika jumlah pekerja perempuan yang bekerja pada pekerjaan yang membutuhkan keterampilan dan pendidikan tinggi telah mengalami peningkatan.

Hal tersebut dapat dilihat pada gambar berikut:

Gambar 5.4
Konsentrasi Sektor Pekerjaan Perempuan di Indonesia



Sumber: (International Labour Organization, 2017)

Pada gambar 5.4 terlihat bahwa perempuan di Indonesia masih terkonsentrasi bekerja di sektor tenaga usaha dan penjualan dan pertanian. Dalam sektor usaha dan penjualan, proporsi perempuan pada 2016 lebih tinggi 24,4% dibandingkan laki-laki. Pada tahun 2016 persentase perempuan bekerja sebagai profesional/teknisi juga mengalami peningkatan (10,3%). Adanya berbagai program dari pemerintah yang mendorong akses pendidikan dan kesetaraan gender dalam hal tenaga kerja diharapkan akan selalu mampu untuk menunjang kemampuan perempuan di Indonesia agar dapat meningkatkan perannya dipasar kerja dan tidak hanya terkonsentrasi pada sektor tertentu.

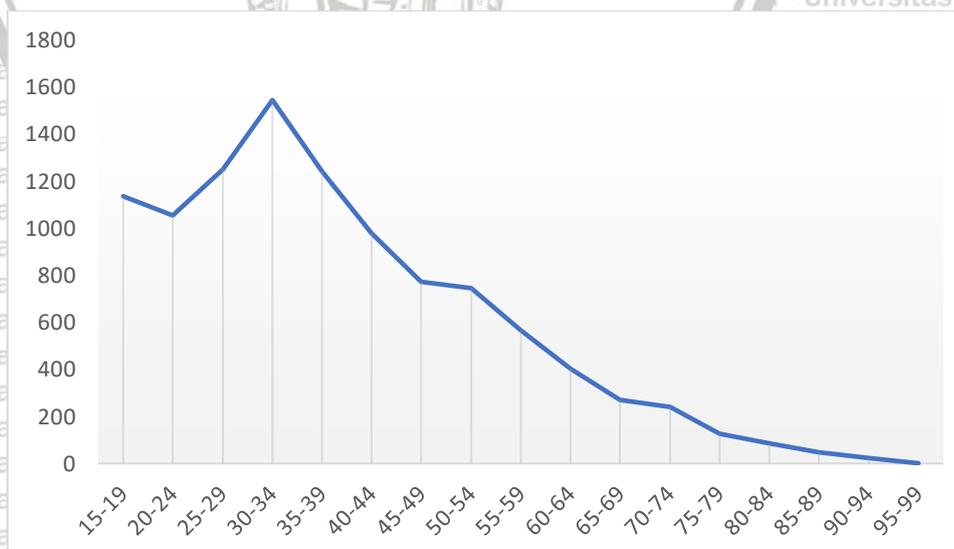
5.2 Gambaran Umum Responden

Pada bagian ini akan dijelaskan gambaran responden yang digunakan dalam penelitian yang bersumber dari IFLS 5. Jumlah responden dalam penelitian ini yaitu 18,831 responden yang merupakan penduduk perempuan yang telah mengenyam pendidikan tinggi yaitu tingkat SMA hingga perguruan tinggi. Dalam bagian ini juga akan dijelaskan gambaran umum responden menurut karakteristik sosial (usia, status kawin, tingkat pendidikan tinggi), dan karakteristik ekonomi (tanggung jawab anak dibawah 15 tahun dan kondisi ekonomi rumah tangga) serta karakteristik etnis (Jawa, Sunda, Minang, Batak, Bali, Betawi, dan Sasak).

5.2.1 Usia

Perempuan di Indonesia yang tergolong angkatan kerja berdasarkan data IFLS 5 Tahun 2015 berada pada kelompok usia mulai dari 15 tahun hingga 96 tahun. Sebagaimana dapat dilihat pada gambar berikut ini:

Gambar 5.5
Angkatan Kerja Perempuan Tahun 2015 Berdasarkan
Kelompok Usia



Sumber: IFLS (2015), diolah.

Pada gambar 5.5 menunjukkan bahwa perempuan di Indonesia tahun 2015 menurut kelompok umur membentuk sebuah pola sesuai dengan teori *age earning profile*. Bagi perempuan berusia muda, harga rehat dianggap relative rendah bagi seseorang yang berusia muda. Angka partisipasi kerja perempuan terdidik pada kelompok usia muda 15-19 tahun dapat dikatakan cukup tinggi hingga mencapai 1135 individu. Hal ini disebabkan pada usia tersebut seorang perempuan telah mengenyam pendidikan setara SMA/SMK dan dianggap siap untuk memasuki pasar kerja namun memandang pasar kerja masih belum sebagai suatu keharusan. Hal ini disebabkan pada perempuan kelompok usia 15-19 tahun, mereka akan dihadapkan pada pilihan memasuki pasar kerja atau melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi.

Sebaliknya, dalam kategori *prime age working years* (usia prima bagi pekerja) akan lebih memilih menghabiskan waktunya untuk bekerja. Ketika seseorang sudah bertambah usia dan tergolong *prime age working years*, maka mereka akan cenderung memandang pasar kerja sebagai sebuah keharusan karena mulai menyadari adanya tanggung Jawab yang juga semakin besar untuk memberi nafkah keluarga (Pratomo, 2017). Hal ini dapat terlihat pada gambar yang menunjukkan angka partisipasi kerja perempuan di Indonesia meningkat cukup signifikan yaitu pada kelompok usia 20-24 tahun dan kelompok usia 25-29 tahun, kemudian mencapai puncaknya pada kelompok usia 30-34 tahun yaitu sebanyak 1544 individu. Tingkat partisipasi penduduk meningkat seiring dengan perkembangan umur. Namun demikian pada umur tertentu tingkat partisipasi mencapai titik optimal kemudian menurun hingga titik terendah, terutama pada kelompok umur 60 tahun keatas (Hidayat & Hadi, 2017).

Dalam penelitian ini usia perempuan terdidik digolongkan dalam dua kategori yaitu usia produktif dan usia non produktif seperti table berikut:

Tabel. 5.1

Tabulasi Silang Status Angkatan Kerja Perempuan dan Kelompok Usia

KELOMPOK USIA	ANGKATAN KERJA	BUKAN ANGKATAN KERJA	TOTAL
Usia Produktif (%)	9,688 (56%)	7,628 (44%)	17316 (100%)
Usia Non Produktif (%)	798 (53%)	717 (47%)	1515 (100%)

Sumber: IFLS (2015), diolah.

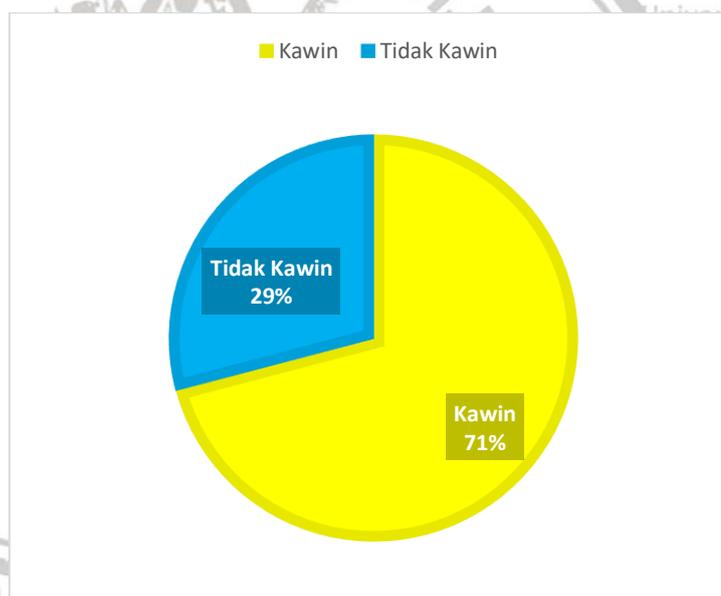
Pada table 5.1 menunjukkan bahwa sebanyak 17.316 perempuan terdidik di Indonesia termasuk dalam penduduk usia produktif. Hal ini berarti perempuan di Indonesia pada usia produktif lebih dominan dibanding perempuan usia non produktif. Perempuan terdidik yang tergolong usia produktif ialah perempuan yang berada pada usia 15-64 tahun. Sedangkan perempuan terdidik yang tergolong usia non produktif ialah perempuan kelompok usia 15 tahun ke bawah dan di atas usia 64 tahun. Pada tabel juga menunjukkan bahwa 56% perempuan terdidik yang termasuk kelompok usia produktif lebih banyak yang memutuskan untuk masuk ke dalam pasar kerja atau tergolong sebagai angkatan kerja. Keterkaitan antara usia dengan tingkat partisipasi angkatan kerja perempuan terdidik yaitu usia tenaga kerja berkaitan langsung dengan kondisi fisik seorang dalam melakukan kegiatannya. Semakin tua usia perempuan maka kondisi fisiknya semakin menurun sehingga akan berpengaruh pada produktivitas kerja.

5.2.2 Status Kawin

Pada data IFLS waves-5 2015, variabel status perkawinan memiliki enam kategori yaitu belum kawin, kawin, berpisah, cerai hidup, cerai mati dan hidup bersama. Namun pada penelitian ini status kawin akan dispesifikan menjadi dua kategori yaitu kategori kawin dan tidak kawin. Kategori kawin yang terdiri dari perempuan yang berstatus kawin. Sedangkan kategori tidak kawin terdiri dari perempuan yang berstatus belum kawin, berpisah, cerai hidup, cerai mati dan hidup bersama. Presentase kedua kategori dapat dilihat pada gambar berikut :

Gambar 5.6

Presentase Status Kawin Angkatan Kerja Perempuan di Indonesia Tahun 2015



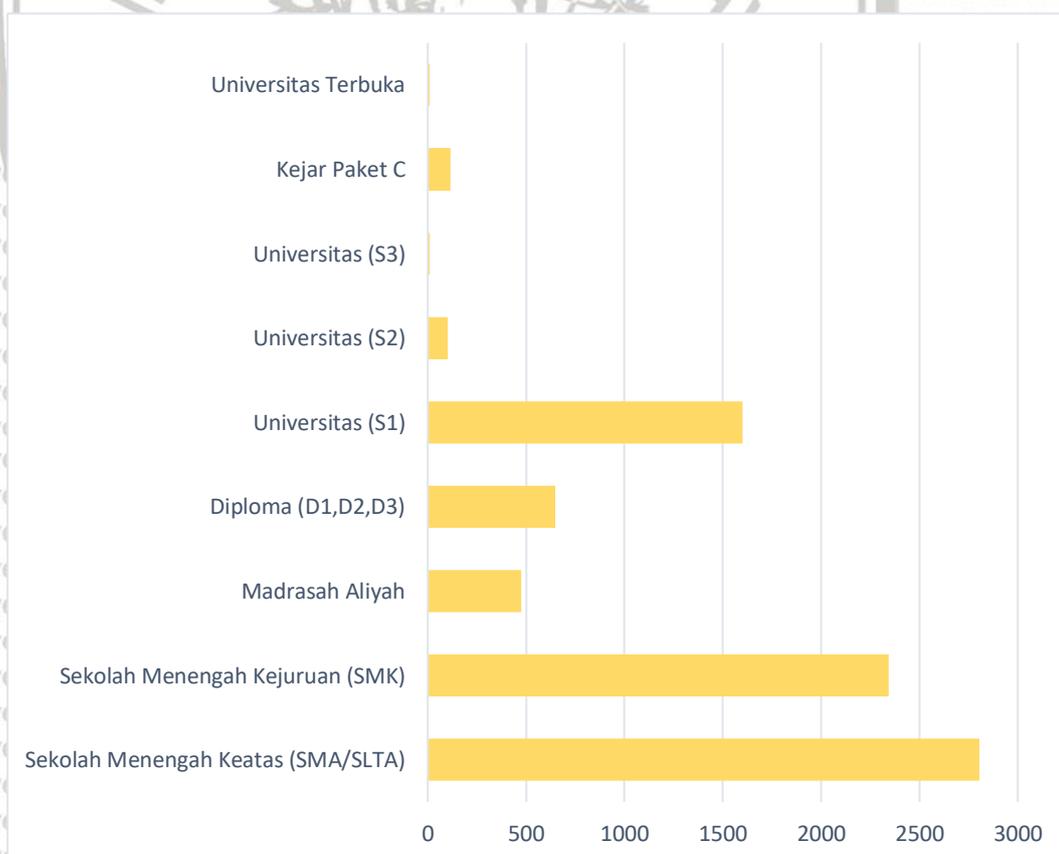
Sumber: IFLS (2015), diolah.

Gambar 5.6 menunjukkan bahwa angkatan kerja perempuan di Indonesia lebih banyak yang berstatus telah kawin dibandingkan yang tidak kawin. Berdasarkan data IFLS5 tahun 2015 dari jumlah sample 18.361 responden, 71% perempuan terdidik telah berstatus kawin. Sedangkan sisanya yang termasuk kategori tidak kawin terdapat 29% atau sebanyak 3.052 responden.

5.2.3 Tingkat Pendidikan

Sample yang digunakan pada penelitian ini hanya berfokus pada kategori angkatan kerja perempuan terdidik. Menurut BPS (2017) yang termasuk kategori angkatan kerja terdidik ialah yang memiliki latar belakang pendidikan tinggi yaitu minimal Sekolah Menengah Atas (SMA) hingga perguruan tinggi. Hal ini dianggap dapat menggambarkan peningkatan kualitas sumberdaya manusia karena pendidikan dianggap sebagai *human investment*. Berikut adalah diagram angkatan kerja perempuan di Indonesia berdasarkan tingkat pendidikan tinggi yang telah dituntaskan:

Gambar 5.7
Angkatan Kerja Perempuan Menurut Pendidikan Tinggi di Indonesia Tahun 2015



Sumber: IFLS (2015), diolah.

Berdasarkan data IFLS 5 mayoritas angkatan kerja perempuan terdidik adalah tamatan SMA/SLTA yaitu sebanyak 16,62% atau sekitar 1285 responden.

Selanjutnya untuk tamatan SMK yaitu sebanyak 2344 responden atau setara dengan 13,89%. Sebaliknya, minoritas angkatan kerja perempuan terdidik adalah perempuan dengan latar belakang pendidikan S3 yaitu sebanyak 0,05% atau 9 responden.

Dalam penelitian ini, untuk memudahkan melihat proporsi angkatan kerja berdasarkan pendidikan tinggi maka responden dikelompokkan berdasarkan tiga kelompok tingkat pendidikan tinggi yang setara yaitu kelompok SMA/SMK/MA/dan Paket C, kemudian kelompok Diploma yaitu setara D1/D2/D3, serta kelompok universitas atau perguruan tinggi yaitu S1/Universitas Terbuka/S2/S3. Untuk lebih rinci, tabulasi silang responden angkatan kerja perempuan berdasarkan tingkat Pendidikan dapat dilihat pada table berikut ini:

Tabel 5.2

Tabulasi Silang Status Angkatan Kerja Perempuan dan Tingkat Pendidikan Tinggi

TINGKAT PENDIDIKAN TINGGI	ANGKATAN KERJA	BUKAN ANGKATAN KERJA	TOTAL
SMA/SMK/MA/Paket C (Dalam Persen)	3257 (57%)	2481 (43%)	5738 (100%)
Diploma (Dalam Persen)	413 (64%)	235 (36%)	648 (100%)
Universitas (Dalam Persen)	1198 (69%)	527 (31%)	1725 (100%)

Sumber: IFLS (2015), diolah.

Pada Tabel 5.2 menunjukkan bahwa status angkatan kerja di Indonesia, mayoritas adalah perempuan dengan latar belakang pendidikan setara dengan SMA/SMK/MA/Paket C yaitu sebanyak 3257 individu. Angkatan kerja perempuan dengan latar belakang pendidikan perguruan tinggi mencapai hingga sekitar 1198.

Sedangkan perempuan dengan latar belakang diploma adalah yang paling sedikit dibandingkan dengan tingkatan lainnya yaitu hanya sekitar 413 individu. Hal ini dikarenakan kesempatan kerja untuk perempuan dengan latar belakang pendidikan diploma cenderung lebih kecil di pasar kerja berbeda halnya dengan kesempatan kerja untuk perempuan terdidik dengan latar belakang pendidikan SMA/SMK.

5.2.4 Tanggungan anak dibawah 15 tahun

Bagi keluarga di Indonesia memiliki anak merupakan sebuah berkah tersendiri. Sehingga muncul persepsi yang mendorong setiap keluarga untuk memiliki anak. Bahkan terdapat sebuah tradisi yang menyatakan “banyak anak banyak rejeki”. Namun meningkatnya jumlah anak yang dimiliki dalam sebuah keluarga terutama pada usia dibawah 15 tahun, maka tentu meningkat pula beban tanggungan dalam keluarga tersebut (Dewi, 2012). Berikut dapat dilihat proporsi perempuan yang memiliki anak dibawah usia 15 tahun di Indonesia pada gambar dibawah ini:

Gambar 5.8

Proporsi Perempuan berdasarkan Tanggungan Anak Usia dibawah 15 Tahun di Indonesia



Sumber: IFLS (2015), diolah.

Pada gambar diatas dapat dilihat bahwa menurut data IFLS5 tahun 2015, sekitar 55% perempuan di Indonesia memiliki anak dibawah usia 15 tahun.

Sedangkan sisanya 45% perempuan di Indonesia tidak memiliki anak usia dibawah 15 tahun. Tinggi nya angka perempuan yang memiliki jumlah anak dibawah 15 tahun tersebut menunjukkan bahwa beban yang ditanggung dalam keluarga cenderung lebih besar, sebab pada anak usia dibawah 15 tahun beban ekonomi masih ditopang oleh orang tua. Anak usia dibawah 15 tahun dianggap belum mampu untuk memenuhi kebutuhannya sendiri sehingga masih harus bergantung terhadap orang tua dan menjadi beban tambahan bagi ekonomi keluarga.

Adanya tanggungan anak dalam keluarga tanpa diimbangi dengan peningkatan dari segi ekonomi akan mengharuskan anggota keluarga selain pihak laki-laki sebagai kepala keluarga untuk mencari nafkah (Simanjuntak, 2001). Dengan kata lain, tanggungan anak dalam keluarga juga dapat menentukan keputusan perempuan untuk bekerja akibat dari semakin meningkatnya beban ekonomi yang mengharuskan perempuan untuk berkontribusi terhadap pendapatan keluarga. Hal tersebut juga dapat digambarkan pada table dibawah ini yang menunjukkan bahwa perempuan yang tidak memiliki anak dibawah 15 tahun cenderung untuk memutuskan masuk ke pasar kerja.

Tabel 5.3

Tabulasi Silang Status Angkatan Kerja Perempuan dan Tanggungan Anak Dibawah 15 tahun

STATUS KEPEMILIKAN ANAK	ANGKATAN KERJA	BUKAN ANGKATANKERJA	TOTAL
Memiliki Anak dibawah 15 tahun (Dalam Persen)	4982 (59%)	3441 (41%)	8423 (100%)
Tidak Memiliki Anak dibawah 15 tahun (Dalam Persen)	5504 (53%)	4904 (47%)	10408 (100%)

Sumber: IFLS (2015), diolah.

Semakin meningkatnya angka partisipasi perempuan dalam dunia karir maka pemikiran untuk mempunyai banyak anak semakin berkurang. Hal ini dapat dilihat pada table 5.3 yang menunjukkan bahwa mayoritas perempuan yang tergolong angkatan kerja adalah perempuan yang tidak memiliki anak dibawah 15 tahun yaitu sebanyak 5504 individu. Semakin besar proporsi anggota keluarga yang belum bekerja akan mendorong perempuan untuk mencari tambahan pendapatan dalam keluarga guna memenuhi kebutuhan ekonominya. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa jumlah tanggungan anak dalam keluarga mampu mendorong perempuan untuk memutuskan masuk di pasar kerja (Dewi, 2012).

5.2.5 Kondisi Ekonomi Rumah Tangga

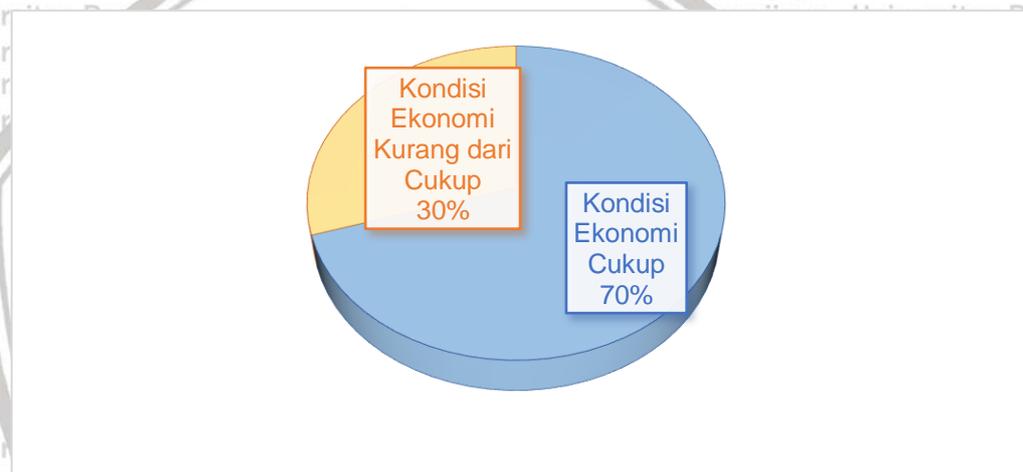
Pada kuisisioner data *IFLS waves-5* 2015, Kriteria kondisi ekonomi dikatakan cukup dalam *IFLS* didasarkan pada pertanyaan kepada responden perihal kondisi kehidupan rumah tangga yang diajukan secara subjektif. Berdasarkan *overview IFLS wave 5* dinyatakan terdapat enam skala dalam penilaian kondisi kehidupan rumah tangga yang hampir sama dengan *Russian Living Standards Monitoring Survey*, dimana seorang responden akan menempatkan posisi kehidupan rumah tangga mereka kedalam kondisi paling miskin atau kondisi sangat kurang dari cukup yang berada di point 1 sedangkan yang memiliki kondisi lebih dari cukup di point 6 (RAND Labor And Population, 2016). Mengacu pada penilaian skala ordinal tersebut, pada kuisisioner *IFLS 5* menunjukkan kondisi ekonomi keluarga memiliki tiga kategori yaitu kondisi ekonomi lebih dari cukup, kondisi ekonomi yang dikatakan cukup dan kondisi ekonomi kurang dari cukup.

Dalam penelitian ini kondisi ekonomi rumah tangga akan dispesifikan menjadi dua kategori yaitu kategori kondisi ekonomi tergolong cukup dan kondisi ekonomi tergolong kurang dari cukup. Kategori kondisi ekonomi tergolong cukup

terdiri dari responden perempuan yang menempatkan dirinya pada status ekonomi lebih dari cukup dan yang memiliki status ekonomi yang cukup. Sedangkan kategori kondisi ekonomi tergolong kurang dari cukup berdasarkan pilihan Jawaban responden perempuan terdiri yang secara subjektif menempatkan posisinya pada kehidupan rumah tangga pada status ekonomi yang kurang dari cukup. Berikut dapat dilihat gambaran kondisi ekonomi perempuan di Indonesia menurut IFLS 5 :

Gambar 5.9

Proporsi Perempuan berdasarkan Kondisi Ekonomi Keluarga di Indonesia



Sumber: IFLS (2015), diolah.

Pada gambar 5.9 menunjukkan bahwa mayoritas perempuan di Indonesia berada pada kondisi ekonomi yang terbilang cukup. Sekitar 70% perempuan di Indonesia tergolong dalam keluarga yang berkecukupan, sedangkan 30% sisanya tergolong dalam keluarga yang berada dalam kondisi ekonomi kurang dari cukup.

Kondisi ekonomi dalam keluarga merupakan salah satu faktor yang mendorong partisipasi kerja perempuan di Indonesia. Hal ini disebabkan dengan adanya partisipasi perempuan yang bekerja dalam sebuah rumah tangga akan dapat mengangkat kesejahteraan keluarga karena mendapat tambahan penghasilan dari hasil kerja perempuan tersebut.

Pada table dibawah ini dapat dilihat tabulasi silang kondisi ekonomi perempuan di Indonesia dalam golongan status angkatan kerja:

Tabel 5.4

Tabulasi Silang Status Angkatan Kerja Perempuan dan Kondisi Ekonomi Keluarga

STATUS EKONOMI	ANGKATAN KERJA	BUKAN ANGKATAN KERJA	TOTAL
Kondisi Ekonomi Cukup (Dalam Persen)	7824 (59%)	5396 (41%)	13220 (100%)
Kondisi Ekonomi Kurang dari Cukup (Dalam Persen)	2662 (47%)	2949 (53%)	5611 (100%)

Sumber: IFLS (2015), diolah.

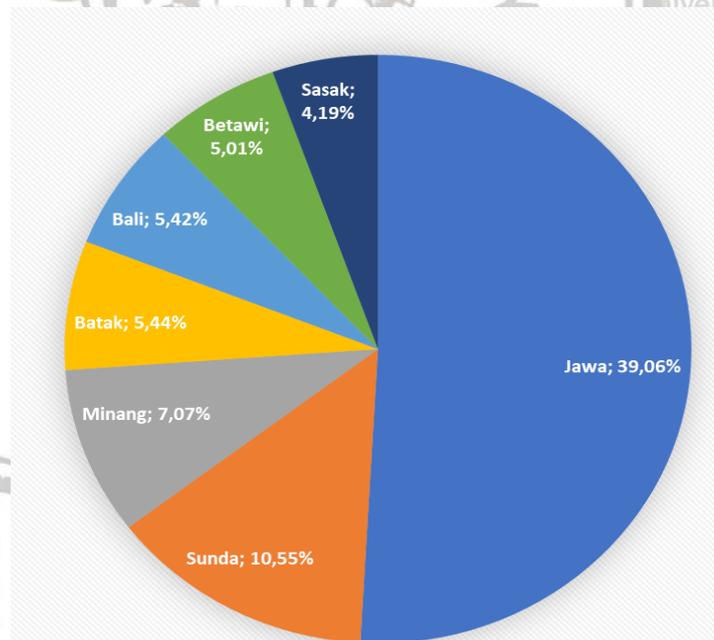
Pada table 5.4 dapat diketahui bahwa sekitar 59 persen perempuan dengan kondisi ekonomi yang cukup justru tergolong dalam angkatan kerja. Hal ini cukup menarik sebab pada beberapa studi terdahulu dikatakan bahwa kondisi ekonomi yang kurang dari cukup pada sebuah keluarga biasanya menjadi hal utama yang mendorong seorang perempuan untuk masuk ke pasar kerja agar dapat membantu menambah pendapatan keluarga. Dalam keadaan yang demikian dapat menunjukkan bahwa saat ini perempuan di Indonesia tengah mengalami perubahan paradigma. Sebab dengan keadaan ekonomi yang cukup, perempuan di Indonesia tetap memutuskan untuk masuk ke pasar kerja karena mereka mulai memiliki kesadaran dan memandang pasar kerja bukan hanya sebagai suatu tempat untuk pemenuhan kebutuhan, melainkan pasar kerja dianggap sebagai wadah untuk menunjukkan kemandirian dan akselerasi diri pada kaum perempuan.

5.2.6 Kelompok Etnis

Berdasarkan buku ensiklopedia suku bangsa di Indonesia dan merujuk pada buku pedoman pengolahan SP2010, Kelompok Etnis yang ada di Indonesia secara keseluruhan mencapai lebih dari 1.300 suku bangsa (Badan Pusat Statistik, 2011). Dalam penelitian ini beberapa kelompok etnis dipilih berdasarkan data IFLS Wave-5 Tahun 2015 disesuaikan dengan kebutuhan penelitian terkait kelompok etnis yang memiliki jumlah perempuan terdidik yang paling dominan di Indonesia diantaranya yaitu Jawa, Sunda, Minang, Batak, Bali, Betawi, dan Sasak. Proporsi kelompok etnis yang memiliki jumlah perempuan terdidik yang paling dominan di Indonesia dapat dilihat pada diagram berikut :

Gambar 5.10

Kelompok Etnis yang Didominasi dengan Perempuan Terdidik di Indonesia



Sumber: IFLS (2015), diolah.

Berdasarkan gambar 5.10 tersebut dapat diketahui tujuh etnis yang paling didominasi oleh perempuan terdidik di Indonesia. Etnis pertama yaitu Jawa dimana

nilai proporsi tertinggi yaitu sekitar 39,06% atau setara dengan 3000 individu.

Kemudian etnis kedua yaitu Sunda dengan 810 individu atau sekitar 10,55%.

Kedua kelompok etnis tersebut juga merupakan kedua etnis terbesar di Indonesia

berdasarkan Survey Penduduk 2010 (BPS,2011). Kelompok etnis yang didominasi

oleh perempuan terdidik di Indonesia selanjutnya berturut- turut adalah Minang

sebanyak 543 individu (7,07%), Batak sebanyak 418 individu (5,44%), Bali

sebanyak 416 individu (5,42%), Betawi sebanyak 385 individu (5,01%) dan Sasak

sebanyak 322 individu (4,19%). Dari beberapa etnis tersebut dapat dilihat tingkat

pendidikan tinggi yang mendominasi pada table berikut:

Tabel 5.5
Tabulasi Perempuan dari Beberapa Etnis Berdasarkan Tingkat Pendidikan Tinggi di Indonesia

NO	TINGKAT PENDIDIKAN TINGGI YANG DITAMATKAN	ETNIS						
		JAWA	SUNDA	MINANG	BATAK	BALI	BETAWI	SASAK
1	Sekolah Menengah Atas (SMA)	905	255	199	160	179	117	83
2	Sekolah Menengah Kejuruan (SMK)	1.073	288	132	123	83	177	25
3	Madrasah Aliyah (MA)	180	72	20	17	2	14	87
4	Kejar Paket C	48	10	5	0	6	5	7
5	Diploma (D1,D2,D3)	220	71	51	28	51	31	31
6	S1	534	144	119	88	87	39	88
7	Universitas Terbuka	5	0	1	0	0	0	0
8	S2	33	12	14	2	7	2	1
9	S3	2	0	2	0	1	0	0
TOTAL		3.000	852	543	418	416	385	322

Sumber: IFLS (2015), diolah.

Pada table 5.5 diketahui bahwa pada etnis Jawa lebih didominasi dengan perempuan dengan latar belakang pendidikan SMK yaitu sebanyak 1073 individu dan S1 sebanyak 534 individu. Jika dilihat secara keseluruhan etnis Jawa termasuk etnis yang mementingkan pendidikan. Hal ini dapat terlihat dibandingkan dengan beberapa etnis lainnya, perempuan etnis Jawa yang paling banyak memiliki jumlah responden yang telah menuntaskan hingga pendidikan tinggi.

Bahkan pada tingkat paket C etnis Jawa juga jauh lebih dominan dibanding etnis lainnya yaitu mencapai hingga 48 individu.

Pada etnis Sunda yang merupakan etnis terbesar kedua di Indonesia, perempuan etnis Sunda paling banyak memiliki latar belakang pendidikan SMK yaitu sebanyak 288 individu dan S1 sebanyak 144 individu. Berbeda halnya pada etnis Minang, dimana perempuan pada Etnis Minang cenderung memiliki latar belakang SMA sebanyak 199 individu dan tamatan SMK sebanyak 132 individu.

Sama halnya pada perempuan Etnis Batak dimana paling dominan memiliki latar belakang Pendidikan SMA yaitu sebanyak 160 individu dan SMK sebanyak 123 individu. Sedangkan pada Etnis Bali perempuan cenderung memiliki latar belakang pendidikan SMA dan S1. Pada Etnis Betawi kebanyakan perempuan merupakan tamatan SMK dan SMA. Hal yang menarik ditemukan pada perempuan Etnis Sasak dimana perempuan etnis ini lebih dominan memiliki latar belakang S1 dan Madrasah Aliyah (MA). Hal ini dikarenakan etnis Sasak didominasi oleh masyarakat beragama islam yang memandang Pendidikan agama begitu penting.

Nilai budaya dari masing-masing etnis tersebut mempengaruhi sudut pandang yang berbeda terkait peran perempuan yang bekerja dalam keluarga.

Untuk melihat tabulasi status angkatan kerja perempuan pada beberapa etnis tersebut dapat dilihat pada table berikut:

Tabel 5.6
Tabulasi Status Angkatan Kerja Perempuan Terdidik pada Beberapa Etnis
di Indonesia

No.	ETNIS	ANGKATAN KERJA	BUKAN ANGKATAN KERJA
1.	Jawa	1809	1191
2.	Sunda	485	325
3.	Minang	310	233
4.	Batak	265	153
5.	Bali	263	153
6.	Betawi	266	159
7.	Sasak	178	144

Sumber: IFLS (2015), diolah.

Pada tabel 5.6 tersebut menunjukkan bahwa dari semua etnis yang didominasi oleh perempuan terdidik cenderung untuk lebih memutuskan masuk ke dunia kerja atau tergolong sebagai angkatan kerja. Hal ini secara tidak langsung menunjukkan bahwa tingkat pendidikan sejalan dengan keputusan perempuan untuk berpartisipasi kedalam dunia kerja.

5.3 Hasil Analisis

5.3.1 Deteksi Multikolinearitas

Pada model regresi logistik perlu dilakukan deteksi multikolinearitas untuk mengetahui adanya hubungan linear antar variabel prediktor. Apabila dalam model terindikasi adanya multikolinearitas maka akan sulit untuk mengetahui pengaruh pada masing-masing peubah penjelas terhadap peubah respon. Menurut Gujarati (2013) untuk mendeteksi multikolinearitas pada model regresi logistic yang paling umum adalah menggunakan *varians inflation faktor (VIF)*. Apabila nilai $VIF < 10$ dan $1/VIF > 0,1$ maka dapat dikatakan bahwa model regresi logistik bebas dari

gejala multikolinearitas. Berikut nilai VIF untuk masing-masing variabel dalam model penelitian ini :

Tabel 5.7

Tabulasi Nilai VIF dalam Model

Variabel	VIF
Usia	1.02
Status Kawin	1.02
SMA/SMK/MA/Paket C	1.10
Diploma	1.03
Universitas	1.07
Tanggungjawab Anak	1.07
Kondisi Rumah Tangga	1.16
Jawa	1.48
Sunda	1.22
Minang	1.13
Batak	1.09
Bali	1.10
Betawi	1.10
Sasak	1.10
Mean VIF	1.12

Sumber: IFLS (2015), diolah.

Berdasarkan table 5.7 dapat diketahui bahwa masing-masing variabel menunjukkan nilai VIF kurang dari 10. Beberapa ahli berpendapat apabila nilai toleransi kurang dari 10 atau nilai $VIF < 10$ dan $1/VIF > 0,1$ maka dapat dikatakan bahwa model regresi logistik tersebut bebas dari gejala multikolinearitas. Dengan kata lain, pada model regresi logistik ini tidak terdeteksi adanya korelasi antar masing-masing variabel prediktor.

5.3.2 Hosmer & Lemeshow Goodness of Fit

Hosmer & Lemeshow Goodness of Fit atau uji kesesuaian model sangat diperlukan untuk menilai seberapa baik data atau seberapa cocok model dengan data (Rodríguez, 2007). Apabila nilai *Hosmer and Lemeshow Test* kurang dari 5% maka hipotesis nol ditolak. Hal ini berarti terdapat perbedaan yang signifikan antara klasifikasi yang diprediksi dengan klasifikasi yang diamati, sehingga dapat dikatakan model tidak baik karena model tidak dapat memprediksi nilai observasinya. Dalam penelitian ini hipotesis pada *Hosmer & Lemeshow Goodness of Fit* dapat ditulis sebagai berikut (Archer & Lemeshow, 2006):

H_0 : Tidak ada perbedaan yang nyata antara klasifikasi yang diprediksi dengan klasifikasi yang diamati

H_1 : Terdapat perbedaan yang nyata antara klasifikasi yang diprediksi dengan klasifikasi yang diamati.

Adapun hasil *Hosmer & Lemeshow Goodness of Fit* dalam model ini adalah sebagai berikut:

Tabel 5.8
Hasil Hosmer & Lemeshow Goodness of Fit

	<i>Chi-Squared</i>	<i>P-value</i>
Hosmer & Lemeshow Goodness of Fit	8320.576	1.0000

Sumber: IFLS (2015), diolah.

Pada table 5.8 diketahui hasil *Hosmer and Lemeshow Test chi squared* sebesar 8320.576 dengan $p\text{-value} = 1.0000$ atau lebih besar dari 5% maka H_0 diterima, yang berarti tidak ada perbedaan yang nyata antara klasifikasi yang diprediksi dengan klasifikasi yang diamati. Dengan demikian dapat dikatakan model mampu memprediksi nilai observasinya (Ghozali, 2011).

5.3.3 Analisis Regresi Logistik Biner (*Binary Logistic Regression*)

Dalam penelitian ini variabel respon yang digunakan bertipe kategorikal dua pilihan yaitu berupa variabel dummy (0 dan 1) sehingga analisis regresi logistik biner (*Binary logistic regression*) dianggap tepat digunakan dalam model ini. Model regresi logistik biner digunakan untuk menjelaskan hubungan antara variabel dependen yang berupa data dikotomik/biner dengan variabel independen yang berupa data berskala interval dan atau kategorik. Pada penelitian kali ini model regresi logistik biner bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor yang memiliki probabilitas status angkatan kerja perempuan terdidik di Indonesia untuk memutuskan menjadi angkatan kerja (*Peran Publik*) atau memutuskan untuk tidak masuk ke pasar kerja atau dikenal dengan sebutan bukan angkatan kerja (*Peran Domestik*) menggunakan data sekunder yang bersumber dari IFLS-5 Tahun 2015 dengan jumlah responden sebanyak 18.831. Variabel respon yang digunakan dalam model bertipe kategorikal dua pilihan yaitu angka 1 untuk angkatan kerja (*Peran Publik*) sedangkan angka 0 bermakna bukan angkatan kerja (*Peran Domestik*). Variabel prediktor dalam model terdiri dari beberapa variabel yaitu usia, status kawin, tingkat pendidikan (SMA/SMK/MA/Paket C , Diploma dan Universitas), tanggungan anak dibawah 15 tahun, kondisi rumah tangga dan tujuh etnis yang didominasi oleh perempuan terdidik di Indonesia antara lain Etnis Jawa, Etnis Sunda, Etnis Minang, Etnis Batak, Etnis Bali, Etnis Betawi dan Etnis Sasak.

Estimasi model analisis regresi logistik biner (*Binary logistic regression*) dalam penelitian ini terdiri dari dua tahap yaitu uji signifikansi parameter model secara simultan dan parsial. Dalam penelitian ini hasil estimasi model secara simultan dapat dilihat pada table berikut:

Tabel 5.9

Hasil Estimasi Rasio Maximum Likelihood

	LR χ^2	P-value	Pseudo R^2
Rasio Maximum Likelihood	596.70	0.0000	0.0231

Sumber: IFLS (2015), diolah.

Pada hasil estimasi *Rasio Maximum Likelihood* di tabel 5.9, diketahui bahwa nilai LR chi-square > nilai chi-square tabel dan nilai prob value < α , sehingga dapat dikatakan bahwa secara keseluruhan variabel prediktor yang terdiri dari beberapa variabel yaitu usia, status kawin, tingkat pendidikan (SMA/SMK/MA/Paket C, Diploma dan Universitas), tanggungan anak dibawah 15 tahun, kondisi rumah tangga dan tujuh etnis yang didominasi oleh perempuan terdidik di Indonesia antara lain Etnis Jawa, Etnis Sunda, Etnis Minang, Etnis Batak, Etnis Bali, Etnis Betawi dan Etnis Sasak berpengaruh terhadap variabel respon yaitu status angkatan kerja perempuan di Indonesia atau dapat dikatakan juga terdapat setidaknya satu variabel prediktor yang berpengaruh terhadap variabel respon. Selain itu dilihat dari hasil Pseudo R^2 pada model menunjukkan nilai 0,0231 yang menggambarkan bahwa model tersebut mampu menjelaskan sebesar 2,31 persen kecenderungan status angkatan kerja perempuan di Indonesia. Hasil Pseudo R^2 yang relative kecil sebab data dalam model regresi logistic biner bervariasi dengan jumlah yang cukup banyak (*cross section data*), sehingga hasil Pseudo R^2 dalam model ini relative kecil jika dibandingkan dengan model statistik lainnya dan belum tentu menunjukkan bahwa model tidak baik.

Selain estimasi secara simultan, dalam model regresi logistik biner juga akan diestimasi secara parsial untuk melihat hubungan masing-masing variabel. Adapun hasil estimasi regresi logistik biner (*Binary logistic regression*) secara parsial dalam penelitian ini akan dijelaskan secara terperinci dalam tabel berikut :

Tabel 5.10
Hasil Estimasi Model Analisis Regresi Logistik Biner

No.	Variabel	Coefficient	P> z
1.	Usia	0.126	0.022*
2.	Status Kawin	0.047	0.150
3.	SMA/SMK/MA/Paket C	0.097	0.004*
4.	Diploma	0.392	0.000*
5.	Universitas	0.680	0.000*
6.	Tanggung Anak	0.116	0.000*
7.	Kondisi Rumah Tangga	0.310	0.000*
8.	Jawa	0.392	0.000*
9.	Sunda	0.317	0.000*
10.	Minang	0.200	0.008*
11.	Batak	0.626	0.000*
12.	Bali	0.528	0.000*
13.	Betawi	-0.314	0.000*
14.	Sasak	0.467	0.000*

Sumber: IFLS (2015), diolah.

Pada table 5.10 diketahui bahwa koefisien pada keseluruhan variabel menunjukkan slope positif dan hampir seluruhnya menunjukkan nilai $P > |z| < 0.05$, atau dapat dikatakan bahwa variabel tersebut signifikan terhadap kecenderungan perempuan terdidik di Indonesia untuk bekerja (*Peran Publik*). Namun pada variabel status kawin memiliki nilai $P > |z| > 0.05$, sehingga dapat dikatakan perempuan terdidik yang telah menikah cenderung memilih untuk mengurus rumah tangga (*Peran Domestik*). Berdasarkan tabel diatas juga diketahui bahwa tingkat pendidikan Universitas merupakan variabel yang paling besar memiliki pengaruh terhadap keputusan perempuan terdidik untuk berpartisipasi kedalam dunia kerja (*Peran Publik*). Sedangkan jika dilihat dari segi etnis, perempuan Etnis Batak tergolong sebagai perempuan yang paling besar memiliki kecenderungan untuk berpartisipasi kedalam pasar kerja atau atau tergolong sebagai angkatan kerja (*Peran Publik*).

a. Variabel Usia

Variabel usia memiliki nilai probabilitas sebesar $0,022 < 0,05$ ($\alpha=5\%$) dengan slope positif. Nilai tersebut menunjukkan bahwa variabel usia memiliki pengaruh yang positif dan signifikan terhadap keputusan perempuan terdidik untuk bekerja atau tergolong sebagai angkatan kerja (*Peran Publik*). Variabel usia menunjukkan *odd ratio* sebesar 0,126 bermakna bahwa perempuan terdidik yang masuk dalam kategori usia produktif memiliki kecenderungan untuk menjadi angkatan kerja 12,6% lebih tinggi dibandingkan dengan perempuan terdidik yang tergolong usia non produktif. Sejalan dengan teori *age earning profile* yang menganggap nilai rehat bagi pekerja kategori *prime age working years* (usia prima bagi pekerja) begitu tinggi (Tarmizi, 2012). Oleh sebab itu, seseorang yang berada pada usia prima atau usia produktif akan lebih memilih menghabiskan waktunya untuk bekerja (*Peran Publik*).

b. Variabel Status Kawin

Variabel status kawin memiliki nilai probabilitas sebesar $0,150 > 0,05$ ($\alpha=5\%$). Nilai tersebut menunjukkan bahwa variabel status kawin tidak berpengaruh signifikan terhadap keputusan perempuan terdidik untuk bekerja atau tidak tergolong sebagai angkatan kerja. Variabel status kawin menunjukkan koefisien *odd ratio* sebesar 0,047 bermakna bahwa perempuan terdidik yang sudah menikah memiliki kecenderungan untuk mengurus rumah tangga dan tergolong menjadi bukan angkatan kerja. Kecenderungan perempuan terdidik yang sudah menikah untuk mengurus rumah tangga (*Domestic Sphere*) 4,7% lebih tinggi dibandingkan dengan perempuan terdidik yang berstatus belum menikah. Perempuan yang sudah menikah hanya akan menjadi 'stayer' (Büchel & Battu, 2003). Pada umumnya kebutuhan sehari-hari perempuan yang sudah menikah biasanya ditanggung oleh suami (Sitohang, 2017).

c. Variabel Tingkat Pendidikan SMA/SMK/MA/Paket C

Hasil estimasi variabel tingkat pendidikan SMA/SMK/MA/Paket C pada model binary logistic memiliki nilai probabilitas sebesar $0,004 < 0,05$ ($\alpha=5\%$) dengan slope positif. Nilai tersebut berarti bahwa variabel tingkat pendidikan SMA/SMK/MA/Paket C memiliki pengaruh yang positif dan signifikan terhadap keputusan perempuan terdidik untuk bekerja atau tergolong sebagai angkatan kerja (*Peran Publik*). Variabel tingkat pendidikan SMA/SMK/MA/Paket C menunjukkan koefisien *odd ratio* sebesar 0,097 bermakna bahwa perempuan terdidik dengan latar belakang pendidikan SMA/SMK/MA/Paket C memiliki kecenderungan untuk menjadi angkatan kerja 9,7% lebih tinggi dibandingkan dengan perempuan terdidik yang memiliki latar belakang pendidikan rendah selain SMA/SMK/MA/Paket C.

d. Variabel Tingkat Pendidikan Diploma

Hasil estimasi variabel tingkat pendidikan Diploma pada model binary logistic menunjukkan nilai probabilitas sebesar $0,000 < 0,05$ ($\alpha=5\%$) dengan slope positif. Nilai tersebut dapat diinterpretasikan bahwa variabel tingkat pendidikan Diploma memiliki pengaruh yang positif dan signifikan terhadap keputusan perempuan terdidik untuk bekerja atau tergolong sebagai angkatan kerja (*Peran Publik*). Hal ini dapat diartikan bahwa semakin tinggi pendidikan perempuan maka kecenderungannya untuk berpartisipasi ke dunia kerja akan semakin besar.

Variabel tingkat pendidikan Diploma menunjukkan koefisien *odd ratio* sebesar 0,392 bermakna bahwa perempuan terdidik dengan latar belakang pendidikan diploma memiliki kecenderungan untuk menjadi angkatan kerja 39,2% lebih tinggi dibandingkan dengan perempuan terdidik yang memiliki latar belakang pendidikan rendah selain Diploma.

e. Variabel Tingkat Pendidikan Universitas

Hasil estimasi variabel tingkat pendidikan Universitas pada model binary logistic menunjukkan bahwa variabel tersebut memiliki nilai probabilitas sebesar $0,000 < 0,05$ ($\alpha=5\%$) dengan slope positif. Nilai tersebut menunjukkan bahwa variabel tingkat pendidikan Universitas memiliki pengaruh yang positif dan signifikan terhadap keputusan perempuan terdidik untuk bekerja atau tergolong sebagai angkatan kerja (*Peran Publik*). Variabel tingkat pendidikan Universitas menunjukkan koefisien *odd ratio* sebesar 0,680 bermakna bahwa perempuan terdidik dengan latar belakang pendidikan Universitas memiliki kecenderungan untuk menjadi angkatan kerja 68% lebih tinggi dibandingkan dengan perempuan terdidik yang memiliki latar belakang pendidikan rendah selain Universitas. Hasil ini mendukung teori human investment yang memandang pendidikan sebagai modal untuk menunjang seseorang khususnya kaum perempuan untuk masuk ke pasar kerja dan tergolong sebagai angkatan kerja (*Peran Publik*).

f. Variabel Tanggungan Anak Dibawah 15 Tahun

Variabel tanggungan anak dibawah 15 tahun pada model binary logistic menunjukkan nilai probabilitas sebesar $0,000 < 0,05$ ($\alpha=5\%$) dengan slope positif. Nilai tersebut dapat diartikan bahwa variabel tanggungan anak dibawah 15 tahun memiliki pengaruh yang positif dan signifikan terhadap keputusan perempuan terdidik untuk bekerja atau tergolong sebagai angkatan kerja (*Peran Publik*).

Variabel tanggungan anak dibawah 15 tahun menunjukkan koefisien *odd ratio* sebesar 0,116 bermakna bahwa perempuan terdidik yang mempunyai anak dibawah 15 tahun memiliki kecenderungan untuk menjadi angkatan kerja 11,6% lebih tinggi dibandingkan dengan perempuan terdidik yang tidak mempunyai tanggungan anak dibawah 15 tahun. Anak usia dibawah 15 tahun dianggap belum mampu untuk memenuhi kebutuhannya sendiri sehingga masih harus bergantung

terhadap orang tua dan menjadi beban tambahan bagi ekonomi keluarga. Dengan bertambahnya tanggungan anak dalam keluarga tanpa diimbangi dengan peningkatan dari segi ekonomi akan mengharuskan anggota keluarga selain pihak laki-laki sebagai kepala keluarga untuk mencari nafkah (Simanjuntak, 2001).

g. Variabel Kondisi Ekonomi Rumah Tangga

Hasil estimasi variabel kondisi ekonomi rumah tangga pada model binary logistic menunjukkan nilai probabilitas sebesar $0,000 < 0,05$ ($\alpha=5\%$) dengan slope positif. Nilai tersebut berarti bahwa variabel kondisi ekonomi rumah tangga memiliki pengaruh yang positif dan signifikan terhadap keputusan perempuan terdidik untuk bekerja atau tergolong sebagai angkatan kerja (*Peran Publik*).

Variabel kondisi ekonomi rumah tangga menunjukkan koefisien *odd ratio* sebesar 0,310 bermakna bahwa perempuan terdidik yang berada pada kondisi ekonomi rumah tangga yang cukup memiliki kecenderungan untuk menjadi angkatan kerja 31% lebih tinggi dibandingkan dengan perempuan terdidik yang berada pada kondisi ekonomi rumah tangga yang kekurangan. Hasil ini cukup menarik sebab dari beberapa penelitian sebelumnya menyebutkan bahwa salah satu hal yang mendorong perempuan untuk bekerja adalah adanya kebutuhan ekonomi yang semakin besar dan belum tercukupi. Namun seiring modernisasi, peran perempuan dalam ranah publik tidak semata-mata hanya untuk memenuhi kebutuhan bersama dalam keluarga, tetapi juga lebih untuk menunjukkan bahwa perempuan memiliki harga diri serta merasa hidupnya bermanfaat (Wolfman, 1994). Pendapat lain juga disampaikan oleh Humaedi (2016) yang menyatakan bahwa perempuan yang bekerja juga memiliki beberapa dampak positif terhadap harga dirinya serta adanya rasa puas pada hidupnya yang mampu mendorong perempuan tersebut untuk lebih mempunyai pandangan positif terhadap masyarakat.

h. Variabel Etnis Jawa

Hasil estimasi variabel Etnis Jawa pada model binary logistic menunjukkan bahwa variabel tersebut memiliki nilai probabilitas sebesar $0,000 < 0,05$ ($\alpha=5\%$) dengan slope positif. Nilai tersebut berarti bahwa variabel Etnis Jawa memiliki pengaruh yang positif dan signifikan terhadap keputusan perempuan terdidik untuk bekerja atau tergolong sebagai angkatan kerja (*Peran Publik*). Variabel Etnis Jawa menunjukkan koefisien *odd ratio* sebesar 0,392 bermakna bahwa perempuan terdidik dari Etnis Jawa memiliki kecenderungan untuk menjadi angkatan kerja 39,2% lebih tinggi dibandingkan dengan perempuan terdidik etnis lainnya.

i. Variabel Etnis Sunda

Variabel Etnis Sunda pada model menunjukkan nilai probabilitas sebesar $0,000 < 0,05$ ($\alpha=5\%$) dengan slope positif. Nilai tersebut menunjukkan bahwa variabel Etnis Sunda memiliki pengaruh yang positif dan signifikan terhadap keputusan perempuan terdidik untuk bekerja atau tergolong sebagai angkatan kerja (*Peran Publik*). Variabel Etnis Sunda menunjukkan koefisien *odd ratio* sebesar 0,317 bermakna bahwa perempuan terdidik dari Etnis Sunda memiliki kecenderungan untuk menjadi angkatan kerja 31,7% lebih tinggi dibandingkan dengan perempuan terdidik etnis lainnya.

j. Variabel Etnis Minang

Hasil estimasi variabel Etnis Minang pada model binary logistic menunjukkan nilai probabilitas sebesar $0,008 < 0,05$ ($\alpha=5\%$) dengan slope positif. Nilai tersebut bermakna bahwa variabel Etnis Minang memiliki pengaruh yang positif dan signifikan terhadap keputusan perempuan terdidik untuk bekerja atau tergolong sebagai angkatan kerja (*Peran Publik*). Variabel Etnis Minang menunjukkan koefisien *odd ratio* sebesar 0,200 bermakna bahwa perempuan

terdidik dari Etnis Minang memiliki kecenderungan untuk menjadi angkatan kerja 20% lebih tinggi dibandingkan dengan perempuan terdidik etnis lainnya. Kehidupan sosial di Minangkabau diatur oleh hukum adat sistem budaya matrilineal yang membuat perempuan Etnis Minang memiliki kedudukan yang tinggi. Hal ini secara tidak langsung mendorong budaya merantau kaum laki-laki Etnis Minang yang pergi ke luar Sumatera Barat untuk memperbaiki taraf ekonominya. Kondisi ini mengakibatkan urusan mencari nafkah keluarga didalam wilayah mulai banyak diambil alih oleh perempuan Etnis Minang (Latif, 2002).

k. Variabel Etnis Batak

Hasil estimasi variabel Etnis Batak pada model binary logistic menunjukkan bahwa variabel tersebut memiliki nilai probabilitas sebesar $0,000 < 0,05$ ($\alpha=5\%$) dengan slope positif. Nilai tersebut menunjukkan bahwa variabel Etnis Batak memiliki pengaruh yang positif dan signifikan terhadap keputusan perempuan terdidik untuk bekerja atau tergolong sebagai angkatan kerja (*Peran Publik*). Variabel Etnis Batak menunjukkan koefisien *odd ratio* sebesar 0,626 bermakna bahwa perempuan terdidik dari Etnis Batak memiliki kecenderungan untuk menjadi angkatan kerja 62,6% lebih tinggi dibandingkan dengan perempuan terdidik etnis lainnya. Selain itu hasil model binary logistic juga menunjukkan bahwa perempuan etnis Batak merupakan etnis yang memiliki kecenderungan paling besar terhadap keputusan perempuan terdidik untuk bekerja atau tergolong sebagai angkatan kerja (*Peran Publik*). Hal ini didukung dengan beberapa penelitian yang memang menunjukkan bahwa partisipasi kerja perempuan Batak cenderung tinggi sebab perempuan Etnis Batak bekerja bukan hanya demi mendapatkan upah melainkan lebih untuk menunjukkan eksistensi dan martabat dirinya dalam kehidupan rumah tangga dan keluarganya. (Baiduri, 2015).

I. Variabel Etnis Bali

Pada variabel Etnis Bali menunjukkan nilai probabilitas sebesar $0,000 < 0,05$ ($\alpha=5\%$) dengan slope positif. Nilai tersebut berarti bahwa variabel Etnis Bali memiliki pengaruh yang positif dan signifikan terhadap keputusan perempuan terdidik untuk bekerja (*Peran Publik*). Variabel Etnis Bali menunjukkan koefisien *odd ratio* sebesar 0,528 bermakna bahwa perempuan terdidik dari Etnis Bali memiliki kecenderungan untuk menjadi angkatan kerja 52,8% lebih tinggi dibandingkan dengan perempuan terdidik etnis lainnya.

m. Variabel Etnis Betawi

Variabel Etnis Betawi memiliki nilai probabilitas sebesar $0,000 < 0,05$ ($\alpha=5\%$) dengan slope positif. Dengan kata lain, variabel Etnis Betawi memiliki pengaruh yang positif dan signifikan terhadap keputusan perempuan terdidik untuk bekerja atau tergolong sebagai angkatan kerja (*Peran Publik*). Variabel Etnis Betawi menunjukkan *odd ratio* sebesar 0,314 bermakna bahwa perempuan terdidik dari Etnis Betawi memiliki kecenderungan untuk menjadi angkatan kerja 31,4% lebih tinggi dibandingkan dengan perempuan terdidik etnis lainnya.

n. Variabel Etnis Sasak

Variabel Etnis Sasak memiliki nilai probabilitas sebesar $0,000 < 0,05$ ($\alpha=5\%$) dengan slope positif, sehingga hal ini berarti bahwa variabel Etnis Sasak memiliki pengaruh yang positif dan signifikan terhadap keputusan perempuan terdidik untuk bekerja atau tergolong sebagai angkatan kerja (*Peran Publik*). Variabel Etnis Sasak menunjukkan koefisien *odd ratio* sebesar 0,467 bermakna bahwa perempuan terdidik dari Etnis Sasak memiliki kecenderungan untuk menjadi angkatan kerja 46,7% lebih tinggi dibandingkan dengan perempuan terdidik etnis lainnya.

5.4 Implikasi Teoritis Hasil Penelitian

Dalam bagian ini akan dijelaskan keterkaitan antara beberapa variabel dalam pengaruhnya terhadap keputusan perempuan terdidik di Indonesia dalam konteks peran ganda pada perempuan. Dikutip dari Hidayati (2015) menyatakan bahwa peran ganda dijelaskan dalam konsep *dualisme cultural*, yaitu peran perempuan sebagai pekerja (*public sphere*) dan berperan sebagai ibu rumah tangga (*domestic sphere*) (Hidayati, 2015). Keputusan perempuan terdidik dalam konsep *dualism cultural* dari beragam aspek seperti karakteristik sosial (usia, status kawin, tingkat pendidikan), karakteristik ekonomi (tanggungannya anak dibawah 15 tahun dan kondisi ekonomi rumah tangga) serta karakteristik etnis (Jawa, Sunda, Minang, Batak, Bali, Betawi, dan Sasak) akan dibahas terperinci pada bagian ini.

Hasil estimasi IFLS-5 Tahun 2015 menunjukkan bahwa keseluruhan variabel yang diteliti dalam penelitian ini menunjukkan slope positif, namun hanya ada satu variabel yang tidak signifikan terhadap keputusan perempuan untuk berpartisipasi ke pasar kerja yaitu variabel status kawin. Selain itu ditemukan bahwa tingkat pendidikan Universitas merupakan variabel yang paling besar memiliki kecenderungan terhadap keputusan perempuan terdidik untuk berpartisipasi kedalam dunia kerja (*Peran Publik*). Hal ini sesuai dengan *human capital theory* yang memandang pendidikan tinggi sebagai "*human investment*" dengan harapan dapat memperoleh pekerjaan yang layak dimasa depan.

Sedangkan jika dilihat dari segi etnis, perempuan Etnis Batak dan Bali tergolong sebagai perempuan yang paling besar memiliki kecenderungan sebagai angkatan kerja (*Peran Publik*). Hasil penelitian ini sesuai dengan *Developmental Theory of Gender Realignment* yang menunjukkan peran gender saat ini semakin konvergen karena revolusi struktural dalam tenaga kerja yang dibayar dan dalam peningkatan kesempatan pendidikan bagi perempuan (Inglehart, & Norris, 2000).

5.4.1 Kecenderungan Usia terhadap Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan Terdidik di Indonesia

Berdasarkan hasil analisis data IFLS-5 tahun 2015 menunjukkan bahwa perempuan terdidik yang tergolong usia produktif di Indonesia memiliki kecenderungan yang positif dan signifikan terhadap keputusan perempuan terdidik di Indonesia untuk berpartisipasi di dunia kerja atau tergolong sebagai angkatan kerja (*Peran Publik*). Hal ini menunjukkan bahwa perempuan terdidik di Indonesia yang tergolong usia produktif 15-46 tahun akan lebih cenderung untuk memutuskan masuk ke pasar kerja dibandingkan dengan penduduk usia non produktif yaitu usia 15 tahun kebawah dan 64 tahun keatas.

Dalam kajian empiris, teori *age earning profile* (profil pendapatan umur) secara tidak langsung telah menyatakan bahwa harga rehat dianggap relative rendah bagi seseorang yang berusia non produktif, sedangkan bagi usia produktif atau *prime age working years* (usia prima bagi pekerja) nilai rehat akan dianggap begitu tinggi (Tarmizi, 2012). Oleh sebab itu, seseorang yang berada pada usia produktif akan lebih memilih untuk menghabiskan waktunya dengan bekerja.

Usia dan tingkat partisipasi angkatan kerja perempuan terdidik memang erat kaitannya. Usia berkaitan langsung dengan kondisi fisik seorang tenaga kerja dalam produktifitas kerjanya. Tingkat partisipasi angkatan kerja akan meningkat seiring dengan bertambahnya usia, namun ketika usia tertentu tingkat partisipasi kerja akan mencapai titik optimal yang pada akhirnya menurun hingga titik terendah, terutama pada kelompok usia 60 tahun keatas (Hidayat & Hadi, 2017).

5.4.2 Kecenderungan Status Kawin terhadap Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan Terdidik di Indonesia

Berdasarkan hasil analisis data IFLS-5 tahun 2015 menunjukkan bahwa perempuan terdidik yang sudah menikah memiliki kecenderungan untuk mengurus rumah tangga dan tergolong menjadi bukan angkatan kerja. Kecenderungan

perempuan terdidik yang sudah menikah untuk mengurus rumah tangga (*Peran Domestik*) 4,7% lebih tinggi dibandingkan dengan perempuan terdidik yang berstatus belum menikah. Perempuan yang sudah menikah memiliki kemungkinan yang lebih tinggi untuk tidak bekerja, sebab setelah menikah perempuan akan lebih mengutamakan urusan rumah tangga, sehingga karir bukan lagi menjadi tujuan yang utama (Vuluku, Wambugu, & Moyi, 2013). Perempuan setelah menikah harus bertanggung jawab pada ranah domestik, mereka akan mulai mengalami transisi untuk menyeimbangkan perannya di ranah domestik sebagai ibu rumah tangga dan perannya di ranah publik sebagai perempuan pekerja. Saat perempuan mengalami kesulitan untuk memerankan kedua posisi tersebut, maka kecenderungan yang terjadi adalah posisi perempuan di ranah publik dikorbankan. Artinya perempuan pekerja itu akan mundur baik atas pemahaman mereka terhadap tuntutan yang ditanamkan pada dirinya sebagai perempuan maupun atas desakan lingkungannya (Herawati, 2016).

Mengacu pada teori *differential overqualification*, yang dikemukakan oleh Robert Frank (1978) menyatakan bahwa perempuan yang telah menikah memiliki risiko yang lebih tinggi untuk memasuki pasar tenaga kerja. Dengan kata lain, perempuan yang telah berstatus menikah dan menjadi Istri telah bergantung pada suami yang berstatus sebagai kepala keluarga yang berkewajiban mencari nafkah (Sitohang, 2017). Selain itu Okorie (2013) juga menambahkan pada perempuan dengan pendidikan tinggi cenderung menikah setelah menuntaskan masa pendidikannya, sehingga perempuan terdidik akan menikah antara usia 25-30 tahun dan mulai memiliki anak kemudian setelah usia perkawinan tersebut. Dengan kelahiran anak di usia tersebut, kesuburan dan produktifitas perempuan untuk bekerja tentu jauh lebih rendah. Perempuan setelah menikah akan disibukan dengan berbagai urusan rumah tangga terutama mengurus anak, sehingga hal ini

merupakan alasan utama perempuan yang sudah menikah akan meninggalkan pekerjaannya dan fokus terhadap satu peran yaitu peran domestik atau menjadi ibu rumah tangga.

5.4.3 Kecenderungan Tingkat Pendidikan terhadap Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan Terdidik di Indonesia

Nilai estimasi IFLS-5 menunjukkan bahwa tingkat pendidikan SMA/SMK/MA/Paket C, Diploma dan pada tingkat Universitas atau perguruan tinggi memiliki pengaruh yang positif dan signifikan terhadap keputusan perempuan terdidik untuk bekerja atau tergolong sebagai angkatan kerja (*Peran Publik*). Selain itu, hasil estimasi juga menunjukkan bahwa tingkat pendidikan Universitas memiliki kecenderungan untuk menjadi angkatan kerja 68% lebih tinggi dibandingkan dengan perempuan terdidik yang memiliki latar belakang pendidikan yang lebih rendah dari perguruan tinggi.

Hasil tersebut tentu menunjukkan bahwa semakin tinggi tingkat pendidikan, maka kecenderungan perempuan terdidik untuk masuk ke pasar kerja akan semakin tinggi. Menurut Schultz (2004) mengacu pada *Human capital theory* menyatakan bahwa pendidikan formal dan informal merupakan faktor penting yang dibutuhkan untuk dapat meningkatkan kapasitas produksi. Dengan kata lain, seseorang dapat meningkatkan penghasilannya melalui peningkatan pendidikan.

Setiap satu jenjang pendidikan yang telah dituntaskan, berarti bahwa disatu pihak diharapkan mampu meningkatkan kemampuan kerja untuk dapat memperoleh pendapatan yang lebih baik, dan dipihak lain menunda penerimaan penghasilan selama beberapa tahun dalam mengikuti pendidikan tersebut. Sejalan dengan konsep *opportunity cost* dimana ketika seseorang memilih untuk mengenyam pendidikan tinggi, mereka akan mengorbankan pendapatan yang akan didapatkan jika seandainya mereka memilih untuk bekerja. Pada satu sisi, mereka akan kehilangan empat tahun gaji kerja ketika mereka memilih untuk mengenyam

pendidikan, namun di sisi yang lain seseorang tersebut berharap untuk mendapatkan gaji yang lebih besar nantinya dari pendidikan tinggi untuk mengganti kerugian mereka yang tidak bekerja selama 4 tahun tersebut.

Statistik menunjukkan bahwa dari 774 juta orang dewasa buta huruf di seluruh dunia, 64 persen adalah perempuan (Gender statistics, 2010). Oleh karena itu, Tujuan Pembangunan Milenium PBB (SDGs) menggunakan indikator pendidikan sebagai target dan ukuran untuk mendorong kesetaraan gender dan memberdayakan perempuan. Pendidikan memiliki peran yang cukup besar bagi kemajuan kaum perempuan. Melalui peningkatan akses pendidikan diharapkan dapat meningkatkan kualitas sumber daya manusia sehingga dapat mendorong perempuan untuk setara dengan kaum laki-laki terutama dalam hal kesempatan kerja. Hukum hak asasi manusia internasional menetapkan seperangkat kriteria tiga kali lipat di mana anak perempuan harus memiliki hak yang sama untuk pendidikan, hak yang sama dalam pendidikan dan hak mereka yang setara harus dilindungi dan dipromosikan melalui pendidikan (Tomasevski, 2005).

Pendidikan di beberapa masyarakat dipandang sebagai ketakutan akan perubahan dan ketakutan untuk kehilangan identitas budaya (Okorie, 2013). Di sebagian besar masyarakat, sektor publik dan swasta lebih didominasi oleh laki-laki, hal ini yang membentuk pandangan orang tua bahwa perempuan tidak perlu menengam pendidikan tinggi sebab mencari nafkah merupakan tanggung jawab kaum laki-laki. Namun seiring berjalannya waktu, peran perempuan mulai dapat diterima di lingkungan publik. Berdasarkan data BPS (2017) mayoritas angkatan kerja perempuan di Indonesia memiliki latar belakang pendidikan SMA sederajat. Data beberapa tahun terakhir juga menunjukkan jumlah perempuan yang telah menengam pendidikan tinggi juga mengalami peningkatan. Hal ini secara tidak langsung telah menunjukkan adanya peningkatan akses pendidikan bagi kaum

perempuan untuk dapat mengenyam pendidikan tinggi yang setara dengan kaum laki-laki. Namun mudahnya akses pendidikan tersebut jika tidak diimbangi dengan kesempatan kerja bagi kaum perempuan juga akan mendorong munculnya pengangguran perempuan, khususnya perempuan terdidik di Indonesia. Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Namun menurut penelitian yang dilakukan oleh Sarkar (2008) yang justru menyatakan dalam beberapa tahun terakhir, ada indikasi bahwa peningkatan lebih cepat dalam bidang pendidikan dalam angkatan kerja perempuan mendorong tingkat pengangguran perempuan yang lebih tinggi dan memiliki dampak jangka panjang.

Pendidikan bagi perempuan telah menduduki prioritas utama di antara berbagai langkah yang diambil untuk meningkatkan status perempuan (Naik & Gandhe, 2002). Dalam beberapa dekade, telah terjadi pergeseran paradigma tentang perempuan atas peran tradisionalnya sebagai ibu rumah tangga menjadi seseorang yang memiliki kontribusi besar bagi ekonomi keluarga. Secara absolut, jumlah penduduk perempuan di Indonesia lebih besar dibanding kaum laki-laki. Maka perempuan dianggap memiliki peran yang besar bagi pembangunan suatu negara. Peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui pendidikan diharapkan mampu untuk mendorong perempuan menjadi lebih produktif dan dapat berkontribusi bagi kemajuan pembangunan negara. Menurut Okorie (2013) pendidikan bagi perempuan merupakan langkah penting dalam mengatasi kemiskinan dan memastikan pembangunan ekonomi. Perempuan yang berpendidikan adalah perempuan yang berdaya saing dan lebih memiliki akses terhadap pasar kerja. Pendidikan membantu perempuan memanfaatkan peluang untuk mendapatkan pekerjaan yang lebih baik, yang pada gilirannya akan mendorong peningkatan pendapatan dan kesejahteraan bagi keluarga serta membantu perempuan untuk memahami hak-hak hukum serta hak reproduksi mereka.

5.4.4 Kecenderungan Tanggungan Anak Dibawah 15 Tahun terhadap Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan Terdidik di Indonesia

Hasil estimasi menunjukkan bahwa variabel tanggungan anak dibawah 15 tahun memiliki pengaruh yang positif dan signifikan terhadap keputusan perempuan terdidik untuk bekerja atau tergolong sebagai angkatan kerja (*Peran Publik*). Dengan kata lain, perempuan terdidik yang memiliki anak dibawah 15 tahun justru semakin terdorong untuk masuk ke pasar kerja guna mendapatkan tambahan pemasukan bagi ekonomi keluarga. Berdasarkan data yang dipaparkan sebelumnya, angka perempuan yang memiliki jumlah anak dibawah 15 tahun tergolong cukup banyak di Indonesia. Data tersebut secara tidak langsung menunjukkan bahwa beban yang ditanggung dalam keluarga cenderung lebih besar, sebab pada anak usia dibawah 15 tahun beban ekonomi masih ditopang oleh orang tua. Anak usia dibawah 15 tahun dianggap belum mampu untuk memenuhi kebutuhannya sendiri sehingga masih harus bergantung terhadap orang tua dan menjadi beban tambahan bagi ekonomi keluarga.

Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Dewi (2012) yang menyatakan bahwa meningkatnya jumlah anak yang dimiliki dalam sebuah keluarga, maka tentu meningkat pula beban tanggungan dalam keluarga tersebut.

Jumlah tanggungan yang semakin banyak pada sebuah keluarga tanpa diimbangi dengan peningkatan dari segi ekonomi akan mengharuskan anggota keluarga selain kepala keluarga untuk mencari nafkah (Simanjuntak, 2001). Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa tanggungan anak dibawah 15 tahun mendorong peningkatan angkatan kerja perempuan, sebab semakin beban ekonomi akan semakin berat apabila hanya ditopang oleh satu penyangga pendapatan keluarga (*one earner household*).

5.4.5 Kecenderungan Kondisi Ekonomi Rumah Tangga terhadap Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan Terdidik di Indonesia

Mengacu pada hasil estimasi IFLS 5 tahun 2015 yang menunjukkan bahwa variabel kondisi ekonomi rumah tangga memiliki pengaruh yang positif dan signifikan terhadap keputusan perempuan terdidik untuk bekerja atau tergolong sebagai angkatan kerja (*Peran Publik*). Hasil estimasi juga mengungkapkan bahwa perempuan terdidik yang berada pada kondisi ekonomi rumah tangga yang cukup justru memiliki kecenderungan untuk menjadi angkatan kerja 31% lebih tinggi dibandingkan dengan perempuan terdidik yang berada pada kondisi ekonomi rumah tangga yang kekurangan. Hasil ini cukup menarik sebab dari beberapa penelitian sebelumnya menyebutkan bahwa salah satu hal yang mendorong perempuan untuk bekerja adalah adanya kebutuhan ekonomi yang semakin besar dan belum tercukupi.

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Tjaja (2000) mengungkapkan bahwa pada sebuah lingkungan keluarga, semakin mereka dihimpit faktor kemiskinan maka semakin berat tekanan yang mengharuskan mereka mencari pekerjaan produktif sekalipun dengan imbalan yang sangat rendah. Perempuan di Indonesia umumnya hanya bekerja pada sektor sektor tertentu. Berdasarkan data ILO (2017) menyatakan bahwa perempuan di Indonesia pada sektor tenaga usaha dan penjualan serta bidang pertanian. Pekerjaan tersebut tetap dilakukan oleh perempuan walaupun memberikan pendapatan yang tidak terlalu tinggi. Menurut Handayani (2009) adanya partisipasi perempuan yang bekerja dalam sebuah rumah tangga akan dapat mengangkat kesejahteraan keluarga karena mendapat tambahan penghasilan dari hasil kerja perempuan tersebut sehingga kebutuhan ekonomi dalam rumah tangga dapat tercukupi dan tidak bergantung pada satu penyangga pendapatan keluarga (*one earner household*).

Namun seiring modernisasi, peran perempuan dalam ranah tidak semata-mata hanya untuk memenuhi kebutuhan bersama dalam keluarga, tetapi juga lebih untuk menunjukkan bahwa perempuan memiliki harga diri serta merasa hidupnya bermanfaat (Wolfman, 1994). Pendapat lain juga disampaikan oleh Humaedi (2016) yang menyatakan bahwa perempuan yang bekerja juga memiliki beberapa dampak positif terhadap harga dirinya serta adanya rasa puas pada hidupnya yang mampu mendorong perempuan tersebut untuk lebih mempunyai pandangan positif terhadap masyarakat. Hasil penelitian ini juga didukung dengan beberapa penelitian sebelumnya, seperti penelitian Sumarsono (2008) menyatakan bahwa salah satu hal yang mendorong peningkatan partisipasi angkatan kerja perempuan dikarenakan adanya kesadaran masyarakat terkait perubahan pandangan dan sikap masyarakat dalam kesetaraan pendidikan antara laki-laki dan perempuan yang berdampak pada pembangunan nasional.

Penelitian Putri dan Purwanti (2012) menambahkan bahwa hal tersebut dipengaruhi oleh faktor ekonomi yaitu ingin meningkatkan kesejahteraan keluarga dan faktor sosial dengan adanya unsur *prestige* (gengsi). Unsur *prestige* ini banyak terjadi pada perempuan yang berpendidikan tinggi, sehingga bekerja merupakan salah satu pembuktian dan aktualisasi yang mendorong perempuan terdidik untuk mandiri secara ekonomi. Sejalan dengan itu, Yao & You (2018) juga menyatakan bahwa peningkatan angka partisipasi perempuan memiliki efek jangka panjang dalam merubah perspektif sosial tentang peran perempuan pada suatu negara.

Partisipasi perempuan dalam bekerja mencerminkan kemauan perempuan untuk mandiri dari sisi ekonomi serta adanya kebutuhan untuk menambah pendapatan keluarga (Zainal & Elpanso, 2017).

5.4.6 Kecenderungan Etnis Jawa terhadap Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan Terdidik di Indonesia

Hasil estimasi variabel Etnis Jawa pada model binary logistic menunjukkan bahwa variabel memiliki pengaruh yang positif dan signifikan terhadap keputusan perempuan terdidik untuk bekerja atau tergolong sebagai angkatan kerja (*Peran Publik*). Bahkan perempuan terdidik dari Etnis Jawa memiliki kecenderungan untuk menjadi angkatan kerja 39,2% lebih tinggi dibandingkan dengan perempuan terdidik etnis lainnya. Etnis Jawa merupakan Etnis yang paling dominan di Indonesia, dimana kurang lebih sekitar 40,2% penduduk Indonesia merupakan Etnis Jawa yang berasal dari Jawa timur, Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Badan Pusat Statistik, 2011). Etnis Jawa tersebar pada hampir keseluruhan provinsi di Indonesia. Suku Jawa juga memiliki sub-suku, seperti Suku Osing, Orang Samin, Suku Tengger, Bawean/Boyan, Naga, Nagaring dan suku-suku lainnya di Pulau Jawa. Menurut Indrawati (2002) Etnis Jawa tergolong dalam masyarakat yang memiliki pembatasan-pembatasan tertentu dalam relasi gender yang memperlihatkan kedudukan dan peran laki-laki yang lebih dominan dibanding perempuan. Istilah wanita itu sendiri berasal dari bahasa Jawa yang berarti "*wani ditata*" (berani ditata). Istilah tersebut secara tidak langsung telah menunjukkan adanya tuntutan kepasifan peran pada perempuan etnis Jawa yang harus tunduk kepada laki-laki.

Penelitian yang dilakukan oleh Putri & Lestari (2015) menyatakan bahwa pandangan budaya pada Etnis Jawa tradisional membatasi peran seorang istri hanyalah sebatas dalam sektor domestik yang dikenal dengan istilah *kanca wingking*, yang berarti teman belakang. Dalam hal ini perempuan Jawa dianggap sebagai teman dalam mengelola urusan rumah tangga, khususnya urusan anak, memasak, mencuci dan lain-lain atau lebih sering dikenal dengan *masak, macak*,

manak (3M). Bahkan menurut Handayani dan Novianto (2004) dalam budaya Jawa juga dikenal konsep “*swarga nunut, neraka katut*” (ke surga ikut, ke neraka pun turut) juga menggambarkan posisi perempuan Jawa sebagai seorang istri yang harus patuh terhadap perintah suami sebagai pemimpin rumah tangga. Pandangan yang demikian akan mewarnai kehidupan rumah tangga yang menunjukkan bahwa perempuan dari etnis Jawa harus tunduk kepada pihak laki-laki. Paradigma yang terbentuk di dalam masyarakat khususnya yang memiliki system keluarga patrilineal memandang suami berada di ranah publik karena kedudukannya sebagai pencari nafkah utama di dalam keluarga, sedangkan istri berada pada ranah domestik yang mengatur rumah tangga dan berkewajiban mengurus anak-anak di rumah. Menurut padangan tradisional di masyarakat bagi seorang perempuan yang lebih banyak beraktivitas di luar rumah seringkali dianggap hal yang kurang pantas atau tabu. Namun pada kenyataannya, akibat adanya tuntutan ekonomi, banyak ibu rumah tangga yang kemudian aktif dalam kegiatan publik sebagai pencari nafkah.

Seiring modernisasi di Indonesia terutama pada perempuan Etnis Jawa yang antara lain disebabkan oleh emansipasi wanita dan masuknya pengaruh budaya Barat telah menggeser pola relasi gender yang mengarah kepada persamaan derajat dan kedudukan pada masyarakat Etnis Jawa (Nugroho, 2008).

Perempuan mulai memiliki pandangan untuk mampu mengeksplorasi diri untuk mendapat pendidikan yang setara dengan kaum laki-laki dan ingin mandiri secara ekonomi. Pendidikan bagi kaum perempuan saat ini khususnya di wilayah Jawa sudah dapat dikatakan lebih baik, hal ini dikarenakan semakin mudahnya akses perempuan di Jawa untuk mendapatkan pendidikan. Mudahnya akses pendidikan di Pulau Jawa juga diimbangi dengan meningkatnya jumlah Sekolah dengan beragam tingkat pendidikan baik swasta maupun sekolah negeri. Berdasarkan

data IFLS5 dapat diketahui bahwa pada perempuan terdidik etnis Jawa lebih didominasi oleh perempuan dengan latar belakang pendidikan SMK yaitu sebanyak 1073 individu dan S1 sebanyak 534 individu. Jika dilihat secara keseluruhan etnis Jawa termasuk etnis yang mementingkan pendidikan. Hal ini dapat terlihat dibandingkan dengan beberapa etnis lainnya, perempuan etnis Jawa yang paling banyak memiliki jumlah responden yang telah menuntaskan hingga pendidikan tinggi. Bahkan pada tingkat paket C etnis Jawa juga jauh lebih dominan dibanding etnis lainnya yaitu mencapai hingga 48 individu. Perempuan Etnis Jawa menganggap pendidikan merupakan factor penting yang dapat menunjang masa depan mereka, terutama dalam hal mendapat pekerjaan di masa depan.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan Siregar (2007) mengungkapkan fakta bahwa rata-rata 40% perempuan yang bekerja di Indonesia berasal dari etnis Jawa. Hal ini dapat dijelaskan sebab etnis Jawa dianggap memiliki sikap yang gigih, serta kemampuan mengaktualisasi diri dalam masyarakat modern. Pada etnis Jawa istri didukung untuk bekerja bahkan disarankan untuk bekerja namun pekerjaan domestik dalam keluarga tetap menjadi tanggung jawab istri (Rakhmawati, 2013). Perempuan harus bisa membagi waktu antara peran domestik dan publik, dimana sebagai ibu rumah tangga pada budaya masyarakat Indonesia khususnya perempuan Etnis Jawa yang memposisikan peran perempuan sebagai pemeran utama dalam melahirkan dan mengasuh anak, menyiapkan kebutuhan keluarga, dan tata kelola ekonomi rumah tangga, namun dengan kontribusi mereka ke ranah publik maka tidak jarang peran ganda perempuan berubah menjadi beban ganda perempuan. Sebab selain kewajiban untuk menjalankan peran domestik mereka, masuknya perempuan ke sektor publik membuat perempuan mendapatkan peran baru yang menuntut mereka untuk bekerja secara baik dan kompeten di ranah publik.

5.4.7 Kecenderungan Etnis Sunda terhadap Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan Terdidik di Indonesia

Etnis Sunda merupakan kelompok etnis yang berasal dari bagian barat pulau Jawa di Indonesia. Wilayah penyebaran etnis Sunda dikenal dengan istilah *Tatar Pasundan* yang mencakup wilayah administrasi provinsi Jawa Barat, Banten, Jakarta, Lampung dan wilayah barat Jawa Tengah (Banyumasan) (Badan Pusat Statistik, 2011). Wilayah utama penyebaran Etnis Sunda berada di Provinsi Banten dan Jawa Barat. Etnis Sunda menganut sistem keluarga yang bersifat bilateral, dimana garis keturunan pada Etnis Sunda ditarik dari kedua belah pihak yaitu bapak dan ibu. Ikatan kekeluargaan yang kuat serta peranan agama Islam yang mendominasi sangat mempengaruhi adat istiadat dalam mengatur segala aspek kehidupan Etnis Sunda (Mukhlis, 2015).

Dalam etnis Sunda, laki-laki dianggap sebagai kepala keluarga yang harus menanggung perekonomian keluarga, sedangkan perempuan memiliki peran untuk mengatur kehidupan keluarga. Menurut penelitian yang dilakukan Marlina (2006) pada budaya etnis Sunda dikenal ungkapan yang mengharuskan wanita turut atau tunduk kepada suami seperti "*taraje nanggeuh, dulang tinande*" (tangga bersandar, dulang siap menadah) yang bermakna perempuan selalu bersedia untuk menjalankan kewajiban. Selain itu juga terdapat ungkapan "*Najan kaliang cocopet ge kudu milu*" (ke dalam lubang kutu lantai pun harus ikut), yaitu dibawa ketempat yang penuh kesulitan sekalipun perempuan itu wajib patuh mengikuti suaminya.

Namun seiring berkembangnya budaya, tantangan globalisasi mendorong partisipasi perempuan Etnis Sunda. Seperti penelitian yang dilakukan oleh Kristanti & et all (2013) mengemukakan bahwa perempuan etnis Sunda dapat mengatur peran ganda mereka dengan baik, perempuan Etnis Sunda nyatanya

mampu menjalankan peran publik sebagai pekerja tanpa harus mengabaikan kebutuhan anak-anak mereka. Keberhasilan perempuan Etnis Sunda dalam pembagian dua tuntutan peran tersebut akibat pembagian waktu yang cukup baik telah dilakukan untuk memenuhi tuntutan kedua peran tersebut. Hasil penelitian tersebut mendukung temuan hasil estimasi IFLS 5 Tahun 2015 dalam penelitian ini yang menunjukkan bahwa Etnis Sunda memiliki kecenderungan yang positif dan signifikan terhadap keputusan perempuan terdidik untuk bekerja atau tergolong sebagai angkatan kerja (*Peran Publik*). Temuan hasil dari penelitian Surya (2010) juga menambahkan bahwa kaum perempuan khususnya pada Etnis Sunda juga memiliki kemampuan untuk bertindak tegas, sehingga dapat menimbulkan persepsi yang positif untuk mendorong partisipasi mereka dalam ranah publik. Kepemimpinan perempuan akan muncul dan dapat disetarakan dengan laki-laki ketika pemimpin perempuan itu memiliki keinginan berprestasi yang tinggi. Partisipasi perempuan khususnya yang terdidik akan diakui oleh masyarakat ketika prestasi yang ditunjukkannya dalam ranah publik dapat membawa organisasi meraih tujuan (Surya, 2010).

Sesuai dengan kondisi saat ini, dimana telah terjadi perubahan sosial dalam masyarakat yang diiringi dengan mudahnya akses pendidikan dan teknologi sehingga mendorong tumbuhnya modernisasi di Indonesia. Hal ini mengakibatkan perubahan nilai-nilai budaya tradisional yang telah mempengaruhi pola pikir dan tindakan kaum perempuan. Perempuan yang pada mulanya dianggap hanya bekerja di dapur dan mengurus rumah tangga, kini terbukti dengan semakin terbukanya kesempatan untuk turut bekerja di luar rumah dengan didasari oleh berbagai kebutuhan motif yang berbeda-beda mulai dari motif ekonomi, yaitu berusaha menambah pendapatan keluarga, keinginan untuk memperoleh harga diri sampai dengan kebutuhan untuk mengaktualisasikan diri (Budiyati, 2010).

5.4.8 Kecenderungan Etnis Minang terhadap Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan Terdidik di Indonesia

Secara geografis, Etnis Minang berasal dari beberapa wilayah meliputi Sumatera Barat, separuh daratan Riau, bagian utara Bengkulu, bagian barat Jambi, pantai barat Sumatera Utara, barat daya Aceh, dan Negeri Sembilan di Malaysia. Etnis Minangkabau atau lebih dikenal dengan etnis Minang sering disebut sebagai sebuah masyarakat matrilineal terbesar di dunia (Indrizal, 2005).

Masyarakat matrilineal menunjukkan bahwa perempuan memiliki kedudukan yang penting dalam menentukan garis keturunan sehingga perempuan dianggap lebih memiliki kuasa dan memiliki kontrol atas tanah dan rumah (Herawati, 2016).

Kehidupan sosial di Minangkabau diatur oleh hukum adat sistem budaya matrilineal dimana perempuan Etnis Minang memiliki kedudukan yang tinggi (*the ultimate source of wisdom*) sebagaimana dikenal dalam ungkapan adatnya *amban puro*; pemegang kunci harta pusaka dan "*ka-pai tampek batanyo, ka-pulang tampek babarito*" artinya semua keputusan yang akan diambil harus di musyawarahkan dulu dengan perempuan etnis Minang. Dalam kata lain, kontrol Budaya Etnis Minang berada di tangan perempuan yang bertindak sebagai pengontrol kekuasaan (Nofaldi, 2009).

Filosofi adat Minangkabau memberi kedudukan terhadap akses ekonomi yang sangat tinggi kepada pihak perempuan. Minangkabau dengan sistem matrilinealnya, menunjukkan adanya kedudukan perempuan yang sangat kuat.

Perempuan dilindungi oleh sistem pewarisan matrilineal dan pola menetap setelah menikah yang bersifat matrilokal. Dalam adat Minangkabau terdapat bentuk harta warisan yang dikuasai oleh perempuan disebut "*pusako tinggi*". Warisan yang disebut "*Pusako Tinggi*" adalah harta benda berupa sawah, ladang, rumah, perhiasan, dan sebagainya, yang diwariskan kepada perempuan secara turun

temurun menurut garis keturunan matrilineal, dan tidak boleh diperjualbelikan, kecuali digadaikan, dan itu harus melalui beberapa persyaratan yang ketat.

Mudahnya akses perempuan etnis Minang terhadap ekonomi mengakibatkan laki-laki di Minangkabau tidak memiliki hak atas harta, yang menyebabkan laki-laki yang pergi dari kampung halamannya untuk merantau untuk perbaikan taraf ekonomi (Fatimah, 2012). Bagi laki-laki yang telah berkeluarga (mempunyai anak dan istri), tidak ragu-ragu untuk meninggalkan keluarga sebab istri dan anak-anak mereka dianggap mampu untuk bertahan hidup dengan harta warisan istri mereka di kampung halamannya. Dengan demikian, tidak jarang perempuan Minangkabau sudah terbiasa mengatur dan menjadi pemimpin dalam keluarganya.

Budaya merantau telah mengakibatkan banyak laki-laki Etnis Minang yang pergi ke luar Sumatera Barat sehingga kondisi ini mengakibatkan urusan mencari nafkah keluarga didalam wilayah mulai banyak diambil alih oleh perempuan Etnis Minang (Latif, 2002). Kondisi inilah yang mendorong peningkatan kontribusi perempuan Etnis Minang dalam sektor ekonomi formal maupun informal. Pendapat tersebut sejalan dengan hasil penelitian ini yang menunjukkan bahwa perempuan Etnis Minang memiliki kecenderungan yang positif dan signifikan terhadap keputusan perempuan terdidik untuk bekerja atau tergolong sebagai angkatan kerja (*Peran Publik*).

5.4.9 Kecenderungan Etnis Batak terhadap Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan Terdidik di Indonesia

Etnis Batak merupakan kelompok etnis yang mendiami sebagian besar wilayah Sumatera Utara. Etnis Batak di Indonesia terhitung 8,5 juta (3,6 persen) yang mencakup Suku Batak Angkola, Batak Karo, Batak Mandailing, Batak Pakpak Dairi, Batak Simalungun, Batak Tapanuli, Batak Toba dan Dairi (Badan Pusat Statistik, 2011). Perempuan Batak terkenal sebagai seorang yang pekerja keras,

tangguh dan perkasa. Dikampung halamannya, perempuan etnis Batak dikenal memiliki mata pencaharian sebagai petani dan peladang yang sangat giat bekerja mengolah sawah maupun ladang milik keluarga dari pihak suaminya. Sebagai penduduk migran, perempuan etnis Batak juga dikenal sebagai *Parlangsam* yaitu para perempuan Batak yang bekerja mengumpulkan pakaian dan barang-barang bekas untuk dijual kembali. Sama halnya bagi perempuan pedagang Batak Toba (*inang-inang*) yang menganggap bahwa bekerja bukan hanya sekadar untuk memenuhi kebutuhan ekonomi dan pendidikan anak-anak mereka.

Penelitian yang dilakukan oleh Nurelide (2007) diungkapkan bahwa bagi masyarakat Batak Toba yang masih menganut sistem kekeluargaan Patrilineal menganggap bahwa anak laki-laki memiliki arti yang penting dalam keluarga karena nantinya ia yang akan meneruskan kelangsungan hidup keluarganya. Pada Etnis Batak dikenal dengan budaya *hagabeon* yang dipandang secara luas, tidak hanya terletak pada banyaknya jumlah keturunan melainkan pada tangka pendidikan anak-anak Etnis Batak. Etnis Batak menganggap pendidikan sebagai indikator yang penting. Bagi Etnis Batak, memiliki anak namun tidak memiliki pendidikan tinggi akan menimbulkan aib bagi keluarganya, sehingga para orang tua pada Etnis Batak berusaha agar memiliki anak yang berpendidikan tinggi agar diharapkan kedepannya dapat bekerja dan mengangkat derajat keluarga.

Hasil penelitian ini juga menunjukkan bahwa perempuan terdidik Etnis Batak memiliki kecenderungan untuk bekerja atau tergolong sebagai angkatan kerja (*Peran Publik*). Selain itu hasil dalam penelitian ini juga menunjukkan bahwa perempuan terdidik dari Etnis Batak memiliki kecenderungan untuk menjadi angkatan kerja 62,6% lebih tinggi dibandingkan dengan perempuan terdidik etnis lainnya. Angka tersebut dapat diartikan bahwa perempuan etnis Batak merupakan etnis yang memiliki kecenderungan paling besar terhadap keputusan perempuan

terdidik untuk bekerja atau tergolong sebagai angkatan kerja (*Peran Publik*). Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan Siregar (2007) mengungkapkan partisipasi kerja perempuan di Indonesia didominasi oleh etnis Batak. Bagi perempuan Etnis Batak, bekerja keras bukan hanya demi memperbaiki taraf ekonomi namun juga mampu menunjukkan eksistensi dan martabat dirinya dalam kehidupan rumah tangga dan keluarganya (Baiduri, 2015).

5.4.10 Kecenderungan Etnis Bali terhadap Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan Terdidik di Indonesia

Budaya Patrilineal sangat berpengaruh terhadap Hukum Adat di Bali. Budaya tersebut yang mendorong terjadinya diskriminasi terhadap kaum perempuan di Bali. Perempuan Etnis Bali (*predana*) memiliki kedudukan yang dianggap lebih rendah daripada laki-laki (*purusa*) sehingga perempuan Etnis Bali seringkali disebut sebagai "*Pewaris tanpa warisan*". Pada Etnis Bali anak laki-laki yang berhak mewarisi, sedangkan perempuan hanya penikmat tanpa punya hak atas warisan (Rahmawati, 2016). Peranan dan kedudukan perempuan dalam masyarakat yang bergantung dari sistem sosial budaya yang akan mempengaruhi kedudukan dan peranan perempuan (Kartodirjo dan Tukiran, 2001: 135). Hal ini secara tidak langsung mendorong perempuan pada Etnis Bali untuk berpartisipasi ke dunia kerja untuk memperbaiki taraf ekonominya.

Data menunjukkan bahwa tingkat partisipasi angkatan kerja (TPAK) perempuan Bali rata-rata lebih tinggi daripada TPAC perempuan Indonesia (Sakernas, 2010). Hal ini dapat dipahami apabila dikaitkan dengan ajaran budaya Etnis Bali dalam hal motivasi kerja yang sering dikenal dengan *Catur Purusa Artha* mencakup empat ajaran yaitu *dharma*, *artha*, *kama* dan *moksah* yang melandasi kehidupan setiap manusia Bali tidak terkecuali perempuan Etnis Bali. Makna dari *Catur Purusa Artha* tersebut meliputi "bekerja berdasarkan sifat-sifat yang baik

(*dharma*) dan keinginan atau hasrat (*kama*) yang baik untuk memperoleh penghasilan atau harta (*artha*) guna mencapai kesejahteraan dan kebahagiaan yang abadi (*moksah*) adalah suatu kewajiban bagi setiap orang Bali” (Saskara, 2010).

Hasil penelitian ini juga menunjukkan bahwa perempuan Etnis Bali memiliki kecenderungan yang positif dan signifikan terhadap keputusan perempuan terdidik untuk bekerja (*Peran Publik*), bahkan perempuan etnis Bali merupakan Etnis yang memiliki kecenderungan paling besar kedua di Indonesia dimana sekitar 52,8% perempuan terdidik Etnis Bali lebih memutuskan untuk bekerja atau tergolong sebagai angkatan kerja (*Peran Publik*). Penemuan ini didukung oleh hasil penelitian Rahmawati (2016) yang menyatakan bahwa para perempuan Etnis Bali menganggap bekerja sebagai sebuah persembahan (*yadnya*) yang wajib dilakukan dengan ikhlas tanpa memandang adanya ketidakadilan gender antara laki-laki dan perempuan. Perempuan Etnis Bali memiliki persepsi yang berbeda terkait gender dengan adanya penyesuaian diri serta dukungan sosial yang membentuk konsep diri para perempuan Etnis Bali dalam keputusannya untuk berkontribusi terhadap ekonomi keluarga (Widayani & Hartati, 2014). Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa adat Bali pada dasarnya tidak membebani perempuan Bali dalam hal memutuskan peran perempuan, hukum adat di Bali justru dianggap memberikan panduan kepada perempuan Etnis Bali untuk berkiprah di ruang publik tanpa mengabaikan fungsi mereka sebagai ibu dan istri (Mudzakkir, 2013).

5.4.11 Kecenderungan Etnis Betawi terhadap Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan Terdidik di Indonesia

Hasil estimasi IFLS 5 menunjukkan bahwa perempuan terdidik Etnis Betawi memiliki kecenderungan yang positif dan signifikan terhadap keputusan perempuan terdidik untuk bekerja atau tergolong sebagai angkatan (*Peran Publik*). Hasil penemuan ini bertolak belakang dengan penelitian yang dikemukakan oleh Halimatusa'diah (2017) yang menyatakan bahwa perempuan Betawi masih memiliki anggapan dalam *stereotype* yang mengatakan bahwa wilayah kekuasaannya hanya seputar sumur, dapur dan kasur (*3 ur*) yang pada akhirnya akan membawa perempuan Betawi kedalam pemahaman yang sederhana tentang perempuan, yakni “berkutut di seputaran rumah saja”. Dalam pandangan tradisional Etnis Betawi masih ada anggapan bahwa laki-laki Betawi yang dianggap oleh perempuan sebagai pengambil keputusan dalam keluarga, dimana para lelaki Betawi yang ternyata tidak suka bila para istri mereka bekerja di luar rumah (Ahyat, 2015).

Namun seiring berkembangnya budaya, tantangan globalisasi mendorong partisipasi perempuan Etnis Betawi untuk ikut berkontribusi terhadap pendapatan keluarga. Hal ini didukung berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Ahyat (2015) yang meneliti dinamika perempuan Betawi pada abad ke-20, hasil penemuannya menyatakan bahwa telah terjadi pergeseran dinamika seiring berkembangnya waktu dimana para perempuan Etnis Betawi baik yang tinggal di pinggir kota maupun di tengah kota tengah banyak yang sudah mengenyam pendidikan tinggi. Begitupun pula pada tingkat partisipasi dalam angkatan tenaga kerja yang menunjukkan peningkatan angkat partisipasi kerja etnis Betawi.

Walaupun hasil temuan menunjukkan bahwa perempuan terdidik etnis Betawi memiliki kecenderungan yang positif dan signifikan, namun nilai

kecenderungan perempuan Etnis Betawi masih dianggap rendah jika dibandingkan dengan beberapa etnis yang diteliti. Hasil tersebut dikarenakan perempuan Betawi masih sangat berhati-hati untuk mengikuti kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi yang berkembang di sekitarnya tersebut sebagai upaya dari pengendalian diri dari risiko terjadinya benturan-benturan, baik secara agama maupun pandangan budaya (Ahyat, 2015). Itulah sebabnya, perempuan etnis Betawi belum bisa memanfaatkan potensinya secara maksimal sebagai perempuan pembangunan untuk banyak berkontribusi terhadap perekonomian terutama dalam hal menempatkan diri sebagai perempuan yang memiliki kesetaraan dengan kaum laki-laki.

5.4.12 Kecenderungan Etnis Sasak terhadap Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan Terdidik di Indonesia

Etnis Sasak merupakan etnis mayoritas di pulau Lombok yang mencapai hampir 95% penduduk. Sebagian besar penduduk Etnis Sasak menganut agama islam, dimana faktor agama tersebut menjadi pedoman pada Etnis Sasak dalam kehidupan sehari-hari. Tanggung jawab ekonomi pada etnis Sasak merupakan kewajiban laki-laki. Sebaliknya, untuk pengelolaan kebutuhan keluarga diserahkan pada sub kepala rumah tangga, yaitu perempuan (Maryam, 2018).

Seperti halnya perempuan pada etnis Sasak di Nusa Tenggara Barat lebih diposisikan pada peran mengurus rumah tangga saja yang dalam budaya Sasak dikenal *begawean leq bale doang* yang berarti bahwa perempuan Etnis Sasak berperan untuk mengurus rumah tangga.

Namun sejalan dengan mudahnya akses pendidikan, maka bergeser pula peran perempuan Etnis Sasak (Maryati, 2015). Dengan kata lain, perempuan mulai berkontribusi kedalam berbagai aktivitas publik seiring adanya peningkatan akses pendidikan yang dimiliki oleh perempuan (Haris, 2002). Hal ini juga

didukung oleh data statistik yang dikeluarkan oleh BPS (2016) yang menunjukkan bahwa jumlah angkatan kerja perempuan Etnis Sasak yang bekerja pada tahun 2015 mengalami peningkatan hingga 95.02 persen, angka tersebut lebih tinggi jika dibandingkan dengan tahun 2014 yang hanya mencapai 94.70 persen. Bahkan banyak migran yang berasal dari NTB adalah berjenis kelamin perempuan (Mudzakir, 2013). Rata-rata sebanyak 41,1% perempuan Etnis Sasak lebih memilih menjadi pekerja migran ke wilayah Arab Saudi (Sahidu, 2012).

Menurut Viorica & Indrawati (2016) nilai budaya yang dianut oleh perempuan Sasak dapat mempengaruhi kinerja dan etos kerja mereka dalam bekerja. Perempuan suku Sasak sangat lekat dengan figur wanita penenun, sebab menenun menjadi mata pencaharian tradisional yang umum dilakukan oleh perempuan suku Sasak. Penelitian Rosyidi (2012) mengungkapkan bahwa proses menenun perempuan suku Sasak memiliki nilai budaya yang tercermin pada kain tenun suku Sasak, yakni ornamen *Subahnale* melambangkan kesabaran, keikhlasan dan berserah pada Tuhan Yang Maha Esa, ornamen *Sabuk Peraban* melambangkan gotong royong dan kekerabatan, *Sri Menanti* segala hal tercipta berpasangan dan saling melengkapi, *Lonong Abang Ragi Genap* melambangkan kesempurnaan dalam pelaksanaan upacara adat, *Pucuk Rebong* melambangkan kesuburan, dan *Bintangan* melambangkan kejayaan dan kekayaan.

Selain itu hasil menarik juga ditemukan dalam penelitian ini, dimana latar belakang pendidikan perempuan Etnis Sasak justru didominasi oleh tingkat Madrasah Aliyah (MA). Hasil temuan ini menunjukkan bahwa faktor agama masih mendominasi pengambilan keputusan pada Etnis Sasak, khususnya bagi kaum perempuan. Sehingga tidak heran apabila muncul sebuah ungkapan yang menyatakan bahwa Sasak dan Islam adalah satu kesatuan (Bartholomew, 2001).

5.5 Keterbatasan Ruang Lingkup Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk melihat kecenderungan perempuan khususnya perempuan terdidik di Indonesia dalam konsep *dualisme cultural*, terkait peran ganda pada perempuan yaitu partisipasi perempuan menyangkut peran tradisi (*domestik sphere*) dan peran transisi (*public sphere*) yang dilihat dari sisi penawaran tenaga kerja (*labor supply*). Dalam penelitian ini terdapat beberapa keterbatasan ruang lingkup meliputi:

1. Pada variabel usia menggunakan variabel kategori numerik yang diukur menggunakan skala notasi nilai 1 untuk kategori usia produktif (15-64 tahun) dan nilai 0 untuk kategori usia tidak produktif (dibawah 15 tahun dan diatas 64 tahun) sesuai definisi usia produktif angkatan kerja pada BPS tanpa mengaitkan usia dengan tingkat fertilitas perempuan.
2. Jumlah etnis yang digunakan dalam penelitian ini telah disesuaikan dengan tujuan penelitian. Pemilihan etnis dilakukan berdasarkan data IFLS 5 dipilih dari hasil estimasi etnis di Indonesia yang didominasi oleh perempuan terdidik, sehingga dipilih tujuh etnis yang dominan meliputi Etnis Jawa, Sunda, Minang, Batak, Bali, Betawi, dan Sasak. Pemilihan tujuh etnis ini juga didasari dengan adanya literature atau penelitian terdahulu yang mendukung.
3. Dalam ruang lingkup pembahasan kelompok etnis hanya dibahas mengenai peran budaya dalam pengaruhnya terhadap keputusan partisipasi kerja perempuan bukan pembahasan mendalam terkait adat budaya masing masing etnis.

BAB VI

PENUTUP

6.1 Kesimpulan

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui kecenderungan karakteristik sosial (usia, status kawin, tingkat pendidikan), karakteristik ekonomi (tanggung jawab anak dan kondisi ekonomi rumah tangga) dan karakteristik etnis (Jawa, Sunda, Minang, Batak, Bali, Betawi, dan Sasak) terhadap peran perempuan terdidik di Indonesia dalam memutuskan untuk berperan sebagai pekerja (*Peran Publik*) atau berperan sebagai ibu rumah tangga (*Peran Domestik*). Menggunakan data *IFLS waves-5* Tahun 2015 dengan jumlah responden mencapai 18.831 individu di Indonesia melalui metode binary logistik maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Perempuan terdidik di Indonesia yang tergolong usia produktif (15-64 tahun) akan lebih cenderung untuk memutuskan masuk ke pasar kerja (*Peran Publik*) dibandingkan dengan penduduk usia non produktif. Hal ini dikarenakan usia berkaitan langsung dengan kondisi fisik seorang tenaga kerja dalam produktifitas kerjanya sehingga bagi usia produktif atau *prime age working years* (usia prima bagi pekerja) nilai rehat akan dianggap begitu tinggi dan mereka akan lebih memilih menghabiskan waktunya untuk bekerja.
2. Perempuan terdidik di Indonesia yang sudah menikah cenderung untuk mengurus rumah tangga (*Peran Domestik*) dibandingkan dengan perempuan terdidik yang berstatus belum menikah. Perempuan yang sudah menikah memiliki kemungkinan yang lebih tinggi untuk tidak bekerja, sebab setelah menikah perempuan akan lebih mengutamakan urusan rumah tangga, sehingga karir bukan lagi menjadi tujuan yang utama.

3. Perempuan dengan pendidikan tinggi cenderung memilih untuk bekerja atau tergolong sebagai angkatan kerja (*Peran Publik*). Perempuan dengan latar belakang pendidikan perguruan tinggi lebih memiliki kecenderungan yang lebih besar untuk masuk ke pasar kerja dibandingkan dengan perempuan tamatan SMA/SMK/MA/Paket C dan Diploma. Hasil tersebut tentu menunjukkan bahwa semakin tinggi tingkat pendidikan, maka kecenderungan perempuan terdidik untuk masuk ke pasar kerja akan semakin besar.

4. Perempuan terdidik yang memiliki anak dibawah 15 tahun justru semakin terdorong untuk masuk ke pasar kerja (*Peran Publik*) guna mendapatkan tambahan pemasukan bagi ekonomi keluarga. Meningkatnya jumlah anak yang dimiliki dalam sebuah keluarga, maka tentu meningkat pula beban tanggungan dalam keluarga tersebut yang mendorong perempuan untuk mencari pendapatan tambahan dari bekerja. Sebab anak usia dibawah 15 tahun dianggap belum mampu untuk memenuhi kebutuhannya sendiri sehingga masih harus bergantung terhadap orang tua dan menjadi beban tambahan bagi ekonomi keluarga.

5. Perempuan terdidik yang berada pada kondisi ekonomi rumah tangga yang cukup justru memiliki kecenderungan untuk menjadi angkatan kerja (*Peran Publik*). Hal ini menunjukkan bahwa perempuan dengan kondisi ekonomi yang cukup akan mampu untuk melanjutkan pada tahap pendidikan yang lebih tinggi, sehingga mereka memiliki keinginan yang kuat untuk mengaplikasikan ilmu yang telah didapatkan ke pasar kerja dan mulai menumbuhkan kesadaran bagi perempuan untuk mandiri secara ekonomi dan tidak bergantung pada satu penyangga ekonomi keluarga (*one earner household*). Dengan demikian perempuan dapat menunjukkan bahwa perempuan berpendidikan tinggi memiliki harga diri atau *prestige* (gengsi).

6. Dilihat berdasarkan kategori Etnis menunjukkan bahwa secara keseluruhan perempuan terdidik yang berasal dari Etnis Jawa, Sunda, Minang, Batak, Bali, Betawi dan Sasak cenderung memutuskan untuk berpartisipasi ke dalam pasar kerja atau tergolong sebagai angkatan kerja (*Peran Publik*). Perempuan terdidik dari Etnis Batak dan Etnis Bali tergolong sebagai perempuan terdidik yang memiliki kecenderungan paling besar sebagai angkatan kerja dibandingkan dengan etnis lainnya. Ditinjau dari tingkat pendidikannya, keseluruhan etnis didominasi dengan perempuan terdidik dengan latar belakang SMA/SMK. Berbeda halnya dengan etnis Sasak dimana perempuan terdidik justru didominasi oleh latar belakang pendidikan Madrasah Aliyah (MA), hal ini menunjukkan bahwa di etnis Sasak faktor agama Islam sangat berpengaruh terhadap pengambilan keputusan masyarakatnya.

6.2 Saran

Berkaitan dengan penelitian yang telah dilakukan, penulis dapat memberikan saran sebagai berikut:

1. Mengacu pada kesimpulan dalam penelitian ini yang menyatakan bahwa tingkat pendidikan tinggi sejalan dengan keputusan perempuan untuk masuk ke pasar kerja, maka perlu adanya program *link and match* berdasarkan sinkronisasi antara Kementerian Pendidikan Nasional dengan Kementerian Tenaga Kerja sehingga metode pengembangan fasilitas pendidikan yang ada bagi perempuan sesuai dengan minat dan kebutuhan di pasar kerja, seperti dibukanya jurusan keahlian khusus pada tingkat sekolah kejuruan seperti Kosmetologi, Teknologi Pangan, ataupun nutrisi dimana jurusan-jurusan tersebut secara alamiah merupakan hal yang

terlibat langsung oleh peran perempuan. Selain itu pemerintah juga memberikan kesempatan system magang bersertifikat bagi para perempuan di perusahaan yang kompeten. Dengan demikian diharapkan perempuan dengan pendidikan tinggi telah memiliki bekal yang matang untuk masuk ke pasar kerja.

2. Sehubungan dengan hasil penelitian ini yang menunjukkan tingginya kecenderungan perempuan terdidik dan memiliki anak dibawah 15 tahun untuk masuk ke pasar kerja, maka penting bagi pemerintah untuk menaruh perhatian khusus terkait kebijakan yang dapat melindungi hak perempuan dan memberikan pekerjaan layak dengan penyediaan fasilitas kerja yang *pro gender* sesuai Permen PP No.5 Tahun 2015, seperti fasilitas ruang laktasi bagi pekerja perempuan. Dengan adanya fasilitas tersebut perempuan akan lebih nyaman dan leluasa dalam bekerja dan terhindar dari hal yang tidak diinginkan.

3. Mengingat angkatan kerja perempuan di Indonesia berlatar belakang pendidikan SMA/SMK maka diharapkan pemerintah segera mengefektifkan PP No. 31 Tahun 2006 Tentang sistem Pelatihan Kerja Nasional dalam rangka meningkatkan kualitas angkatan kerja perempuan di berbagai pelatihan-pelatihan kerja. Selain itu diharapkan Balai Latihan Kerja (BLK) sebagai salah satu pusat pelatihan di daerah agar dapat lebih ditingkatkan dari segi kualitas dan kuantitas serta dapat memastikan kurikulum yang diajarkan di BLK tersebut sesuai dengan kebutuhan industri kerja.

4. Mengacu pada tingginya angka penduduk perempuan usia produktif di Indonesia, diharapkan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPPA) dapat bekerjasama dengan Satuan Kerja Pemerintah Daerah (SKPD) untuk melakukan koordinasi pilot proyek

pengembangan usaha mikro yang dikelola oleh perempuan sesuai dengan minat para perempuan melalui program Peningkatan Produktivitas Ekonomi Perempuan (PPEP) misalnya seperti usaha mikro sektor pengolahan makanan khas daerah atau kerajinan. Dengan demikian diharapkan agar perempuan khususnya yang berpendidikan tinggi mulai memiliki kesadaran untuk bergerak aktif menciptakan lapangan pekerjaan bukan hanya mencari pekerjaan.

5. Bagi penelitian selanjutnya untuk dapat melakukan studi lebih lanjut terkait sebab-sebab spesifik bagi perempuan terdidik yang telah berstatus sudah menikah untuk tidak berpartisipasi kedalam pasar kerja sehingga dapat diketahui alasan praktis perempuan yang telah menikah tersebut meninggalkan pasar kerja lebih disebabkan oleh keterlibatan suami dalam pengambilan keputusan atau dikarenakan oleh faktor lain pada perempuan.
6. Motif perempuan untuk masuk kedalam pasar kerja juga tidak terlepas dari faktor permintaan tenaga kerja (*labor demand*) sehingga diharapkan untuk penelitian selanjutnya dapat menganalisis peran ganda pada perempuan terdidik dari segi permintaan tenaga kerja (*labor demand*) yang dapat dilihat dari segi tingkat upah perempuan dan peluang lapangan kerja bagi perempuan terdidik di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, N. (2012). Probability of Working among Married Woman in Malaysia. *Jurnal Ekonomi Malaysia*, 46(1)107 - 117.
- Adioetomo, S. M. (2017, Juni 28). *Perempuan dan Bonus Demografi*. Retrieved from Ulasan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia: <http://www.feb.ui.ac.id/blog/2017/07/07/prof-sri-moertiningsih-adioetomo-perempuan-dan-bonus-demografi-kompas-rabu28-juni-2017/>
- Agustina. (2017). Peramalan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan Dan Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Di Jawa Barat. *Jurnal Ilmiah UMMI*, Volume X1.
- Ahyat, I. S. (2015). Dinamika Wanita Betawi pada Abad ke-20. *Jurnal Kajian Pendidikan*, 5(1).
- Andoh, G. B., & Ampofo, M. G. (2018). The Educated Indigenous African Woman and the Issue of being Assertive as Showcased in Adeche's Purple Hibiscus? *American Research Journal of English and Literature*, ISSN: 2378-9026 Volume 4, Issue 1.
- Archer, K., & Lemeshow, S. (2006). Goodness-of-fit test for a logistic regression model fitted using survey sample data. *The Stata Journal*, Number 1, pp. 97–105.
- Arikunto, S. (2006). *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: PT. Rineka Cipta.
- Atmanti, H. D. (2005). Investasi Sumber Daya Manusia Melalui Pendidikan. *Dinamika Pembangunan*, Vol. 2 No. 1 / Iull 2005: 30 - 3.
- Aulia, M. F. (2017). Determinan Pengangguran Terdidik di Jawa Timur. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa FEB*.
- Badan Pusat Statistik. (2011). *Kewarganegaraan, Suku Bangsa, Agama dan Bahasa Sehari-Hari Penduduk Indonesia. Hasil Sensus Penduduk 2010*. Jakarta-Indonesia: Badan Pusat Statistik.
- Badan Pusat Statistik. (2016). *Keadaan Angkatan Kerja di Indonesia*. Indonesia: Badan Pusat Statistik.
- Badan Pusat Statistik. (2018, April 17). *Pengangguran Terbuka Menurut Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan 1986 - 2017*. Retrieved from [www.bps.go.id](https://www.bps.go.id/statictable/2009/04/16/972/pengangguran-terbuka-menurut-pendidikan-tertinggi-yang-ditamatkan-1986---2017.html): <https://www.bps.go.id/statictable/2009/04/16/972/pengangguran-terbuka-menurut-pendidikan-tertinggi-yang-ditamatkan-1986---2017.html>
- Badan Pusat Statistik. (2018, April 17). *Persentase Penduduk 10 Tahun ke Atas menurut Tipe Daerah, Jenis kelamin, dan Status Pendidikan, 2009-2017*. Retrieved from www.bps.go.id: <https://www.bps.go.id/statictable/2012/04/23/1612/persentase-penduduk-10-tahun-ke-atas-menurut-tipe-daerah-jenis-kelamin-dan-status-pendidikan-2009-2017.html>

- Badan Pusat Statistik. (2018). *Sumbangan Pendapatan Perempuan menurut Provinsi, 2010-2017*. Jakarta: Badan Pusat Statistik.
- Badan Pusat Statistik. (2018, April 10). *Tingkat Pengangguran Terbuka Penduduk Berumur 15 Tahun Ke Atas menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin, 2009-2012*. Retrieved from www.bps.go.id: <https://www.bps.go.id/dynamictable/2016/03/23/1148/tingkat-pengangguran-terbuka-penduduk-berumur-15-tahun-ke-atas-menurut-kelompok-umur-dan-jenis-kelamin-2009-2012.html>
- Baiduri, R. (2015). Paradoks Perempuan Batak Toba: Suatu Penafsiran Hermeneutik terhadap Karya Sastra Ende Siboru Tombaga. *MIMBAR*, Vol. 31 No. 1.
- Bartholomew, J. R. (2001). *Alif Lam Mim: Kearifan Masyarakat Sasak*. Yogyakarta: Tiara Wacana.
- Becker, G. S. (1993). Human Capital: A Theoretical and Empirical Analysis, with Special Reference to Education. *ResearchGate*.
- Bellante, D., & Mark, J. (1983). *Ekonomi Ketenagakerjaan*. Jakarta: FE UI.
- Biagi, F., & Lucifora, C. (2005). Demographic and Education Effects on Unemployment in Europe: Economic Factors and Labour Market Institutions. *Discussion Paper Series*, IZA DP No. 1806.
- BPS. (2018). *Sumbangan Pendapatan Perempuan menurut Provinsi, 2010-2017*. Retrieved from Badan Pusat Statistik: <https://www.bps.go.id/dynamictable/2018/08/15/1572/-idg-sumbangan-pendapatan-perempuan-menurut-provinsi-2010-2017.html>
- Büchel, F., & Battu, H. (2003). The Theory of Differential Overqualification: Does it Work? *Schottish Journal of Political Economy*, Volume 50, Issue 1 : pp- 1-16.
- Budiati, A. (2010). Aktualisasi Diri Perempuan Dalam Sistem Budaya Jawa (Persepsi Perempuan terhadap Nilai-nilai Budaya Jawa dalam Mengaktualisasikan Diri). *Pamator*, Volume 3, Nomor 1.
- Bungin, H. (2005). *Metode Penelitian Kuantitatif-Komunikasi, Ekonomi, dan Kebijakan Publik Serta Ilmu-Ilmu Sosial Lainnya - Edisi Kedua*. Jakarta: KENCANA.
- Cook, D., Dixon, P., & et.all. (2001). *Binary Response and Logistic Regression Analysis*. Iowa State University NSF/ILI : project Beyond Traditional Statistical Methods.
- Dessie, W. A. (2015). Women and Unemployment in Bahir Dar City, Ethiopia: Determinants and Consequences. *American Scientific Research Journal for Engineering, Technology, and Sciences (ASRJETS)*, ISSN (Print) 2313-4410, ISSN (Online) 2313-4402.
- Dewi, P. M. (2012). Partisipasi Tenaga Kerja Perempuan dalam Meningkatkan Pendapatan Keluarga. *Jurnal Ekonomi Kuantitatif Terapan*, Vol. 5 No. 2.

Drago, R., & Black, D. (2004). Female Breadwinner Families. *Their Existence, Persistence and Source*, IZA DP No. 1308.

Fatimah, S. (2012). Gender Dalam Komunitas Masyarakat Minangkabau; Teori, Praktek Dan Ruang Lingkup Kajian. *Jurnal Ilmiah Kajian Gender*, Vol 2. No.1.

Fitri, & Junaidi. (2016). Pengaruh pendidikan, upah dan kesempatan kerja terhadap pengangguran terdidik di Provinsi Jambi. *e-Jurnal Ekonomi Sumberdaya dan Lingkungan*, Vol. 5. No.1, ISSN: 2303-1220.

Frank, R. (1978). Why Woman Earn Less: The Theory and Estimation of Differential Overqualification. *American Economic Review*, 63:3, pp 360-373.

Galal, A. (2002). The Paradox of Education and Unemployment in Egypt. *Egyptian Centre Economic Studies WP67*, Working Paper No. 67.

Gender statistics. (2010). Improving the lives of women and girls in Nigeria: Issues, policies and actions. *British Council, Nigeria*, 2012.

Ghozali, I. (2011). *Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program SPSS*. Semarang : BP Universitas Diponegoro. Semarang: BP Universitas Diponegoro.

Hakim, L. (2011). Perkembangan Tenaga Kerja Wanita Di Sektor Informal: Hasil Analisa Dan Proxy Data Sensus Penduduk. *Among Makarti*, Vol.4 No.7.

Hakkert, R. (2007). The Demographic Bonus and Population in active ages. *IPEA/UNFPA Project RLA5P201: Regional support to Population and Development in the implementation of the MDGs in the LAC Region*, 14-15.

Halimatusa'diah. (2017). Perempuan Betawi dalam Adaptasi Zaman. *Diskusi Betawi Kita ke-18, Orang Betawi, Perempuan, dan Perannya*.

Harahap, J. (2014). Analisis Makro Tenaga Kerja Perempuan Dalam Pembangunan. *Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 2 (1) (2014): 40-45.

Haryanto, S. (2008). Peran Aktif Wanita Dalam Peningkatan Pendapatan Rumah Tangga Miskin: Studi Kasus Pada Wanita Pemecah Batu Di Pucanganak Kecamatan Tugu Trenggalek. *Jurnal Ekonomi Pembangunan*, Vol. 9, No. 2, Desember 2008, hal. 216 - 227.

Hasanah, H., & Wardan, Z. (2016). Peran Perempuan Suku Duanu Dalam Perekonomian Keluarga. *Jurnal BAPPEDA*, Vol. 2 No. 3.

Herawati, M. (2016). Pemaknaan Gender Perempuan Pekerja Media Di Jawa Barat. *Jurnal Kajian Komunikasi*, Volume 4, No. 1, hlm 84 - 94.

Hidayat, M., & Hadi, M. (2017). Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Perempuan Antar Kabupaten di Provinsi Riau. *Media Trend* 12, p.76-89.

Hidayat, R. S. (2003). Women in Indonesia between Ethnicity and Religiosity. *WACANA*, Vol 5 No 1 (82-93).

Hidayati, N. (2015). BEBAN GANDA PEREMPUAN BEKERJA (Antara Domestik dan Publik). *MUWAZAH*, Volume 7, Nomor 2.

Hosmer, D., & Lemeshow, S. (1989). *Applied logistic regression*. New York: Wiley.

Humaedi, S. (2016). Peran Ibu Yang Bekerja Dalam Pemenuhan Kebutuhan Dasar Anak. *Researchgate (PROSIDING KS: RISET & PKM)*, VOLUME: 3 NOMOR: 1 HAL: 1 - 154.

Hyman, D. (2010). *Public Finance (A contemporary Application of Theory to Policy)*. USA: South-Western Cengage Learning .

Idris, d. R. (2007). *Bahan Ajar: Ekonomi Sumber Daya Manusia*. FE UNP.

Indrawati, Y. (2002). *Pergeseran konsep gender pada rumah tradisional Jawa Joglo*. Retrieved from Repository FSRD: <https://fsrd.itb.ac.id/thesis-disertasi/magister-desain-angkatan-2002/>

Inglehart, R., & Norris, P. (2000). The Developmental Theory of the Gender Gap: Women's and Men's Voting Behavior in Global Perspective. *International Political Science Review*, Vol 21, No. 4, 441–463.

Inglehart,, R., & Norris, P. (2000). The Developmental Theory of the Gender Gap: Women's and Men's Voting Behavior in Global Perspective. *International Political Science Review / Revue Internationale De Science Politique*, 21(4), 441-463. Retrieved from <http://www.jstor.org/stable/1601598>.

International Labour Office – ILO. (2012). *Global Employment Trends for Women*. Geneva: International Labour Office .

International Labour Organization. (2017). *Indonesia Jobs Outlook 2017: Harnessing technology for growth and job creation*. Jakarta: ILO: Kantor Perburuhan Internasional.

Jati, W. R. (2015). Bonus Demografi Sebagai Mesin Pertumbuhan Ekonomi : Jendela Peluang Atau Jendela Bencana Di Indonesia ? *Populasi*, Volume 26 Nomer 1, Halaman 1-19.

Kingdon, G. G., & Knight, J. (2004). Unemployment in South Africa: The Nature of the Beast. *Researchgate*, 32(3):391-408 .

Kristanti, I., & et all. (2013). Dual Roles Of Women Street Vendors In Jakarta Based On Gilligan Theory. *Jurnal Psikologi Indonesia*, Vol. X, No. 2, 57-66, ISSN. 0853-3098.

Kuncoro. (1997). Masalah Pembangunan Manusia: Dari Kependudukan, Pengangguran, Wanita, Hingga Migrasi. *Jurnal Ekonomi Pembangunan*, Vol. 2 No. 2.

Mangunsong, F. (2009). Faktor Intrapersonal, Interpersonal, Dan Kultural Pendukung Efektivitas Kepemimpinan Perempuan Pengusaha Dari Empat Kelompok Etnis Di Indonesia. *MAKARA, SOSIAL HUMANIORA*, VOL. 13, NO. 1, : 19-28.

Mankiw, N. (2006). *Principles of Economics, Pengantar Ekonomi Mikro*. Jakarta: Salemba Empat.

Manning, C., Effendi, T. N., & Tukiran. (1987). *Struktur pekerjaan, sektor informal, dan kemiskinan di kota : sebuah studi kasus di Diraprajan, Yogyakarta*. Yogyakarta: Pusat Penelitian Kependudukan, Universitas Gadjah Mada.

Marlina, I. (2006). Kedudukan Wanita Menak Dalam Struktur Masyarakat Sunda (Studi Kasus Di Kota Bandung). *Sosiohumaniora*, Vol. 8, No. 2,: 184 - 204.

Maryam. (2018). Kajian Etno Ekonomi Partisipasi Kerja Perempuan menikah Etnis Sasak,Samawa, Mbojo, Di Nusa Tenggara Barat. *Disertasi*, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya Malang.

Maryati, S. (2015). Dinamika Pengangguran Terdidik: Tantangan Menuju Bonus Demografi Di Indonesia. *ECONOMICA Journal of Economic and Economic Education*, Vol.3 No.2 (124 - 136).

Maulida, Y. (1999). Rumah Tangga Melayu dan Strategi Bertahan Hidup. *Thesis*, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.

Maulida, Y. (2012). Analisis Faktor - Faktor yang Mempengaruhi Partisipasi Kerja Perempuan Nikah Menurut Etnis di Kota pekanbaru. *Disertasi*, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya Malang.

Mincer, J. (1991). Education and Unemployment. *NBER WORKING PAPERS SERIES*, Working Paper No. 3838.

Mudzakkir, A. (2013). Women And Citizenship In Indonesia: Case From Bali, Sasak, And Minahasa. *Jurnal Masyarakat & Budaya*, Volume 15 No. 1.

Mukhlas, O. (2015). Etika, Budaya Dan Agama Etnis Sunda Perspektif Sosiologi. *Islamica*, Vol. 2 No. 2.

Naik , C., & Gandhe, S. (2002). A Study Of Unemployment Among Female Graduates In Pune City. *Planning Commission, Govt. of India : Indian Institute of Education*, 128/2, J. P. Naik Path, Kothrud, Pune 411 038 .

Nofialdi. (2009). Strategi Penyiapan Pengusaha Industri Makanan Ringan Perempuan Minangkabau. *Jurnal Agribisnis Kerakyatan*, Volume 2, Nomor 1, hal: 49-60.

Nugroho, M. D. (2008). Pergeseran Gender Pada Interior Rumah Tinggal Di Kawasan Jeron Benteng Yogyakarta. *Lintas Ruang*, Vol. 2 Edisi 2 ISSN 1978-0702.

Okemakinde, T., & Olaniyan, D. (2008). Human Capital Theory: Implications for Educational Development. *European Journal of Scientific Research*, Vol.24 No.2 (2008), pp.15716.

Okorie , U. A. (2013). Women Education In Nigeria: Problems and Implication For Family Role and Stability. *European Scientific Journal*, Edition vol.9, No.28 ISSN: 1857 – 7881 (Print) e - ISSN 1857- 7431 .

Pratomo , D. S. (2017). Fenomena Pengangguran Terdidik Di Indonesia. *SUSTAINABLE COMPETITIVE ADVANTAGE-7 (SCA-7) FEB UNSOED*.

Putranto, T. D. (2018). Kelas Sosial Dan Perempuan Generasi Z di Surabaya Dalam Membuat Keputusan Setelah Lulus Sekolah Menengah Atas. *JURNAL KOMUNIKASI PROFESIONAL*, e-ISSN: 2579-9371, URL: <http://ejournal.unitomo.ac.id/index.php/jkp>.

Putri, R., & Muharram, F. (2015). Perempuan Madura, Tradisi Lokal Dan Gender. *SEMINAR NASIONAL GENDER & BUDAYA MADURA III*, <http://lppm.trunojoyo.ac.id/budayamadura/download>.

Putri, D. P., & Lestari, S. (2015). Pembagian Peran Dalam Rumah Tangga Pada Pasangan Suami Istri Jawa. *Jurnal Penelitian Humaniora*, Vol. 16, No. 1, : 72-85, ISSN: 1411-5190.

Rahmawati, N. (2016). Perempuan Bali dalam Pergulatan Gender (Kajian Budaya, Tradisi, dan Agama Hindu). *Jurnal Studi Kultural*, Volume I No.1: 58–64.

Rahmawati, D. (2013). Konflik Peran Ganda Wanita Bekerja Pada Etnis Jawa kaitannya dengan Gaya Pengasuhan. *Seminar Internasional Malindo 3*, ISBN: 979-25780-2-1. 4.

RAND Corporation. (2016). The Fifth Wave of the Indonesia Family Life. *RAND LABOR AND POPULATION*, Volume 1. Retrieved from RAND LABOR AND POPULATION: <https://www.rand.org/labor/FLS/IFLS/ifls5.html>

RAND Labor And Population. (2016). The Fifth Wave of The Indonesia Family Life Survey: Overview And Field report. *Working Paper*, Volume 1.

Razak, M. I., & Yusof, A. M. (2014). Factors Influencing Unemployment among Graduates in Malaysia – An Overview. *Journal of Economics and Sustainable Development*, Vol.5, No.11.

Rodríguez, G. (2007). Logit Models for Binary Data. *University of Texas*.

Sahidu, A. M. (2012). Household Livelihoods Strategy of Sasak Rice Farmers and Fishermen at East Coast Lombok. *Masyarakat, Kebudayaan dan Politik*, Vol. 25, No. 4, 289–298.

Saleh, R. (2008). Analisis Penawaran Tenaga Kerja Wanita Nikah dan Opportunity Cost Rumah Tangga di Perkotaan Sumatera Selatan. *Disertasi*, Program Doktor Ilmu Ekonomi Pascasarjana Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya Malang.

Sangen, M. (2005). Pengaruh Orientasi Kewirausahaan, Orientasi Pasar dan Budaya Etnis China, Bugis, Jawa dan Banjar terhadap Usaha Kecil. *Disertasi*, PPS Universitas Brawijaya Malang.

Sarkar, S. (2008). Trends and patterns of labour supply and unemployment in India. *ILO Asia-Pacific Working Paper Series*.

Saskara, I. A. (2010). Tinjauan Perspektif Ekonomi dan Nonekonomi Perempuan Bali yang Bekerja di Sektor Publik: Studi Konflik Peran. *JURNAL APLIKASI MANAJEMEN*, VOLUME 10 | NOMOR 3.

Schultz, T. W. (2004). Investment in Human Capital. *JSTOR*, Vol. 51, No. 1 , 1-17.

Setyowati , E. (2009). Analisis Tingkat Partisipasi Wanita Dalam Angkatan Kerja Di Jawa Tengah Periode Tahun 1982-2000. *Jurnal Ekonomi Pembangunan*, Vol. 10, No.2, hlm. 215 - 233.

Shonhaji. (2017). Keterlibatan Perempuan Dalam Mewujudkan keserasian Sosial Pada Masyarakat Multietnik Di Lampung. *Jurnal TAPIS*, Vol. 14 No.01.

Simanjuntak, P. J. (2001). *Ekonomi Sumber Daya Manusia*. Jakarta: Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia.

Siregar, M. (2007). Keterlibatan Ibu Bekerja dalam Perkembangan Pendidikan Anak. *Jurnal Harmoni Sosial*, Volume II, No. 1.

Sitohang, Y. O. (2017). Identifikasi Pengangguran Sukarela (Voluntary Unemployment) Perempuan di Kabupaten Kepahiang Tahun 2015 . *Statistika*, Vol. 17, No. 1.

Sperandei, S. (2014). Understanding logistic regression analysis. *Biochemia Medica*, 24(1): 12–18.

Stiera, H., & Epsteina, N. (2018). Institutional change and women's work patterns along the family life course. *Research in Social Stratification and Mobility* , <https://doi.org/10.1016/j.rssm.2018.07.001>.

Subroto, G. (2014). EDUCATION AND ECONOMICS: Perspectives of Theoretical and Empirical. *Jurnal Pendidikan dan Kebudayaan*, Vol. 20, Nomor 3.

Surya, P. (2010). Kepemimpinan Perempuan Bernilai Kesundaan Di Bidang Pendidikan. *MANAJEMEN PENDIDIKAN*, No. 02/Th VI.

Sutomo. (1999). Analisis Pengangguran Tenaga Kerja Terdidik di Kotamadya Surakarta Tahun 1996. *Jurnal Ekonomi Pembangunan, Manajemen, dan Akuntansi. Perspektif*, No.2 .

Tarmizi, N. (2012). *Ekonomi Ketenagakerjaan*. Palembang: Unsri Press.

The World Bank. (2011, September 20). *World Development Report: Gender Equality in Indonesia Improving*. Retrieved from WORLD BANK PRESS RELEASE: <http://www.worldbank.org/in/news/press-release/2011/09/20/world-development-report-gender-equality-indonesia-improving>

The World Bank. (2018, May 8). *Unemployment, youth total (% of total labor force ages 15-24) (national estimate)*. Retrieved from Data The World Bank: <https://data.worldbank.org/indicator/SL.UEM.1524.NE.ZS>

The World Bank. (2018, May 7). *Wage and salaried workers, total (% of total employment) (modeled ILO estimate)*. Retrieved from Data The World Bank: <https://data.worldbank.org/indicator/SL.EMP.WORK.ZS?view=chart>

Tjaja, R. (2000). Wanita Bekerja dan Implikasi Sosial. *Naskah*, No. 20, Juni-Juli.

Todaro, M., & Smith, S. (2006). *Pembangunan Ekonomi. Jilid I Edisi Kesembilan. Haris Munandar (penerjemah)*. Jakarta: Erlangga.

Tomasevski, K. (2005). Not Education for All, Only for Those Who Can Pay: The World Bank's Model for Financing Primary Education. *Law, Social Justice & Global Development Journal (LGD)*, 1.

Tyrowicza, J. (2018). How (not) to make women work? *Social Science Research*, 75 154–167.

United Nations Development Programme. (2016). *Human Development Report 2016*. New York: United Nations Development Programme.

Universitas Indonesia. (2018, January 3). *Regresi Multinomial Logit*. Retrieved from Pelatihan Statistik Universitas Indonesia: <http://pelatihan-ui.com/regresi-multinomial-logit/>

Utomo, S. (2009). Model Regresi Logistik Untuk Menunjukkan Pengaruh Pendapatan Per Kapita, Tingkat Pendidikan, Dan Status Pekerjaan Terhadap Status Gizi Masyarakat Kota Surakarta. *Universitas Sebelas Maret Surakarta*.

Viorica, P., & Indrawati, K. (2016). Gambaran Kinerja Dan Etos Kerja Perempuan Suku Sasak Yang Bekerja Di Denpasar. *Jurnal Psikologi Udayana*, Vol. 3, No. 2, 271-282

Viorica, P., & Indrawati, K. (2016). Gambaran Kinerja dan Etos Kerja Perempuan Suku Sasak yang Bekerja di Denpasar. *Jurnal Psikologi Udayana*, Vol. 3, No. 2, 271-282

Vuluku, G., Wambugu, A., & Moyi, E. (2013). Unemployment and underemployment in Kenya: a gender gap analysis. *Economics*, 2(2): 7-16.

Wahyudi, M., & et all. (2015). *Madura : Masyarakat, Budaya, Media dan Politik*. Fisib Universitas Trunojoyo Madura: Puskakom Publik bekerjasama dengan Penerbit Elmaterra .

Wasito. (2004). Aktivitas Harian Petani Berdimensi Jender Dan Etnis (Kasus Beberapa Desa di Sumatera Utara)Aktivitas Harian Petani Berdimensi Jender Dan Etnis (Kasus Beberapa Desa di Sumatera Utara). *Jurnal Pengkajian dan Pengembangan Teknologi Pertanian*, Vol. 7, No. 2, : 204-213 .

Widayani, N., & Hartati, S. (2014). Kesenjangan dan Keadilan Gender dalam Pandangan Perempuan Bali: Studi Fenomenologis terhadap Penulis Perempuan Bali. *Jurnal Psikologi Undip*, Vol.13 No.2.

World Bank. (2009). *Indonesia 2014 and Beyond: A Selective Look*. Jakarta: World Bank.

Zainal, R. I., & Elpanso, E. (2017). Model Probit Pemetaan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (Tpak) Perempuan Di Provinsi Sumatera Selatan (Pengaruh Usia, Pendidikan Dan Status Pernikahan Terhadap Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan Di Kota Palembang). *PROSIDING*, ISSN: 2598 – 0246 | E-ISSN: 2598-0238.

LAMPIRAN 1:

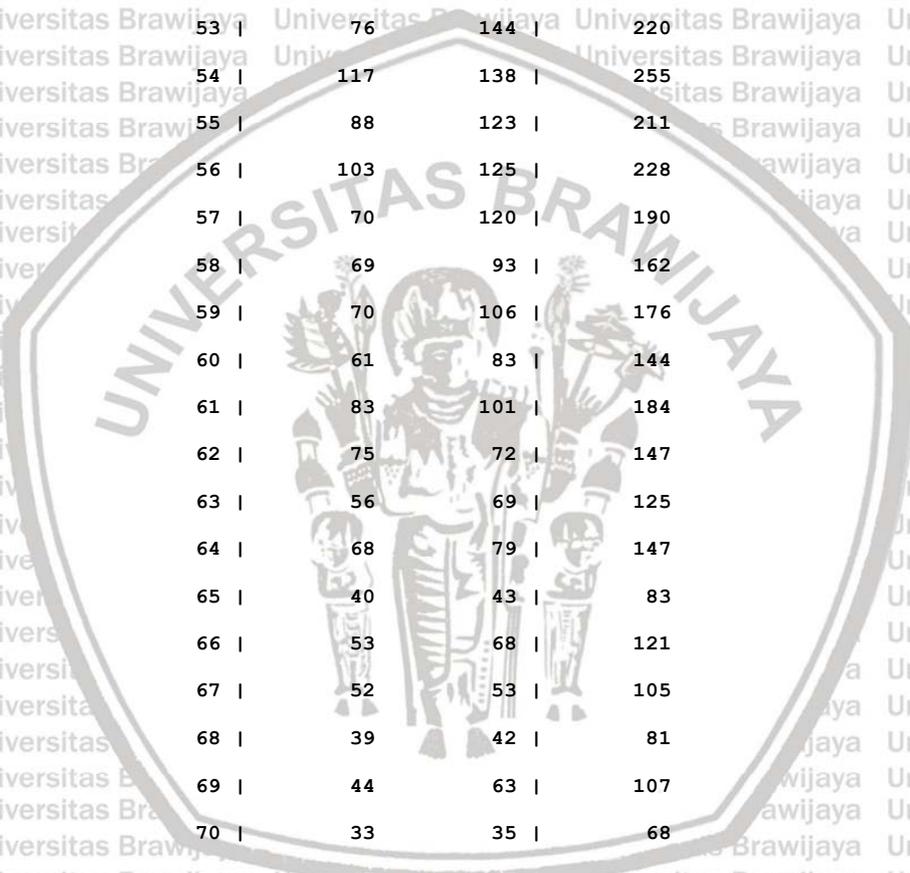
❖ Tabulasi Angkatan Kerja Perempuan Berdasarkan Usia.

tab age d1 if gender==1

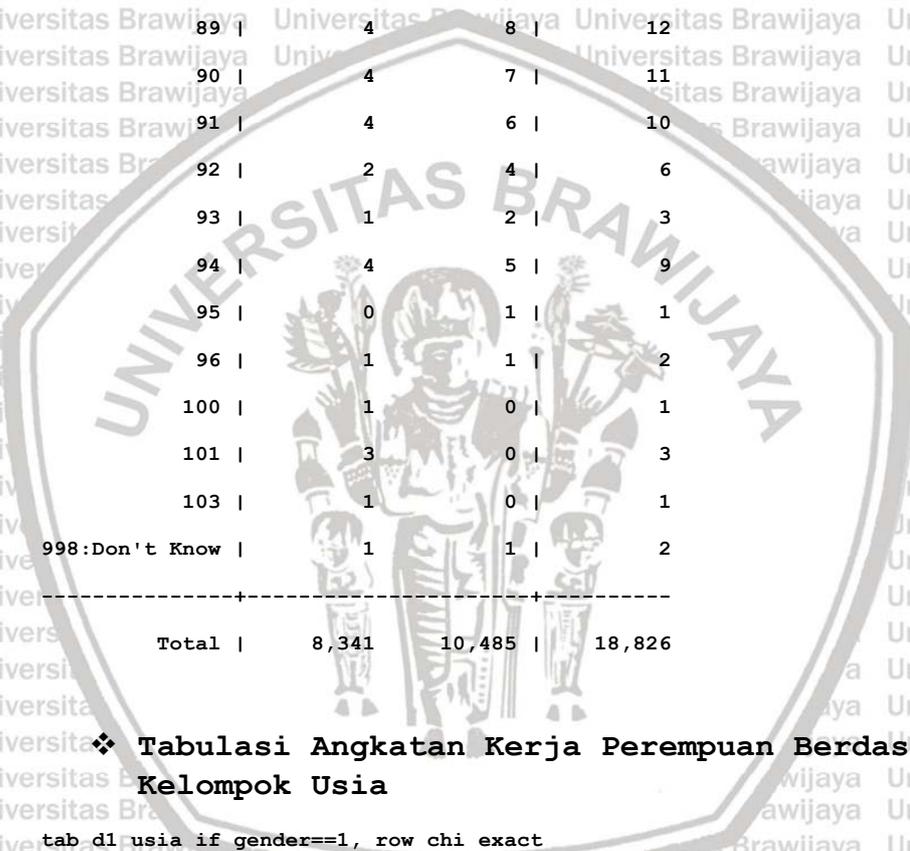
How old are you? | d1 | Total

Age Group	d1	Total
15	222	251
16	190	217
17	182	221
18	159	211
19	158	235
20	159	216
21	171	190
22	185	203
23	182	223
24	197	223
25	204	241
26	183	256
27	207	246
28	221	237
29	223	269
30	230	301
31	228	285
32	231	338
33	243	314
34	202	306
35	214	274
36	192	247
37	199	250
38	177	240
39	178	229
40	148	194
41	164	187
42	158	216
43	127	193
44	168	188

How old are you?	Male	Female	Total
45	147	176	323
46	141	172	313
47	121	151	272
48	101	129	230
49	131	143	274
50	112	154	266
51	125	167	292
52	112	142	254
53	76	144	220
54	117	138	255
55	88	123	211
56	103	125	228
57	70	120	190
58	69	93	162
59	70	106	176
60	61	83	144
61	83	101	184
62	75	72	147
63	56	69	125
64	68	79	147
65	40	43	83
66	53	68	121
67	52	53	105
68	39	42	81
69	44	63	107
70	33	35	68
71	67	67	134
72	49	51	100
73	34	36	70
74	40	50	90
75	34	24	58
76	32	35	67
77	28	27	55
78	19	14	33
79	25	26	51
80	8	15	23



How old are you?	d1	Total
81	23	29
82	12	20
83	10	10
84	15	13
85	4	12
86	10	15
87	11	14
88	5	0
89	4	8
90	4	7
91	4	6
92	2	4
93	1	2
94	4	5
95	0	1
96	1	1
100	1	0
101	3	0
103	1	0
998:Don't Know	1	1
Total	8,341	10,485



❖ **Tabulasi Angkatan Kerja Perempuan Berdasarkan Kelompok Usia**

tab d1 usia if gender==1, row chi exact

usia	d1	0	1	Total
0	717	7,628	8,345	8.59
1	798	9,688	10,486	7.61
Total	1,515	17,316	18,831	



LAMPIRAN 2:**❖ Tabulasi Angkatan Kerja Perempuan Berdasarkan Status Kawin**

```

tab marital if gender==1

```

marital	Freq.	Percent	Cum.
0	5,591	29.69	29.69
1	13,240	70.31	100.00
Total	18,831	100.00	

❖ Tabulasi Status Angkatan Kerja Perempuan dan status Kawin

```

. tab d1 marital if gender==1, row chi exact

```

d1	marital		Total
0	2,539	5,806	8,345
	30.43	69.57	100.00
1	3,052	7,434	10,486
	29.11	70.89	100.00
Total	5,591	13,240	18,831
	29.69	70.31	100.00

Pearson chi2(1) = 3.8782 Pr = 0.049

Fisher's exact = 0.050

1-sided Fisher's exact = 0.025

LAMPIRAN 3:

❖ Tabulasi Angkatan Kerja Perempuan Berdasarkan Tingkat Pendidikan

Highest level of education attended	Freq.	Percent	Cum.
2:Elementary school	3,098	30.75	30.75
3:Junior high general	1,546	15.34	46.09
4:Junior high vocational	71	0.70	46.79
5:Senior high general	1,586	15.74	62.53
6:Senior high vocational	1,353	13.43	75.96
11:Adult education A	6	0.06	76.02
12:Adult education B	28	0.28	76.30
13:Open university	11	0.11	76.41
14:Islamic School (pesantren)	21	0.21	76.62
15:Adult education C	87	0.86	77.48
17:School for Disabled	3	0.03	77.51
60:College (D1,D2,D3)	413	4.10	81.61
61:University S1	1,094	10.86	92.47
62:University S2	87	0.86	93.33
63:University S3	6	0.06	93.39
72:Islamic Elementary School (Madrasah	137	1.36	94.75
73:Islamic Junior/High School (Madrasah	294	2.92	97.67
74:Islamic Senior/High School (Madrasah	231	2.29	99.96
90:Kindergarten	1	0.01	99.97
95:Other	3	0.03	100.00
Total	10,076	100.00	

❖ **Tabulasi Angkatan Kerja Perempuan Berdasarkan Tingkat Pendidikan Tinggi**

```
. tab d1 sma if gender==1
```

d1	sma		Total
	0	1	
0	5,864	2,481	8,345
1	7,229	3,257	10,486
Total	13,093	5,738	18,831

```
. tab d1 diploma if gender==1
```

d1	diploma		Total
	0	1	
0	8,110	235	8,345
1	10,073	413	10,486
Total	18,183	648	18,831

```
. tab d1 universitas if gender==1
```

d1	universitas		Total
	0	1	
0	7,818	527	8,345
1	9,288	1,198	10,486
Total	17,106	1,725	18,831

Pearson chi2(1) = 145.7960 Pr = 0.000

Fisher's exact = 0.000

1-sided Fisher's exact = 0.000

LAMPIRAN 4:

❖ Tabulasi Perempuan yang memiliki Tanggungan Anak dibawah 15 Tahun

```
tab child if gender==1
```

child	Freq.	Percent	Cum.
0	10,408	55.27	55.27
1	8,423	44.73	100.00
Total	18,831	100.00	

❖ Tabulasi Silang Status Angkatan Kerja Perempuan yang memiliki Tanggungan Anak dibawah 15 Tahun

```
. tab dl child if gender==1, row chi exact
```

dl	child		Total
	0	1	
0	4,904	3,441	8,345
	58.77	41.23	100.00
1	5,504	4,982	10,486
	52.49	47.51	100.00
Total	10,408	8,423	18,831
	55.27	44.73	100.00

Pearson chi2(1) = 74.0521 Pr = 0.000

Fisher's exact = 0.000

1-sided Fisher's exact = 0.000

LAMPIRAN 5:

❖ Tabulasi Kondisi Ekonomi Rumah Tangga Perempuan di Indonesia

```
tab conditionRT if gender==1
```

conditionRT	Freq.	Percent	Cum.
0	5,611	29.80	29.80
1	13,220	70.20	100.00
Total	18,831	100.00	

❖ Tabulasi Kondisi Ekonomi Rumah Tangga Angkatan Kerja Perempuan di Indonesia

```
tab d1 conditionRT if gender==1, row chi exact
```

d1	conditionRT		Total
	0	1	
0	2,949	5,396	8,345
	35.34	64.66	100.00
1	2,662	7,824	10,486
	25.39	74.61	100.00
Total	5,611	13,220	18,831
	29.80	70.20	100.00

Pearson chi2(1) = 220.0313 Pr = 0.000

Fisher's exact = 0.000

1-sided Fisher's exact = 0.000

LAMPIRAN 6:

❖ Tabulasi Kelompok Etnis yang didominasi oleh perempuan terdidik di Indonesia

tab d101e if gender==1 & educated==1

Which ethnical group is primarily influential in daily activities of your househ

	Freq.	Percent	Cum.
1:Javanese	3,000	39.06	39.06
2:Sundanese	810	10.55	49.61
3:Balinese	416	5.42	55.03
4:Batak	418	5.44	60.47
5:Bugis	242	3.15	63.62
6:Tionghoa	39	0.51	64.13
7:Maduranese	129	1.68	65.81
8:Sasak	322	4.19	70.00
9:Minang	543	7.07	77.07
10:Banjar	273	3.55	80.62
11:Bima-Dompu	213	2.77	83.40
12:Makassar	139	1.81	85.21
13:Nias	20	0.26	85.47
14:Palembang	108	1.41	86.87
15:Sumbawa	53	0.69	87.57
16:Toraja	50	0.65	88.22
17:Betawi	385	5.01	93.23
18:Dayak	2	0.03	93.26
19:Melayu-Deli	69	0.90	94.15
20:Komerling	10	0.13	94.28
21:Ambon	2	0.03	94.31
24:Other South Sumatera	192	2.50	96.81
25:Banten	16	0.21	97.02
95:Other	48	0.63	97.64
96:None	181	2.36	100.00
Total	7,680	100.00	

❖ **Tabulasi Kelompok Etnis berdasarkan Angkatan Kerja Perempuan Terdidik**

ab d1 dl01e if gender==1 & educated==1
 Which ethnical group is primarily influential in daily activities of your househ

dl	1:Javanes	2:Sundane	3:Balines	4:Batak	5:Bugis	6:Tiongho	7:Maduran	8:Sasak	9:Minang	10:Banjar	Total
0	1,191	325	153	153	121	13	54	144	233	103	3,116
1	1,809	485	263	265	121	26	75	178	310	170	4,564
Total	3,000	810	416	418	242	39	129	322	543	273	7,680

Which ethnical group is primarily influential in daily activities of your househ
 dl | 11:Bima-D 12:Makass 13:Nias 14:Palemb 15:Sumbaw 16:Toraja 17:Betawi 18:Dayak 19:Melayu 20:Komeri | Total

dl	11:Bima-D	12:Makass	13:Nias	14:Palemb	15:Sumbaw	16:Toraja	17:Betawi	18:Dayak	19:Melayu	20:Komeri	Total
0	72	62	12	50	13	19	159	1	36	5	3,116
1	141	77	8	58	40	31	226	1	33	5	4,564
Total	213	139	20	108	53	50	385	2	69	10	7,680

Which ethnical group is primarily influential in daily activities of your househ
 dl | 21:Ambon 24:Other 25:Banten 95:Other 96:None | Total

dl	21:Ambon	24:Other	25:Banten	95:Other	96:None	Total
0	90	6	20	80	3,116	1
1	102	10	28	101	4,564	1
Total	192	16	48	181	7,680	2



LAMPIRAN 7:

❖ Uji Multikolinearitas

Variabel	VIF	1/VIF
Jawa	1.48	0.676815
Sunda	1.22	0.820247
conditionRT	1.16	0.865030
Minang	1.13	0.887597
Betawi	1.10	0.905494
Sasak	1.10	0.906112
Bali	1.10	0.909971
sma	1.10	0.911907
Batak	1.09	0.918755
child	1.07	0.935823
universitas	1.07	0.937640
diploma	1.03	0.970032
marital	1.02	0.978612
usia	1.02	0.978658
Mean VIF	1.12	

❖ Uji goodness-of-fit test

Logistic model for dl, goodness-of-fit test

Deviance goodness-of-fit = 12016.57

Prob > chi2(18816) = 1.0000

Pearson goodness-of-fit = 8320.576

Prob > chi2(18816) = 1.0000

1. Hasil Analisis Binary Logistik

```
. logit dl usia marital sma diploma universitas child conditionRT Jawa Sunda
Minang Batak Bali Betawi Sasak if gender==1
```

```
Iteration 0: log likelihood = -12930.68
```

```
Iteration 1: log likelihood = -12632.891
```

```
Iteration 2: log likelihood = -12632.331
```

```
Iteration 3: log likelihood = -12632.331
```

```
Logistic regression              Number of obs   = 18,831
                                LR chi2(14)      = 596.70
                                Prob > chi2         = 0.0000
                                Pseudo R2          = 0.0231
                                Log likelihood     = -12632.331
```

dl	Coef.	Std. Err.	z	P> z	[95% Conf. Interval]
usia	.1263143	.055148	2.29	0.022	.0182261 .2344024
marital	.0474146	.0329402	1.44	0.150	-.0171469 .1119762
sma	.097798	.0336822	2.90	0.004	.0317821 .1638138
diploma	.3928895	.0849434	4.63	0.000	.2264034 .5593755
universitas	.6804745	.0564774	12.05	0.000	.5697808 .7911682
child	.1165834	.0309688	3.76	0.000	.0558857 .1772811
conditionRT	.3108149	.0346939	8.96	0.000	.242816 .3788137
Jawa	.3922402	.0373816	10.49	0.000	.3189737 .4655068
Sunda	.3177278	.0540071	5.88	0.000	.2118758 .4235799
Minang	.2001547	.0754422	2.65	0.008	.0522908 .3480186
Batak	.6262556	.0905374	6.92	0.000	.4488055 .8037057
Bali	.5289509	.080674	6.56	0.000	.3708327 .6870692
Betawi	.3148401	.0797684	3.95	0.000	.1584969 .4711832
Sasak	.4670342	.0805374	5.80	0.000	.3091838 .6248846
_cons	-.5467416	.0622347	-8.79	0.000	-.6687194 -.4247637

```

logit dl usia marital sma diploma universitas child conditionRT Jawa Sunda
Minang Batak Bali Betawi Sasak if gender==1, or
Iteration 0: log likelihood = -12930.68
Iteration 1: log likelihood = -12632.891
Iteration 2: log likelihood = -12632.331
Iteration 3: log likelihood = -12632.331

```

```

Logistic regression                               Number of obs   = 18,831
                                                    LR chi2(14)      = 596.70
                                                    Prob > chi2      = 0.0000
Log likelihood = -12632.331                       Pseudo R2       = 0.0231

```

	dl	Odds Ratio	Std. Err.	z	P> z	[95% Conf. Interval]
usia		1.134639	.0625731	2.29	0.022	1.018393 1.264153
marital		1.048557	.0345396	1.44	0.150	.9829992 1.118486
sma		1.10274	.0371427	2.90	0.004	1.032293 1.177995
diploma		1.481255	.1258228	4.63	0.000	1.254082 1.74958
universitas		1.974815	.1115324	12.05	0.000	1.76788 2.205972
child		1.123651	.0347981	3.76	0.000	1.057477 1.193967
conditionRT		1.364537	.0473412	8.96	0.000	1.274834 1.460551
Jawa		1.480293	.0553357	10.49	0.000	1.375715 1.592821
Sunda		1.374002	.0742059	5.88	0.000	1.235994 1.52742
Minang		1.221592	.0921595	2.65	0.008	1.053682 1.416259
Batak		1.870593	.1693587	6.92	0.000	1.56644 2.233803
Bali		1.697151	.136916	6.56	0.000	1.448941 1.987881
Betawi		1.37004	.1092859	3.95	0.000	1.171748 1.601888
Sasak		1.595256	.1284778	5.80	0.000	1.362313 1.86803
_cons		.5788328	.0360235	-8.79	0.000	.5123643 .6539243